



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. 21126
Pangkalan Bun 74112



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

Jalan HM. Rafi'ii No. 16 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah
Telp ☎ (0532) 24475 – 24476 Fax 📠 (0532) 24475

PERNYATAAN TELAH REVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pangkalan Bun, 30 Maret 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



ISNO PANDOWO, S.H.
Pembina tingkat I (IV/b)
NIP. 19720616 199903 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Memenuhi amanat UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan penyusunan LPPD Tahun 2022 yang dilakukan dengan cara menilai Tingkat Capaian Kinerja urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Demikian, semoga LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil evaluasi selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa yang akan datang.

Pangkalan Bun, Maret 2023
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, S.P., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	1
c. Jumlah Penduduk	3
d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan	4
e. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah	7
f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah	11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	14
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	14
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	16
c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah	17
d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan	21
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	35
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	61
2.1 Capaian Kinerja Makro	36
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	37
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	37
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	79
2.2.3 Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	197
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	202
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	376
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	377
4.1 Urusan Pendidikan	377
4.2 Urusan Kesehatan	388
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	410
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	413
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	415
4.6 Urusan Sosial	423
BAB V. PENUTUP	428

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9 tambahan lembaran Negara No. 72 Tahun 1959).

b. Data Geografis Wilayah

Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat beribukota di Pangkalan Bun, berada di Propinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur.

Terletak diantara 3 Kabupaten, Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Luas Wilayah

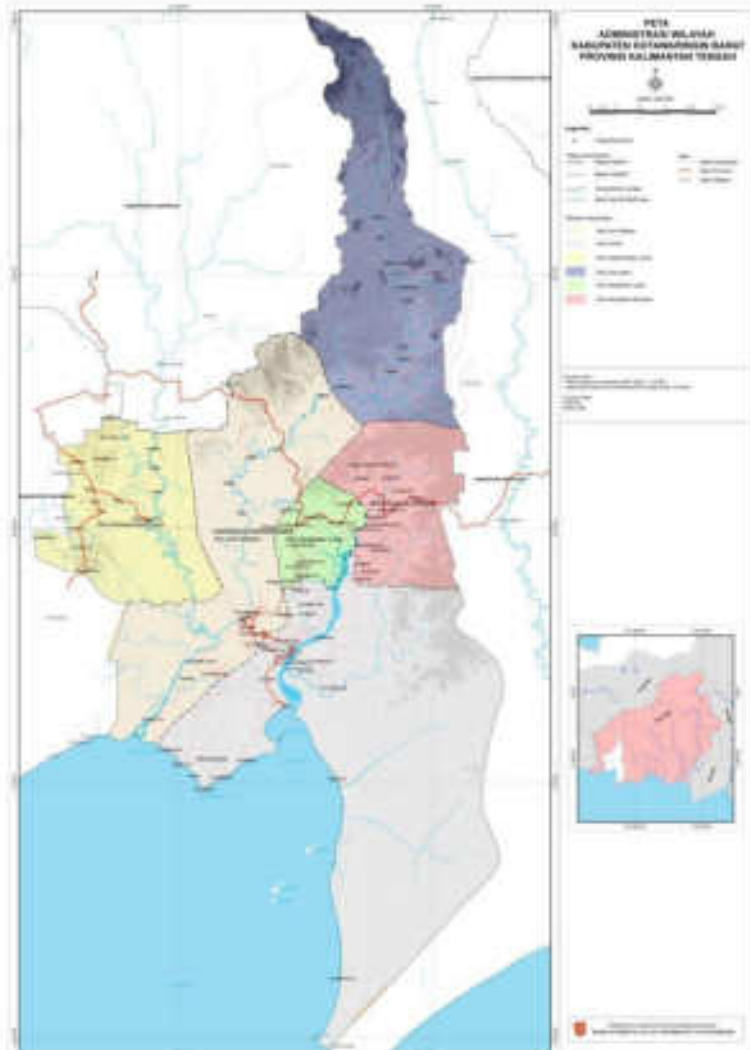
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat 10.759 km² terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini adalah 94 dengan rincian 81 Desa dan 13 Kelurahan.

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
1. Arut Selatan	2.400	22,31
2. Kumai	2.921	27,15
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4. Arut Utara	2.685	24,95
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
Kab. Kotawaringin Barat	10.759	100

Sumber data : *Permendagri No. 137 Tahun 2017*

Adapun wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat secara spasial dapat terlihat pada peta dibawah



Sumber: *RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018*

Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

- Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.
- Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
- Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial/Organosal banyak mengandung air.

c. Jumlah Penduduk;

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2022 (data terlampir)

Tabel Jumlah Penduduk Perkecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Semester I 2022

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	KUMAI	28.053	26.455	54.508
2.	ARUT SELATAN	61.005	58.856	119.861
3.	KOTAWARINGIN LAMA	10.066	9.415	19.481
4.	ARUT UTARA	4.648	4.103	8.751
5.	PANGKALAN LADA	18.815	17.589	36.404
6.	PANGKALAN BANTENG	19.480	17.712	37.192
	TOTAL	142.067	134.130	276.197

Tabel Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Perkecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Semester I 2022

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1.	KUMAI	16.996
2.	ARUT SELATAN	37.905
3.	KOTAWARINGIN LAMA	6.634
4.	ARUT UTARA	2.989
5.	PANGKALAN LADA	12.065
6.	PANGKALAN BANTENG	12.096
	TOTAL	88.685

Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Semester I 2022

NO.	KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4Thn	11.329	10.546	21.875
2	5-9Thn	13.505	12.729	26.234
3	10-14Thn	13.919	12.742	26.661
4	15-19Thn	10.477	10.033	20.510
5	20-24Thn	11.954	11.395	23.349
6	25-29Thn	10.887	10.747	21.634
7	30-34Thn	10.724	10.905	21.629
8	35-39Thn	11.379	12.000	23.379
9	40-44Thn	12.107	11.409	23.516
10	45-49Thn	10.590	9.680	20.270
11	50-54Thn	8.715	7.593	16.308
12	55-59Thn	6.258	5.667	11.925
13	60-64Thn	4.491	3.808	8.299
14	65-69Thn	2.743	2.253	4.996
15	70-74Thn	1.559	1.254	2.813
16	>74Thn	1.430	1.369	2.799
JUMLAH		142.067	134.130	276.197

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 81 Desa sebagaimana tabel berikut.

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1.	Arut Selatan	1. Kel. Baru 2. Kel. Madurejo 3. Kel. Mendawai 4. Kel. Mendawai Seberang 5. Kel. Raja 6. Kel. Raja Seberang 7. Kel. Sidorejo 8. Desa Kenambui 9. Desa Kumpai Batu Atas 10. Desa Kumpai Batu Bawah 11. Desa Medang Sari 12. Desa Natai Baru 13. Desa Natai Raya 14. Desa Pasir Panjang 15. Desa Rangda 16. Desa Runtu

		<ul style="list-style-type: none"> 17. Desa Sulung 18. Desa Tanjung Putri 19. Desa Tanjung Terantang 20. Desa Umpang
2.	Arut Utara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kel. Pangkut 2. Desa Gandis 3. Desa Kerabu 4. Desa Nanga Mua 5. Desa Panahan 6. Desa Pandan 7. Desa Penyombaan 8. Desa Riam 9. Desa Sambu 10. Desa Sukarami 11. Desa Sungai Dau
3.	Kotawaringin Lama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kel. Kotawaringin Hilir 2. Kel. Kotawaringin Hulu 3. Desa Babual Baboti 4. Desa Dawak 5. Desa Ipuh Bangun Jaya 6. Desa Kinjil 7. Desa Kondang 8. Desa Lalang 9. Desa Palih Baru 10. Desa Riam Durian 11. Desa Rungun 12. Desa Suka Mulya 13. Desa Sakabulin 14. Desa Sukajaya 15. Desa Suka Makmur 16. Desa Sumber Mukti 17. Desa Tempayung
4.	Kumai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kel. Candi 2. Kel. Kumai Hilir 3. Kel. Kumai Hulu 4. Desa Batu Belaman 5. Desa Bumi Harjo 6. Desa Keraya 7. Desa Kubu 8. Desa Pangkalan Satu 9. Desa Sabuai 10. Desa Sebuai Timur 11. Desa Sungai Bakau 12. Desa Sungai Bedaun 13. Desa Sungai Cabang 14. Desa Sungai Kapitan 15. Desa Sungai Sekonyer 16. Desa Sungai Tendang 17. Desa Teluk Bogam

		18. Desa Teluk Pulau
5.	Pangkalan Lada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadipi Atas 2. Lada Mandala Jaya 3. Makarti Jaya 4. Pandu Sanjaya 5. Pangkalan Dewa 6. Pangkalan Durin 7. Pangkalan Tiga 8. Purbasari 9. Sumber Agung 10. Sungai Melawen 11. Sungai Rangit Jaya
6.	Pangkalan Banteng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amin Jaya 2. Arga Mulya 3. Berambai Makmur 4. Karang Mulya 5. Karang Sari 6. Kebon Agung 7. Marga Mulya 8. Mulya Jadi 9. Natai Kerbau 10. Pangkalan Banteng 11. Sido Mulyo 12. Simpang Berambai 13. Sungai Bengkuang 14. Sungai Hijau 15. Sungai Kuning 16. Sungai Pakit 17. Sungai Pulau

Sumber : *Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Rekapitulasi Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

NO	SOPD	Jumlah Total	Pria	Wanita
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	93	59	34
2	Sekretariat DPRD	18	9	9
3	Inspektorat	46	29	17
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	33	16	17
5	Badan Pendapatan Daerah	31	18	13
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	36	16	20
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	30	16	14
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24	19	5
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	18	11
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33	12	21
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31	19	12
12	Dinas Lingkungan Hidup	32	15	17
13	Dinas Pariwisata	30	11	19
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30	16	14
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	33	9	24
16	Dinas Sosial	27	14	13
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29	9	20
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	48	31	17
19	Dinas Perhubungan	35	28	7
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	38	27	11
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67	53	14
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19	15	4

23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	94	58	36
24	Dinas Ketahanan Pangan	22	16	6
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44	27	17
26	Dinas Perikanan	27	13	14
27	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	29	16	13
28	Dinas Kesehatan	82	31	51
	- Puskesmas Arut Selatan	20	2	18
	- Puskesmas Madurejo	31	6	25
	- Puskesmas Mendawai	31	7	24
	- Puskesmas Natai Palingkau	25	6	19
	- Puskesmas Kumpai Batu Atas	20	1	19
	- Puskesmas Kumpai Batu Bawah	2		2
	- Puskesmas Runtu	17	3	14
	- Puskesmas Kumai	39	11	28
	- Puskesmas Teluk Bogam	24	6	18
	- Puskesmas Sungai Rangit	31	10	21
	- Puskesmas Pandu Senjaya	22	9	13
	- Puskesmas Pangkalan Lada	24	8	16
	- Puskesmas Karangmulya	36	14	22
	- Puskesmas Semanggang	43	15	28
	- Puskesmas Arut Utara	21	6	15
	- Puskesmas Sambu	21	5	16
	- Puskesmas Kotawaringin Lama	24	6	18
	- Puskesmas Riam Durian	24	10	14
	- Puskesmas Ipuh Bangun Jaya	21	4	17
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25	21	4
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73	41	32
	Koordinator Wilayah Kerja - Satuan Pendidikan Kecamatan Arut Selatan	672	214	458
	Koordinator Wilayah Kerja - Satuan Pendidikan Kecamatan Arut Utara	90	45	45
	Koordinator Wilayah Kerja - Satuan Pendidikan Kecamatan Kumai	301	124	177
	Koordinator Wilayah Kerja - Satuan Pendidikan Kecamatan Kotawaringin Lama	156	81	75
	Koordinator Wilayah Kerja - Satuan Pendidikan Kecamatan Pangkalan Lada	184	83	101

	Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Pangkalan Banteng	193	89	104
31	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	61	56	5
32	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	376	115	261
33	Kantor Kecamatan Arut Selatan	19	8	11
	- Kantor Kelurahan Mendawai	8	4	4
	- Kantor Kelurahan Mendawai Seberang	7	6	1
	- Kantor Kelurahan Raja	8	3	5
	- Kantor Kelurahan Raja Seberang	9	6	3
	- Kantor Kelurahan Baru	7	4	3
	- Kantor Kelurahan Sidorejo	6	4	2
	- Kantor Kelurahan Madurejo	10	3	7
34	Kantor Kecamatan Arut Utara	19	16	3
	- Kantor Kelurahan Pangkut	5	3	2
35	Kantor Kecamatan Kumai	21	14	7
	- Kantor Kelurahan Kumai Hilir	8	7	1
	- Kantor Kelurahan Kumai Hulu	7	4	3
	- Kantor Kelurahan Candi	6	4	2
36	Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama	18	15	3
	- Kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir	6	2	4
	- Kantor Kelurahan Kotawaringin Hulu	6	4	2
37	Kantor Kecamatan Pangkalan Lada	14	11	3
38	Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng	19	15	4
Jumlah Total		3900	1751	2149

Sumber : BKPP Kab.Kotawaringin Barat

Rekapitulasi Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

NO	SOPD	Jumlah Total	Pria	Wanita
1	2	3	4	5
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat	2	-	2
2	Koordinator Wilayah Kerja Satuan	4	6	10

	Pendidikan Kecamatan Arut Selatan			
3	Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Arut Utara	1	3	4
4	Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Kotawaringin Lama	3	6	9
5	Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Kumai	3	19	22
6	Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Pangkalan Banteng	1	13	14
7	Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Pangkalan Lada	-	12	12
8	SLTP Kecamatan Arut Utara	2		2
9	SLTP Kecamatan Kotawaringin Lama	1	1	2
10	SLTP Kecamatan Kumai	2	1	3
Jumlah Total		19	61	80

Sumber : BKPP Kab.Kotawaringin Barat

- f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.383.385.082.698,05 atau 89,95% dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.537.949.049.525,00. Rincian belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022
(Untuk periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Capaian
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	1.537.949.049.525,00	1.383.385.082.698,05	89,95
5.1	Belanja Operasi	1.095.390.892.544,00	961.334.795.405,05	87,76
5.1.1	Belanja Pegawai	646.615.341.452,00	571.225.658.076,05	88,34
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	406.691.954.120,00	362.208.900.460,00	89,06
5.1.3	Belanja Bunga	563.500.000,00	563.499.999,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	39.493.096.972,00	25.309.736.870,00	64,09
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.027.000.000,00	2.027.000.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	278.160.124.381,00	265.205.498.972,00	95,34
5.2.1	Belanja Modal Tanah	55.399.200,00	1.061.200,00	1,92
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.195.810.588,00	71.126.402.215,00	89,81
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.099.303.077,00	89.692.907.064,00	98,46
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.847.599.987,00	102.987.368.793,00	98,23
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.962.011.529,00	1.397.759.700,00	47,19
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.360.000.000,00	2.849.303.535,00	84,80

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Capaian
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.360.000.000,00	2.849.303.535,00	84,80
5.4	Belanja Transfer	161.038.032.600,00	153.995.484.786,00	95,63
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.675.814.000,00	10.267.531.800,00	75,08
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	147.362.218.600,00	143.727.952.986,00	97,53
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.537.949.049.525,00	1.383.385.082.698,05	89,95
SURPLUS/(DEFISIT)		- 129.600.345.925,00	29.603.661.434,07	(22,84)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2022

*) *Unaudited* : Angka-angka terkait realisasi pendapatan dan belanja kemungkinan masih mengalami perubahan seiring dengan adanya hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

**Target dan Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022
(Untuk periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	261.920.012.659,00	261.920.012.659,00	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	261.920.012.659,00	261.920.012.659,00	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100,00
6.2.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
	PEMBIAYAAN NETTO	208.920.012.659,00	208.920.012.659,00	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	79.319.666.734,00	238.523.674.093,97	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2022

**) Unaudited : Angka-angka terkait realisasi pendapatan dan belanja kemungkinan masih mengalami perubahan seiring dengan adanya hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).*

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut ini:

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas ASN dalam akuntabilitas keuangan dan Kinerja
3. Terbatasnya Penguasaan ASN dalam Penerapan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Secara Elektronik
4. Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
5. Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan
6. Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan
7. Kurangnya dukungan akomodasi/Insentif terhadap tenaga pengajar
8. Kurangnya minat baca masyarakat
9. Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar
10. Kurangnya akses dan kualitas terhadap layanan kesehatan
11. Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda
12. Belum optimalnya pengelolaan sarana-prasarana olahraga

13. Rendahnya Dukungan Infrastruktur Terhadap Sektor Industri
14. Rendahnya Kondusifitas Aktifitas Perdagangan Barang dan Jasa
15. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan Pertanian, Perikanan dan Peternakan
16. Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah
17. Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM (Rendahnya Minat Kewirausahaan Masyarakat)
18. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan PAD
19. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun Ekonomi
20. Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21. Lemahnya Peran Pemerintah Dalam Penguatan Ideologi Bangsa Dan Penguatan Nilai-nilai Toleransi Antar Umat Beragama
22. Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir
23. Masih tingginya tingkat kekerasan Terhadap perempuan dan anak
24. Masih Lemahnya Tingkat Keamanan Dan Tingginya Pelanggaran Perda Dikarenakan Kurang Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan
25. Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary Service Destinasi Wisata
26. Lemahnya Branding Wisata Kotawaringin Barat

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: Visi "Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas "

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu "**Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas**", maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi diturunkan ke dalam misi.

- Misi 1** Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Misi 2** Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga.
- Misi 3** Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
- Misi 4** Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat

Misi 5 Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Misi 6 Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

- 1 Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- 2 Program Pembinaan dan pengembangan organisasi dan kepegawaian
- 3 Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 4 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan
- 5 Program Pendataan dan Informasi Kependudukan
- 6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
- 7 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8 Program pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
- 9 Program layanan penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah
- 10 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 11 Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan
- 12 Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 13 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 14 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 16 Program Pengembangan karir
- 17 Program Pembinaan Aparatur
- 18 Program Pendidikan kedinasan
- 19 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 20 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- 21 Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- 22 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 23 Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
- 24 Program Pembinaan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 25 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan
- 26 Program manajemen pelayanan pendidikan
- 27 Program pendidikan anak usia dini (PAUD)
- 28 Program Pendidikan Sekolah Dasar
- 29 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 30 Program Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan
- 31 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 32 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 33 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 34 Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- 35 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 36 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 37 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 38 Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
- 39 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 40 Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang
- 41 Program Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman
- 42 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 43 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 44 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 45 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- 46 Program Pengendalian Banjir
- 47 Program Pengembangan Kawasan Permukiman
- 48 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 49 Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- 50 Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 51 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 52 Pembangunan Dermaga dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana / Fasilitas ASDP
- 53 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 54 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- 55 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 56 Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 57 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 58 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 59 Program Pengawasan Ketaatan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup
- 60 Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- 61 Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- 62 Program Tanggap Darurat
- 63 Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 64 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 65 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 66 Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
- 67 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 68 Program Pengembangan Usaha Koperasi
- 69 Program Penumbuhan Wirausaha Baru
- 70 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
- 71 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- 72 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- 73 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- 74 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
- 75 Program Stabilitas Harga Komoditas Perdagangan
- 76 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 77 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar

- 78 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 79 Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri
- 80 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- 81 Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
- 82 Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pelayanan Keluhan Masyarakat
- 83 Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
- 84 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 85 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 86 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 87 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 88 Program Peningkatan Agribisnis Peternakan
- 89 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- 90 Program Peningkatan Produksi Hortikultura
- 91 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
- 92 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
- 93 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- 94 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 95 Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
- 96 Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
- 97 Program Pengembangan Perikanan
- 98 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 99 Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
- 100 Program Pembinaan Kemasyarakatan
- 101 Program Jaminan dan Perlindungan Sosial
- 102 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- 103 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 104 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 105 Program pengembangan Kabupaten Layak Anak
- 106 Program Peningkatan Perlindungan Anak

- 107 Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - 108 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 109 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - 110 Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa ,UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal
 - 111 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 112 Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - 113 Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 114 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 115 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - 116 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 117 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - 118 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 119 Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan
 - 120 Pendidikan politik masyarakat
 - 121 Pengembangan wawasan kebangsaan
 - 122 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - 123 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 124 Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 125 Program pengembangan pemasaran pariwisata
 - 126 Program pengembangan kemitraan
- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
10. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
11. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
12. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
13. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
14. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
15. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
16. Peningkatan Pelayanan BLUD
17. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
18. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
20. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
21. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
22. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
23. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
24. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
25. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
26. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

27. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
30. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
31. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
32. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
33. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
34. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
35. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
36. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
37. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
38. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
39. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
40. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
41. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
42. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
43. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
44. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
45. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

46. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
47. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
48. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
49. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
50. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
51. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
52. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
53. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
54. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
55. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
56. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
57. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
58. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
59. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
60. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
61. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
62. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
63. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
64. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
65. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
66. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
67. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

68. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
69. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
70. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
71. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
72. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
73. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
74. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
75. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
76. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
77. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
78. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
79. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
80. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
81. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
82. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
83. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
84. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
85. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
86. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
87. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
88. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

89. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
90. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
91. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
92. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
93. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
95. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
96. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
97. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
98. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
99. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
100. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
101. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
102. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
103. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
104. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
105. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

106. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
107. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
108. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
109. Penyimpanan Sementara Limbah B3
110. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
111. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
112. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
113. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
114. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
115. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
116. Pengelolaan Sampah
117. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
118. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
119. Penataan Pendaftaran Penduduk
120. Pelayanan Pencatatan Sipil
121. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
122. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
123. Penyusunan Profil Kependudukan
124. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
125. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
126. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
127. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
128. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 129. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 130. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 131. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 132. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 133. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 134. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 135. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 136. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 137. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 138. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 139. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 140. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 141. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
 142. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 143. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 144. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

145. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
146. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
147. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
148. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
149. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
150. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
151. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
152. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
153. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
154. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
155. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
156. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
157. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
158. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
159. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
160. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
161. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

162. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
163. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
164. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
165. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
166. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
167. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
168. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
169. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
171. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
172. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
173. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
174. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
175. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
176. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
177. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
178. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
179. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
180. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
181. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
182. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
183. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
184. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

185. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
186. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
187. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
188. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
189. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
190. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
191. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
192. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
193. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
194. Pengembangan Prasarana Pertanian
195. Pembangunan Prasarana Pertanian
196. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
197. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
198. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
199. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
200. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
201. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
202. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
203. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
204. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

205. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
206. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
207. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
208. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
209. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
210. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
211. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
212. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
213. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
214. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
215. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
216. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
217. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
218. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
219. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
220. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
221. Penataan Organisasi
222. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
223. Administrasi Tata Pemerintahan
224. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
225. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
226. Fasilitasi Kerjasama Daerah
227. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
228. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

229. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
230. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
231. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
232. Layanan Administrasi DPRD
233. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
234. Pembahasan Kebijakan Anggaran
235. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
236. Peningkatan Kapasitas DPRD
237. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
238. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
239. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
240. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
241. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
242. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
243. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
244. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
245. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
246. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
247. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
248. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
249. Pengelolaan Barang Milik Daerah
250. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
251. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
252. Mutasi dan Promosi ASN
253. Pengembangan Kompetensi ASN
254. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
255. Pengembangan Kompetensi Teknis
256. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
257. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
258. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

259. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
260. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
261. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
262. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
263. Pendampingan dan Asistensi
264. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
265. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
266. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
267. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
268. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
269. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
270. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
271. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
272. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,07	73,41	0.465
2	Angka Kemiskinan	5,91	5,95	0.677
3	Angka Pengangguran	4,70	4,51	-4.043
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,61	6,01	7.13
5	Pendapatan Per Kapita	86,99	95,83	10.162
6	Ketimpangan Pendapatan	0,317	0.315	-0.631

Sumber: *Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka 2023*

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN	1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{8.345}{10.356} \times 100\% = 80,58\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 8.345</i> <i>B = Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan 10.356</i></p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data kependudukan dari Dukcapil
		2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{34.362}{33.106} \times 100\% = 103,79\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 34.362</i> <i>B = Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 33.106</i></p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data kependudukan dari Dukcapil
		3) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{15.320}{14.217} \times 100\% = 107,75\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 15.320</i> <i>B = Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan 14.217</i></p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data kependudukan dari Dukcapil
		4) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{62.770}{60.190} \times 100\% = 104,29\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 62.770</i> <i>B = Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan = 60.190</i></p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	KESEHATAN	1) Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{325}{276.197} = 0,00117$ <p><i>A = Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 325</i> <i>B = Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 276.197</i></p>		
		2) Persentase RS Rujukan Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	$\frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$ <p><i>A = Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi 2</i> <i>B = Jumlah RS di kabupaten/kota 3</i></p>	Dinas Kesehatan	
		3) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{4.505}{4.750} \times 100\% = 94,84\%$ <p><i>A = Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 4.505</i> <i>B = Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 4.750</i></p>	Dinas Kesehatan	
		4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{4.376}{4.534} \times 100\% = 96,52\%$ <p><i>A = Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 4.376</i> <i>B = Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 4.534</i></p>	Dinas Kesehatan	
		5) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{4.167}{4.318} \times 100\% = 96,50\%$ <p><i>A = Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 4.167</i> <i>B = Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota =</i></p>	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			4.318		
		6) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{17.487}{18.939} \times 100\% = 92,33\%$ <p><i>A = Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 17.487</i> <i>B = Jumlah balita di kabupaten/kota = 18.939</i></p>	Dinas Kesehatan	Data jumlah balita dari dukcapil blm tersedia
		7) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{49.825}{46.948} \times 100\% = 106,13\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 49.825</i> <i>B = Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 46.948</i></p>	Dinas Kesehatan	
		8) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{173.344}{180.358} \times 100\% = 96,11\%$ <p><i>A = Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 173.344</i> <i>B = Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 180.358</i></p>	Dinas Kesehatan	
		9) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{18.595}{18.468} \times 100\% = 100,69\%$ <p><i>A = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 18.595</i> <i>B = Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota = 18.468</i></p>	Dinas Kesehatan	
		10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	$\frac{39.104}{53.566} \times 100\% = 73,00\%$	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		elayanan kesehatan sesuai standar	<p>$A = \text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 39.104$</p> <p>$B = \text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota} = 53.566$</p>		
		11) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>$\frac{6.551}{5.591} \times 100\% = 117,17\%$</p> <p>$A = \text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 6.551$</p> <p>$B = \text{Jumlah penderita DM di kabupaten/kota} = 5.591$</p>	Dinas Kesehatan	
		12) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p>$\frac{393}{409} \times 100\% = 96,09\%$</p> <p>$A = \text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 393$</p> <p>$B = \text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota} = 409$</p>	Dinas Kesehatan	
		13) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p>$\frac{4.917}{5.470} \times 100\% = 89,89\%$</p> <p>$A = \text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = 4.917$</p> <p>$B = \text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota} = 5.470$</p>	Dinas Kesehatan	
		14) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p>$\frac{7.275}{6.255} \times 100\% = 116,30\%$</p> <p>$A = \text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = 7.275$</p>	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>B = Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 6.255</i>		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	PEKERJAAN UMUM	1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{1114}{3.180,29} \times 100\% = 35,03\%$ <p><i>A = Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1114</i> <i>B = Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 3.180,29</i></p>	Dinas PUPR	
		2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{15.775,60}{33.300} \times 100\% = 47,37\%$ <p><i>A = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 15.775,60</i> <i>B = Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 33.300</i></p>	Dinas PUPR	
		3) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{13.893,36}{16.439,90} \times 100\% = 84,51$ <p><i>A = Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) = 13.893,36</i> <i>B = luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota = 16.439,90</i></p>	Dinas PUPR	
		4) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	$\frac{61.832}{65.947} \times 100\% = 93,76\%$ <p><i>A = Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap</i></p>	Dinas PUPR	Data rumah tangga diproyeksikan dengan data penduduk dibagi 4

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<p><i>air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota = 60.928</i></p> <p><i>B = Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut = 65.947</i></p>		
		5) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{62.373}{65.947} \times 100\% = 94,58\%$ <p><i>A = Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 62.373</i></p> <p><i>B = Jumlah rumah di Kabupaten Kota = 65.947</i></p>	Dinas PUPR	Data jumlah rumah dari Disperkim
		6) Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{366}{366} \times 100\% = 100\%$ <p><i>Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 366.</i></p> <p><i>Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 366</i></p>	Dinas PUPR	
		7) Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{942,884}{1.222,845} \times 100\% = 77,10\%$ <p><i>A = Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap = 942,884</i></p> <p><i>B = Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota = 1.222,845</i></p>	Dinas PUPR	
		8) Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{738}{953} \times 100\% = 77,43\%$ <p><i>A = Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang</i></p>	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p><i>dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 738</i></p> <p><i>B = Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 953</i></p>		
		9) Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{863}{864} \times 100\% = 99,88\%$ <p><i>A = Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi = 863</i></p> <p><i>B = Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 864</i></p>	Dinas PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PERUMAHAN RAKYAT	1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0</i> <i>B = Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 0</i></p>	Dinas Perkim	Tidak ada rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
		2) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0</i> <i>B = Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0</i></p>	Dinas Perkim	Tidak ada Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program
		3) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{4.806}{19.015} \times 100\% = 25,27\%$ <p><i>A = Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 4.806</i> <i>B = Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 19.015</i></p>	Dinas Perkim	
		4) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{2.174}{66.248} \times 100\% = 3,28\%$ <p><i>A = Jumlah unit rumah tidak layak huni = 2.174</i> <i>B = Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 66.248</i></p>	Dinas Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{7.506}{7.597} \times 100\% = 98,80\%$ <p><i>A = Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 7.506</i> <i>B = Jumlah unit rumah dalam perumahan = 64.166</i></p>		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah pengaduan yang ditangani = 22</i> <i>B = Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 22</i></p>	Dinas Satpol PP Damkar	satpol pp menindaklanjuti 22 laporan masyarakat thd gangguan trantibum
		2) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 12</i> <i>B = Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi 12</i></p>	Dinas Satpol PP Damkar	
		3) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{A}{B} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana =99679</i> <i>B = Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan =99679</i></p>	BPBD	
		4) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0.525 \%$ <p><i>A = Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 523</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana. 99679</i></p>	BPBD	
		5) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	$\frac{9031}{9031} \times 100\% = 100\%$	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<i>A= Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana .9031</i> <i>B= Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana 8994</i>		
		6) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah = 36</i> <i>B = Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 36</i>	Dinas Satpol PP Damkar	
		7) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap = 6.76 menit	Dinas Satpol PP Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	SOSIAL	1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{62 \text{ Jiwa}}{527 \text{ Jiwa}} \times 100\% = 11.765 \%$ <p><i>A = Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 62</i></p> <p><i>B = Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 527</i></p>	Dinas Sosial	
		2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{2812}{2812} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 2812 KK</i></p> <p><i>B = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota = 2812 KK</i></p>	Dinas Sosial/BPBD	data terdampak bencana dan penerima bantuan dalam satuan KK

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	TENAGA KERJA	1) Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 0</i> <i>B = jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota = 0</i></p>	Dinas Nakertran	RTKD belum tersusun, direncanakan akan dilanjutkan di tahun 2023
		2) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{2081}{159.627} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 2081</i> <i>B = Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 159.627</i></p>	Dinas Nakertran	Data jumlah tenaga kerja dari BPS
		3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{1455833000000}{159.627} = 9120217757.648$ <p><i>A = PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 1455833000000</i> <i>B = Jumlah tenaga kerja = 159.627</i></p>	Dinas Nakertran	Data jumlah tenaga kerja dari BPS Data PDRB dari BPS
		4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{51}{152} \times 100\% = 33.553\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 51</i> <i>B = Jumlah perusahaan = 152</i></p>	Dinas Nakertran	
		5) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{760}{1.259} \times 100\% = 60,37\%$ <p><i>A = Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan = 760</i> <i>B = Jumlah pencari yang terdaftar = 1.259</i></p>	Dinas Nakertran	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{Rp.12.931.891.962}{Rp.1.398.845.425.925} \times 100\%$ $= 0.924 \%$ <p><i>A = Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APB = Rp. 12.931.891.962</i> <i>B = Jumlah seluruh belanja operasional dan modal di APBD = Rp. 1.398.845.425.925</i></p>	Dinas P3AP2KB	
		2) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupatèn/Kota terkait	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupatèn/kota yang didampingi = 58</i> <i>B = Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupatèn/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 58</i></p>	Dinas P3AP2KB	
		3) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{13}{134.130} \times 100.000 = 9,69$ <p><i>A = Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 13</i> <i>B = Jumlah penduduk perempuan = 134.130</i></p>	Dinas P3AP2KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	PANGAN	1) Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{11,65}{92,65} \times 100\% = 12.574 \%$ <p><i>A = Jumlah cadangan pangan = 11,65 Ton</i> <i>B = Jumlah target cadangan pangan = 92,65 Ton</i></p>	Dinas Ketahanan Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	PERTANAHAN	1) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{3.568.400 \text{ m}^2}{3.568.400 \text{ m}^2} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi = 3.568.400 m²</i> <i>B = Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi = 3.568.400 m²</i></p>	Dinas PM PTSP	
		2) Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{166.640,53 \text{ m}^2}{166.640,53} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 166.640,53 m²</i> <i>B = Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 166.640,53</i></p>	Dinas Perkim	
		3) Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{3.568.400 \text{ m}^2}{3.568.400 \text{ m}^2} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi = 3.568.400 m²</i> <i>B = Luas izin lokasi yang diterbitkan = 3.568.400 m²</i></p>	Dinas PM PTSP	
		4) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{116}{119} \times 100\% = 97.479 \%$ <p><i>A = Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha = 116</i> <i>B = Jumlah penerima tanah obyek landreform = 119</i></p>	Dinas Perkim	Pada tahun 2021 tidak terdapat Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
		5) Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{A}{B} \times 100\% = -$	Dinas Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>A = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah =</i> <i>B = Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah =</i>		
		6) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{2}{2} \times 100\% = \mathbf{100\%}$ <i>A = Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 2</i> <i>B = Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 2</i>	Dinas Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). = 78,88	Dinas Lingkungan Hidup	
		2) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{26.128,52}{49.736,91} \times 100\% = 52,53 \%$ <i>A = Total volume sampah yang dapat ditangani = 26.128,52 Ton</i> <i>B = total volume timbunan sampah kabupaten/kota = 49.736,91 Ton</i>	Dinas Lingkungan Hidup	
		3) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{7}{28} \times 100\% = 25\%$ <i>A = Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota = 7</i> <i>B = usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 28</i>	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1) Perekaman KTP Elektronik	$\frac{190.817}{193.789} \times 100\% = 98,47\%$ <p><i>A = umlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 190.817</i> <i>B = Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 193.789</i></p>	Dinas Dukcapil	
		2) Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{64.648}{74.770} \times 100\% = 86,46\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 64.648</i> <i>B = Jumlah anak usia 0-17 tahun = 74.770</i></p>	Dinas Dukcapil	
		3) Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{94.337}{96.369} \times 100\% = 97,92\%$ <p><i>A = Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 94.337</i> <i>B = Jumlah anak usia 0-18 tahun = 96.369</i></p>	Dinas Dukcapil	
		4) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{22}{38} \times 100\% = 57,89\%$ <p><i>A = Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama = 22</i> <i>B = Jumlah OPD = 38</i></p>	Dinas Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun = 0</i> <i>B = Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 0</i></p>	Dinas PMD	Tidak ada Desa Tertinggal
		2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{12}{13} \times 100\% = 92,3\%$ <p><i>A = Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 12</i> <i>B = Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 13</i></p>	Dinas PMD	Pada akhir tahun 2022 terdapat satu desa dengan status berkembang yaitu Desa Sungai Cabang

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1) TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total = 2,28 ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur = bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu = pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama = i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) = K = Bilangan Konstanta biasanya 1000 =</p>	Dinas P3AP2KB	
		2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{26.649}{37.114} \times 100\% = 71.803 \%$ <p><i>A = Jumlah peserta KB aktif modern 26.649</i> <i>B = Jumlah Pasangan Usia Subur 37.114</i></p>	Dinas P3AP2KB	
		3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{8.039}{37.114} \times 100\% = 21.66 \%$ <p><i>A = Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 8.039</i> <i>B = Jumlah Pasangan Usia Subur 37.114</i></p>	Dinas P3AP2KB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	PERHUBUNGAN	1) Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota	<p>Rasio Konektivitas = 0,43</p> <p>Rasio konektivitas kabupaten/kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p>	Dinas Perhubungan	<p>Bobot IKK :</p> <p>$\geq 0,8$ = Sangat Tinggi</p> <p>0,6-0,79 = Tinggi</p> <p>0,30-0,59 = Sedang</p> <p>0,10-0,29= Rendah</p> <p>< 0,10 = Sangat Rendah</p>

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>		
		2) V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota = 0,402427	Dinas Perhubungan	Bobot IKK : 0,01-0,70 = Sangat Tinggi 0,71-0,80 = Tinggi 0,81-0,90 = Sedang 0,91-1 = Rendah $\geq 1,00$ = Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{37}{38} \times 100\% = 97,37\%$ <i>A = Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 37</i> <i>B = Jumlah OPD = 38</i>	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
		2) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$\frac{6}{10} \times 100\% = 60\%$ <i>A = Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 6</i> <i>B = Jumlah layanan publik = 10</i>	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
		3) Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{194.097}{276.197} \times 100\% = 70.275 \%$ <i>A = Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan peimerintah kabupaten/kota = 194.097</i> <i>B = Jumlah penduduk = 276.197</i>	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	Jumlah penduduk dari Dinas Dukcapil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{22}{237} \times 100\% = 9,28\%$ <p><i>A = Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 22</i> <i>B = Jumlah seluruh koperasi = 237</i></p>	Dinas Perindagkop UKM	
		2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{3345}{14.195} \times 100\% = 23,56\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 3345</i> <i>B = Jumlah usaha mikro keseluruhan = 14.195</i></p>	Data Dukung Ada (Kode Dokumen 17.K.b.1 dan 17.K.b.3)	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	PENANAMAN MODAL	1) Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = 240,74\%$ <p> <i>A = (Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 12.617.305.437.689 - 3.702.945.653.210</i> <i>B = Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten = 3.702.945.653.210</i> </p>	Dinas PM PTSP	Tahun 2022 PMDN 11.281.482.157.792 PMA 1.335.823.279.897 Tahun 2021 PMDN 1.731.922.379.802 PMA 1.971.023.273.408

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{1.165}{64.875} \times 100\% = 1.796 \%$ <p><i>A = (Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota = 1.165</i> <i>B = Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota 64.875</i></p>	Bidang Pembinaan Kepemudaan	
		2) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{4362}{64875} \times 100\% = 6.724 \%$ <p><i>A = (Jumlah pemuda (16–30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota =4362</i> <i>B = Jumlah pemuda (umur 16–30 tahun) di kabupaten/kota = 64875</i></p>	Bidang Pembinaan Kepemudaan	
		3) Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 9	Data dari Dispora Kab Kobar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	STATISTIK	1) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 38</i> <i>B = Jumlah OPD = 38</i></p>	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
		2) Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = (Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 38</i> <i>B = Jumlah OPD = 38</i></p>	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	PERSANDIAN	1) Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{325}{645} \times 100\% = 50,38\%$ <p><i>A = Jumlah nilai per area keamanan informasi = 325</i> <i>B = Jumlah area penilaian = 645</i></p>	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	KEBUDAYAAN	1) Terlestariannya Budaya Cagar	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 3</i> <i>B = Jumlah cagar budaya yang terdata = 3</i></p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23.	PERPUSTAKAAN	1) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<p>Nilai = 56,69</p> <p>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</p>	Laporan Survey Minat Baca 2022	
		2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks = 34,40</p>	Penghitungan IPLM oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022	
24.	KEARSIPAN	1) Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>T = (14,86%+100%+100%+100%) /4 = 78,71%</p> <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	Penghitungan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	<p>T = (5,26+100+100+100+0+0) /6 = 34,21%</p> <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip</p>	Penghitungan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	$\frac{30.185,80}{28.879,33} \times 100\% = 104,52 \%$ <p><i>A</i> = Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) = 30.185,80 <i>B</i> = Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 28.879,33</p>	Dinas Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	PARIWISATA	1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{19.529}{160} \times 100\% = 12.205 \%$ <p><i>A = Jumlah wisatawan tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021 = 19.689 - 160 = 19.529</i> <i>B = Jumlah wisatawan tahun 2021 = 160</i></p>	Dinas Pariwisata	
		2) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{36.611}{276.790} \times 100\% = 13,22 \%$ <p><i>A = Jumlah wisatawan tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021 = 313.581 - 276.790 = 36.611</i> <i>B = Jumlah wisatawan tahun 2021 = 276.790</i></p>	Dinas Pariwisata	
		3) Tingkat hunian akomodasi	$\frac{23.158}{80.344} \times 100\% = 28,82 \%$ <p><i>A = Jumlah kamar yang terjual = 23.158</i> <i>B = Jumlah kamar yang tersedia = 80.344</i></p>	Dinas Pariwisata	
		4) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	PDRB Sektor Pariwisata = Rp 166,86 PDRB Kabupaten = Rp 26.265,06	Dinas Pariwisata	Sumber data BPS (dalam milyar rupiah)
		5) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{A}{B} \times 100\% = 2.71 \%$ <p><i>A = PAD Sektor Pariwisata = Rp 6.327.864.277,50</i> <i>B = PAD Kabupaten = Rp 233.165.265.534,65</i></p>	Dinas Pariwisata	1. Retribusi Tempat Wisata : Rp. 829.231.000,00 2. Pajak Hotel : Rp. 1.945.458.674,10 3. Pajak Restoran : Rp. 3.553.174.603,40

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	PERTANIAN	1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{8,39}{1.337} \times 100\% = 0,62$ <p><i>A</i> = Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 8,39 Ton <i>B</i> = Luas panen = 1.337 Ha</p>	Dinas TPHP	
		2) Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{433-658}{658} \times 100\% = -34,19 \%$ <p><i>A</i> = Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya = 433-658 <i>B</i> = Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 658</p>	Dinas TPHP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	KEHUTANAN				Ada Proposal Rencana Tahura di Kab.Kotawaringin Barat

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1) Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jnmlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 1</i> <i>B = perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin</i> <i>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1</i></p>	Bag. Perekonomian Setda Adm	Surat pernyataan tidak terdapat perusahaan pemanfaatan panas bumi di Kab.Kobar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	PERDAGANGAN	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)	$\frac{83}{120} \times 100\% = 69.167\%$ <p><i>A = Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 83</i> <i>B = Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota = 120</i></p>	Dinas Perindagkop UKM	
		2) Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{6.346,08}{31.219,88} \times 100\% = 20,33\%$ <p><i>A = Realisasi = 6.346,08</i> <i>B = RDKK = 31.219,88</i></p>		
		3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{1419}{1419} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan = 1419</i> <i>B = Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota = 1419</i></p>		
30.	PERINDUSTRIAN	1) Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{101}{930} \times 100\% = 10,86\%$ <p><i>A = Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n (1.031) – jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 (930) = 101</i> <i>B = Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n-1 = 930</i></p>		
		2) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	<p>Nilai =%</p> <p>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah</p>	surat 31.K.0	keterangan Kobar Belum Memiliki Dokumen RPIK

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</p>		
		3) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 8</i> <i>B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 8</i></p>		
		4) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 1</i> <i>B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 1</i></p>	Dinas Perindagkop UKM	Tidak ada Izin Perluasan Usaha Industri
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 1</i> <i>B = Jumlah izin yang dikeluarkan = 1</i></p>	Dinas Perindagkop UKM	Laporan Hasil Pemantauan dan Pengawasan Kawasan Industri Surya Borneo tahun 2022
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>Nilai = 25+10+10+10+10=65%.</p> <p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas 		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>waktu 7-12 bulan (25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	TRANSMIGRASI				ada 1 kawasan yaitu Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB II CAPAIAN KINERJA

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENDIDIKAN	a. Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Link Data Dukung: https://s.id/1DloJ		
		1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah = 150		Data dukung terlampir
		2) Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 0 orang siswa	Surat keterangan terlampir	dari pemerintah daerah belum ada, yang ada hanya dari pemerintah pusat
		3) Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 1.016 orang siswa		Data dukung terlampir
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Jumlah = 24 orang		Data dukung terlampir
		5) Jumlah pendidik pada PAUD	Jumlah = 802 orang guru		Data dukung terlampir
		6) Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah = 42 orang guru		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Jumlah = 18 orang		Data dukung terlampir
		b. outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
		1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD = 207 Jumlah SMP = 76 Total 283 sekolah		Data dukung terlampir
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 774 orang siswa		Data dukung terlampir
		3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 420 orang siswa		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 6.433 orang siswa		Data dukung terlampir
		5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 2.190 orang siswa		Data dukung terlampir
		6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 1.779 orang guru		Data dukung terlampir
		7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 374 orang guru		Data dukung terlampir
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 2.075 orang guru		Data dukung terlampir
		9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 1.029 orang guru		Data dukung terlampir
		10) jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 197 orang		Data dukung terlampir
		11) jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 68 orang		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12) jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Jumlah = 147 orang		Data dukung terlampir
		13) jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Jumlah = 89 orang		Data dukung terlampir
		14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah = 779 orang guru		Data dukung terlampir
		15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah = 448 orang guru		Data dukung terlampir
		16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah = 176 orang		Data dukung terlampir
		17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	Jumlah = 54 orang		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah = 40 orang		Data dukung terlampir
		19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah = 28 orang		Data dukung terlampir
		d. outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		1) Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan = 6 unit		Data dukung terlampir
		2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah = 71 orang siswa	SK Bupati No 905/03.1/DPK.I/DIKBUD	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah = 735 orang siswa		Data dukung terlampir
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 109 orang guru		Data dukung terlampir
		5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Jumlah = 62 orang guru		Data dukung terlampir
		6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah = 42 orang guru		Data dukung terlampir
		7) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah = 176 orang		Data dukung terlampir
		8) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah = 6 orang		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	KESEHATAN	a. Outcome : Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Link Data Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1Pkb6gg-Vc9a7S6Htf9fQGkMwCef9vykB?usp=share_link		
		1) Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS = 3 unit		Data dukung terlampir
		b. Outcome : Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
		1) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS = 1 unit		Data dukung terlampir
		c. Outcome : Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Total = 322.631 1. Vaksin TT = 524 2. Tablet tambah darah = 309.046 3. Tes kehamilan = 4.463 4. Kartu Ibu/ rekam medis ibu = 4.217 5. Buku kesehatan ibu dan anak = 4.381		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Jumlah = 520 orang Dokter = 42 Bidan = 282 Perawat = 192		Data dukung terlampir
		d. Outcome : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 11.896 1. Formulir partograf = 3.674 2. Kartu Ibu / Rekam medis = 4.111 3. Buku KIA = 4.111 4. VIT A Ibu Nifas = 0		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah = 531 orang Dokter = 42 Bidan = 269 Perawat = 164		Data dukung terlampir
		e. Outcome : Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 23.340</p> <p>1. Vaksin Hepatitis B 0 = 4.082 2. Vitamin K 1 Injeksi = 3.726 3. Salep / tetes mata antibiotik = 3.455 4. Formulir bayi baru lahir = 3.973 5. Formulir MTBM = 4.158 6. Buku KIA = 3.946</p>		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah = 501 orang</p> <p>Dokter = 42 Bidan = 28 Perawat = 177</p>		Data dukung terlampir
		f. Outcome : Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 149.723</p> <p>1. KPSP instrument standar = 17.949 2. Formulir DDTK = 16.699 3. Buku KIA = 13.313 4. Vitamin A Biru 3.215 5. Vitamin A Merah = 25.965 6. Vaksin Dasar = 10.146 7. Vaksin Lanjut = 5.321 8. Jarum Suntik dan BHP = 56.703 9. Peralatan Anafilaktik = 412</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah = 1.705 orang</p> Dokter = 46 Bidan = 261 Perawat = 239 Ahli Gizi = 41 Guru Paud = 260 Kader Kesehatan = 858		Data dukung terlampir
		g. Outcome : Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 84.667</p> 1. Buku raport kesehatan = 15.056 2. Buku pemantauan kesehatan = 15.054 3. Kuesioner skrining kesehatan = 35.223 4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah = 11.010 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah = 8.324		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah = 1.771 orang</p> Dokter = 53 Bidan = 237 Perawat = 227 Ahli Gizi = 37 Tenaga Kesehatan Masyarakat = 38 Guru = 541 Kader kesehatan = 638		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		h. Outcome : Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 8.172</p> <p>1. Pedoman KIE =47 2. Alat Ukur Tinggi badan/ lingkar perut/ tensimeter/ Glukometer = 50 3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) = 8.075</p>		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah =745 orang</p> <p>Dokter = 33 Bidan = 168 Perawat = 163 Ahli Gizi = 30 Tenaga Kesehatan masyarakat = 33 Tenaga non kesehatan terlatih = 318</p>		Data dukung terlampir
		i. Outcome : Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 38.211</p> <p>1. Strip uji pemeriksaan gula darah = 12.663 2. Instrumen Geriatric Depression Scala = 13.634 3. Buku kesehatan Lansia = 11.914</p>		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah = 999 orang</p> <p>Dokter = 46 Bidan = 239 Perawat = 246 Ahli Gizi = 42 Tenaga Kesehatan masyarakat 36 Tenaga non kesehatan terlatih = 390</p>		Data dukung terlampir
		j. Outcome : Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 8.656</p> <p>1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE = 1.516 2. Tensimeter = 1.096 3. Formulir pencetakan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM = 6.044</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah 570 orang</p> <p>Dokter = 44 Bidan = 247 Perawat = 241 Tenaga Kesehatan Masyarakat = 38</p>		Data dukung terlampir
		k. Outcome : Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 9.016</p> <p>1. Glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet = 7.794 2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sisten Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) = 838 3. Pedoman dan media KIE = 384</p>		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah 557 Orang</p> <p>Dokter = 45 Bidan = 224 Perawat = 212 Ahli gizi = 41 Tenaga Kesehatan Masyarakat = 35</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		l. Outcome : Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 344</p> <p>1. Buku Pedoman Diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III) atau Buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru = 29 2. Kit berisi 2 alat Fiksasi = 18 3. Penyediaan Formulir pencatataan dan pelaporan = 258 4. Media KIE = 39</p>		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah = 251 orang</p> <p>Dokter = 39 Perawat = 212</p>		Data dukung terlampir (data dukung salah jumlahnya harap diperbaiki)
		m. Outcome : Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah = 10.142		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) = 1.121 2. Reagen Zn TB = 507 3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 = 3.437 4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol lampu Spritus/ Bunsen, Ose. Lidi, Rak pengering) = 2.199 5. Catridge tes cepat molekuler = 462 6. Formulir pencatatan pelaporan = 2.005 7. Pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) = 411 		
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah =325 orang</p> <p>Dokter = 37 Perawat = 191 Analis teknik laboratorium medik (ATLM) = 41 Penata rontgen = 9 Tenaga kesehatan masyarakat = 36 Tenaga non kesehatan terlatih = 11</p>		Data dukung terlampir
		n. Outcome : Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<p style="text-align: center;">Jumlah = 17.888</p> <p>1. Media KIE (Lembar balik, Leaflet, Poster, Banner) = 1.738 2. Tes cepat HIV (RDT) pertama = 3.717 3. Bahan habis pakai (Handsnoen, alcohol swab, plester, lancet/ jarum steril, jarum spuit yang sesuai/ vacutainer dan jarum sesuai = 6.628 4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK = 5.805</p>		Data dukung terlampir
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<p style="text-align: center;">Jumlah = 527 orang</p> <p>Dokter = 40 Bidan = 178 Perawat = 228 Analis teknik laboratorium medik (ATLM) = 41 Tenaga kesehatan masyarakat = 35 Tenaga non kesehatan terlatih = 5</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	PEKERJAAN UMUM	a. Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Link Data Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1BDB6m0F7-6TMr6EVhkNqAlwqivst7D5K?usp=share_link		
		1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah (WS) kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan = 3.180, 29 hektar		Data dukung tersedia
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang = 307.200 meter		Data dukung tersedia
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan = 333 hektar		Data dukung tersedia
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang = 33.300 meter		Data dukung tersedia

BAB II CAPAIAN KINERJA

	5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Belum pernah disusun oleh PUPR	Surat keterangan terlampir
	6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	Belum pernah disusun oleh PUPR	Surat keterangan terlampir
	7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	Jumlah = 15.947,60 m 1) Bangunan perkuatan tebing = 148 m 2) Tanggul sungai = ... m 3) Kanal bajir = ... m 4) Pintu air/bendung pengendali banjir = ... unit 5) Pompa banjir Unit Kapasitas 6) Polder/Kolam Retensi = ...Unit 7) Breakwater = 15.799,60 m 8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya = ... m	1) Data Aset Bronjong tahun 2017 dan 2018	Surat keterangan terlampir
	c. Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
	1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{127.233}{199.513} \times 100\% = 63,77\%$ <i>A</i> = Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik = 127.233 meter <i>B</i> = Panjang jaringan irigasi primer = 199.513 meter	Data jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	

BAB II CAPAIAN KINERJA

	2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{365.486}{568.201} \times 100\% = 64,32\%$ <p>A = Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik = 365.486 meter B = Panjang jaringan irigasi sekunder = 568.201 meter</p>	Data jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	
	3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p>A = Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik = 0 meter B = Panjang jaringan irigasi tersier = 0 meter</p>	Surat keterangan terlampir	
	d. Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			
	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Foto Laporan Rispam	
	2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak Ada	Surat Keterangan terlampir	
	3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Jumlah BUMD = 1 Jumlah UPTD =	Foto kantor PDAM	
	4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah = 0 izin	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

	5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	Jumlah Perjanjian Kerjasama komulatif yang masih berlaku sampai dengan tahun 2020 = tidak ada	Surat keterangan terlampir	
	e. Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
	1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Jumlah = 59.132 KK		Data dukung terlampir
	2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah = 930 KK		Data dukung terlampir
	3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah yg terakses unit pengolahan setempat = 60.062 unit Jumlah rumah yang terakses sambungan rumah untuk layanan SPALD-S dan SPALD-T =unit		data dukung tersedia belum bercap
	4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah = 689		data dukung tersedia

BAB II CAPAIAN KINERJA

	5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah = 689 unit		data dukung tersedia
	6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah = 689 unit		Data dukung tersedia
	7) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{62.373 - 831}{65.947 - (1.150 + 14.848)} \times 100\%$ $= 123,2\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik = 62.373 - 831 unit</i> <i>B = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha = 65.947 - (1.150 + 14.848) unit</i></p>		Data dukung tersedia
	8) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{689}{14.848} \times 100\% = 4,64\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT = 689 unit</i> <i>B = rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha = 14.848 unit</i></p>		Data dukung tersedia
	9) Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{930}{1.150} \times 100\% = 80,87\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 930 unit</i> <i>B = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T = 1.150 unit</i></p>		Data dukung tersedia

BAB II CAPAIAN KINERJA

	10) Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{38.772+856+17.920+1.584+2.348}{65.947+1.150} \times 100\% = 91,63\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat = 38.772+856+17.920+1.584+2.348 unit</i> <i>B = jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S = 65.947+1.150 unit</i></p>	Data dukung tersedia
	11) Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$ <p><i>A = jumlah sarana pengangkutan yang tersedia = 1 unit</i> <i>B = jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota = 2 unit</i></p>	Data dukung tersedia
	12) Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{28}{18} \times 100\% = 155,56\%$ <p><i>A = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia = 28 m3/hari</i> <i>B = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota = 18 m3/hari</i></p>	Data dukung tersedia
	13) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{930}{1.150} \times 100\% = 80,87\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD = 930 unit</i> <i>B = jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota = 1.150 unit</i></p>	Data dukung tersedia
	14) Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{689}{65.947-1.150} \times 100\% = 1,44\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot = 689 unit</i> <i>B = jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S = 65.947-1.150 unit</i></p>	Data dukung tersedia

BAB II CAPAIAN KINERJA

		f. Outcome : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota			
		1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{6}{425} = 0,014$ <p><i>A = Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku = 6 unit</i> <i>B = Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) = 425 unit</i></p>		
		2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Jumlah IMB terbit tahun 2022 = 128+282=410 izin		Data dukung belum berttd dan cap
		3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	<p style="text-align: center;">Ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi persetujuan bangunan gedung 2. Perda No. 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bangunan gedung 		
		4) Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/tidak		Surat keterangan terlampir
		5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah gedung = 0 unit		Surat keterangan terlampir
		6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Jumlah gedung = 0 unit		Surat keterangan terlampir
		7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab	Jumlah gedung = 2 unit	Data bangunan gedung negara milik Pemkab	

BAB II CAPAIAN KINERJA

		8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/dirawat	Jumlah gedung = 0 unit		Surat keterangan terlampir
		g. Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota			
		1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab	Panjang = 1.222,845 kilometer	Keputusan Bupati Kobar Nomor 600/872/PUD tentang Penetapan Status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten	Data dukung tersedia
		2) Panjang jalan yang dibangun	Panjang = 1,49 kilometer	Rekap Pembangunan Jalan	Data dukung tersedia
		3) Panjang jembatan yg dibangun	Panjang = 62,53 meter	Rekap Pembangunan Jembatan	Data dukung tersedia
		4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang = 15,07 kilometer	Rekap rekonstruksi jalan	Data dukung tersedia
		5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang = 62,53 meter	Rekap pembangunan jembatan	Data dukung tersedia
		6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang = 1,49 kilometer	Rekap pekerjaan Bidang Bina Marga TA. 2022	Data dukung tersedia
		7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang = 89,50 meter	Rekap rehabilitasi jembatan	Data dukung tersedia
		8) Panjang jalan yang dipelihara	Panjang = 121,810 kilometer	Rekap pekerjaan Bidang Bina Marga TA. 2022	Data dukung tersedia

BAB II CAPAIAN KINERJA

	9) Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang = 187 meter	Data panjang jembatan yang dipelihara	Data dukung tersedia
	h. Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
	1) Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 2 kegiatan	Laporan Kegiatan pelatihan	
	2) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 128 orang	Daftar Peserta Pelatihan/Uji Sertifikasi	
	3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 119 orang	Daftar peserta pelatihan/uji sertifikasi	
	4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/ tidak 1 Aplikasi	Data dukung terlampir	
	5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada/ tidak 864 paket	Data dukung terlampir	
	6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/ tidak 9 paket	Data dukung terlampir	Pada data dukung sumber dananya APBD-P

BAB II CAPAIAN KINERJA

		7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/tidak 9 paket	Data dukung terlampir	
		8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/tidak	Data dukung terlampir	
		9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada/tidak	Data dukung terlampir	
		10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/tidak	Surat keterangan terlampir	
		11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di	Ada/tidak 119 Peserta	Data dukung terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

		wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			
		12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada 738 orang	Data dukung terlampir	
		13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada 12 Asosiasi	Data dukung terlampir	
		14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Data dukung terlampir	
		15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Surat keterangan terlampir	Dalam proses PPBJ di LPSE telah menyesuaikan klasifikasi dan kualifikasi
		16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Data dukung terlampir	
		17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat,	Tidak Ada	Surat keterangan terlampir	Dalam proses PPBJ di LPSE telah menyesuaikan

BAB II CAPAIAN KINERJA

		klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			klasifikasi dan kualifikasi
		18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Jumlah unit usaha = 0	Surat keterangan terlampir	Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)
		19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Jumlah unit usaha = 0	Surat keterangan terlampir	Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)
		20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Jumlah unit usaha = 0	Surat keterangan terlampir	Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)
		21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah unit usaha = 151 Badan usaha	Data dukung terlampir	
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah = 0 izin	Surat keterangan terlampir	Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah = 0 kasus	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah = 1 kasus	Data dukung terlampir	
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah = 0 kasus	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PERUMAHAN RAKYAT	a. Outcome : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Link data dukung: https://s.id/1DkJd		
		1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah = 3.067 unit		Data dukung terlampir
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah = 0 unit	Surat keterangan terlampir	tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT = 0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban = 0 jiwa	Surat keterangan terlampir	tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan
		4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah = 0 unit	Surat keterangan terlampir	tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan
		5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah = 0 unit	Surat keterangan terlampir	tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan
		6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah rumah = 0 unit	Surat keterangan terlampir	tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan
		7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah rumah = 0 unit Jumlah lokasi = 0	Surat keterangan terlampir	tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT = 0 Jumlah KK = 0 Jumlah korban = 0 jiwa	Surat keterangan terlampir	tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan
		9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah luasan = 9 hektar Jumlah lokasi = 3 lokasi		Data dukung terlampir
		b. Outcome : Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
		1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	Surat keterangan terlampir	
		2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	Surat keterangan terlampir	
		4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	Surat keterangan terlampir	
		5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah = 0 Rumah Tangga	Surat keterangan terlampir	
		6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah = 9 hektar		Data dukung terlampir
		c. Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani			
		1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah = 19,015 hektar		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit RTLH = 9 unit		Data dukung terlampir
		3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah = 4,806 hektar		Data dukung terlampir
		d. Outcome : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		1) Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah = 66.248 unit		Data dukung terlampir
		2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah = 59+30+1+42 = 132 unit		Data dukung terlampir
		3) Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah = 2.174 unit		Data dukung terlampir
		4) Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah = 0 unit	Surat keterangan terlampir	Tidak dilakukan pendataan untuk RTLH yang dihuni
		5) Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK } 88.685}{\text{Jumlah Total unit rumah } = 66.248} = 1,34$		Data dukung terlampir
		6) Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah = 11+129+1+300 = 441 unit		Data dukung terlampir
		e. Outcome : Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah = 70 perumahan		Data dukung terlampir
		2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah = (7.597-91)+61.832 = 69.338 unit		Data dukung terlampir
		3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah = 7.597-91 = 7.506 unit		Data dukung terlampir
		4) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Jumlah = (7.597-91) + 62.373 = 69.879 unit		Data dukung terlampir
		5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah = 65 perumahan		Data dukung terlampir
		6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah = 12+40+14+40+20 = 126 unit		Data dukung terlampir
		7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	proses sertifikasi pengembang tidak dapat dilakukan karena belum adanya tim verifikasi pengembang
		8) Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah = 29		Data dukung terlampir
		9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah = 13		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	a. Outcome : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Link data dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1mFS-T83vsXMFI80kNNdz_G6Tu8Cl1qQT?usp=share_link		
		1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Jumlah = 76 kasus		Data dukung terlampir
		2) Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah = 1.422 orang		Data dukung terlampir
		3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda Kabupaten = 15 Jumlah Perbup = 0 1. Perda No.13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol 2. Perda No.16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 3. Perda No 2 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah 4. Perda No 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas perda No 24 Tahun 2010 tentang Izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet/sriti 5. Perda no 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame 6. Perda no 15 tahun 2018 tentang pajak sarang burung walet 7. Perda no 18 tahun 2018 tentang pajak reklame 8. Perda no 20 tahun 2018 tentang pajak hotel 9. Perda no 21 tahun 2018 tentang pajak restoran 10. Perda no 22 tahun 2018 tentang pajak hiburan 11. Pajak no 23 tahun 2018 tentang pajak air tanah 12. Perda no 24 tahun 2018 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan 13. Perda No. 29 Tahun 2018 tentang Pengaturan alat		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pemadam kebakaran 14. Perda No. 14 Tahun 2021 tentang penegakan protokol kesehatan dan penanganan corona virus disease 2019 15. Perda no 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan bangunan gedung		
		4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah = 7 orang	Daftar nama yang memiliki syarat menjadi PPNS	Data dukung terlampir
		5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada 8 SOP		Data dukung terlampir
		6) Tersedianya sarana prasarana minimal	Jumlah = 1.691	Data aset Tahun 2022	Data dukung terlampir
		b. Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen kajian</i> <i>B = Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen kajian</i></p>	Kajian risiko bencana Kab. Kobar Tahun 2019-2023	Data dukung terlampir
		2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{3.614}{99.679} \times 100\% = 3,63\%$ <p><i>A = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 99.679 jiwa</i> <i>B = Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 99.679 jiwa</i></p>		Data dukung terlampir
		c. Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		1) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen rencana</i> <i>B = Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen rencana</i></p>	Rencana penanggulangan bencana Kab. Kobar Tahun 2019-2023	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 0 dokumen</i> <i>B = Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan= 0 dokumen</i>		Data dukung belum tersedia
		3) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{523}{99.679} \times 100\% = 0,52\%$ <i>A = Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan = 523 orang</i> <i>B = Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana= 99.679 orang</i>	Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pelatihan kebencanaan kab. Kobar	Data dukung terlampir
		4) Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{114}{99.679} \times 100\% = 0,11\%$ <i>A = Jumlah warga negara yang ikut pelatihan = 114 orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana= 99.679 orang</i>	Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pelatihan aparatur	Data dukung belum berkop OPD
		5) Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{9.085}{99.679} \times 100\% = 9,11\%$ <i>A = Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops = 9.085 orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana= 99.679 orang</i>	Laporan Pusdalops-PB BPBD Tahun 2022	Data dukung belum berkop OPD
		6) Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{A}{99.679} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan = ... orang</i> <i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana= 99.679 orang</i>		Data dukung pembilang belum tersedia

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		d. Outcome : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		1) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB = ...</i> <i>B = Jumlah seluruh penetapan status KLB = ...</i>		Data dukung belum tersedia
		2) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana = 60</i> <i>B = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana = 60</i>	Rekap laporan kejadian bencana BPBD Kab. Kobar Tahun 2022	Data dukung belum berkop, ttd kepala dinas dan cap OPD
		3) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <i>A = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana = orang</i> <i>B = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana = orang</i>		Data dukung belum tersedia
		4) Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{9.031}{9.031} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi = 9.031 orang</i> <i>B = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana = 9.031 orang</i>	Laporan Pelayanan Penyelamatan, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Akibat Bencana, BPBD Kab. Kobar Th 2022	Data dukung belum berkop OPD

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		e. Outcome : Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan = 228 Kejadian • Jumlah Jenis layanan = 5 Jenis 		Data dukung terlampir
		2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 2 Unit		Data dukung terlampir
		3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada / Tidak	Surat keterangan terlampir	Isian ikk dan Data dukung belum tersedia
		4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Jumlah Pos Damkar = 3 unit		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	20 Jenis 174 Unit	Data sarpras damkar	Data dukung terlampir
		6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Damkar = 14 orang	Daftar personel damkar yang mengikuti diklat	Data dukung terlampir
		7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan = 27+16+33=76 orang	SK Bupati Kobar tentang Pembentukan Balakar Kobar nomor 331.1/360/SKEP-BUP/SATPOLPP-DAMKAR.VI/2021	Data dukung terlampir
		8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah kegiatan = 1		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	SOSIAL	a. Outcome : Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Link data dukung: https://s.id/1Bnns		
		1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data = 1.888 Pelayanan		Data dukung terlampir
		2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah = 0 • Jumlah data Penyandang disabilitas terlantar = 0 • Jumlah data anak terlantar = 0 • Jumlah data lanjut usia terlantar = 0 • Jumlah data gepeng terlantar = 0	Surat Keterangan terlampir	Tidak tersaji jumlah data dan memerlukan waktu yang lama dan verifikasi satu persatu
		3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah TRC = 1	Keputusan Kadis Sosial No. 21/KEP.KA/DINSOS /2022	Data dukung terlampir
		4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah = 62 orang • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 9+2+7+2=20 • Jumlah anak terlantar = 5+5=10		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lanjut usia terlantar = $19+7+1+3+2=32$ • Jumlah gepeng = ... 		
		5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan = 1 unit	Bidang rehabilitasi sosial	Data dukung terlampir
		6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	<p style="text-align: center;">Jumlah = 430</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 30 • Jumlah anak terlantar = 0 • Jumlah lanjut usia terlantar = 400 • Jumlah gepeng = 0 		Data dukung terlampir
		7) Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah = 1 unit	Bidang linjamsos	Data dukung terlampir
		8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = • Jumlah anak terlantar = ... • Jumlah lanjut usia terlantar = ... • Jumlah gepeng = 	Surat keterangan terlampir	
		9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<p style="text-align: center;">Jumlah =</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 7 • Jumlah anak terlantar = 0 • Jumlah lanjut usia terlantar = 7 • Jumlah gepeng = 0 		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	Jumlah alat bantu =bh	Surat keterangan terlampir	
		11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Jumlah = paket	Surat keterangan terlampir	
		12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = • Jumlah anak terlantar = ... • Jumlah lanjut usia terlantar = ... • Jumlah gepeng = 	Surat keterangan terlampir	
		13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah = orang	Surat keterangan terlampir	
		14) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah = 97 orang		Data dukung terlampir
		15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	<p style="text-align: center;">Jumlah = 0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 0 • Jumlah anak terlantar = 0 • Jumlah lanjut usia terlantar = 0 • Jumlah gepeng = 0 	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah = 0 kegiatan	Surat keterangan terlampir	
		17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah = 8 orang <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = • Jumlah anak terlantar = 5 • Jumlah lanjut usia terlantar = 3 • Jumlah gepeng = 		Data dukung terlampir
		18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah = 0 <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = ... • Jumlah anak terlantar = ... • Jumlah lanjut usia terlantar = ... • Jumlah gepeng = 	Surat keterangan terlampir	
		19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jumlah = 1 <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 0 • Jumlah anak terlantar = 1 • Jumlah lanjut usia terlantar = 0 • Jumlah gepeng = 0 		Data dukung terlampir
		20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah = 1 <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 0 • Jumlah anak terlantar = 1 • Jumlah lanjut usia terlantar = 0 • Jumlah gepeng = 0 		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<p style="text-align: center;">Jumlah = 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 2 • Jumlah anak terlantar = 3 • Jumlah lanjut usia terlantar = 2 • Jumlah gepeng = 0 		Data dukung terlampir
		b. Outcome : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
		1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Jumlah = (700 kk) orang		Data dukung terlampir
		2) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah = 0 orang	Surat Keterangan Terlampir	
		3) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah = 5 buah	Bidang linjamsos	Data dukung terlampir
		4) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah = 15 paket		Data dukung terlampir
		5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada / Tidak	Surat keterangan terlampir	Dilaksanakan oleh Tim Taruna Siaga Bencana namun tidak didata dan dokumentasikan

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah = 97 orang		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	TENAGA KERJA	a. Outcome : Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Link data dukung: https://s.id/1DzqY		
		1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada / Tidak Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Rencana Tenaga Kerja Kab.Kobar Tahun 2017-2021	Data dukung terlampir
		2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Persentase Akurasi = Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100, $\frac{6-6}{6} \times 100\% = 100\%$ A = Target indikator ketenagakerjaan = 3 B = Realisasi indikator ketenagakerjaan = 3 Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6	IKU Dinas Nakertrans Tahun 2017-2022	Data dukung terlampir
		3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah = 0 Perusahaan	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Outcome : Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKN1 atau okupasi pada tahun 2022 = 1</i> <i>B = keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2022 = 1</i></p>	Surat keterangan terlampir	
		2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{26}{80} \times 100\% = 32,5\%$ <p><i>A = Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2022 = 26</i> <i>B = jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2022 = 80</i></p>	Laporan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	Data dukung terlampir
		3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{80}{1.045} = 0,077$ <p><i>A = Jumlah instruktur pada tahun 2022 = 80</i> <i>B = jumlah peserta pexlatihan pada tahun 2022 = 1.045</i></p>	Laporan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	Data dukung terlampir
		4) Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$ <p><i>A = Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2022 = 4</i> <i>B = jumlah seluruh LPK pada tahun 2022 = 8</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$ <i>A = jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2022 = 8</i> <i>B = jumlah LPK yang terdata pada tahun 2022 = 8</i>		Data dukung terlampir
		6) Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah = 16 orang	Data peserta pelatihan	Data dukung terlampir
		7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$ <i>A = jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2022 = 16</i> <i>B = jumlah orang yang dilatih pada tahun 2022 = 16</i>	Data peserta yang mendapat sertifikat pelatihan	Data dukung terlampir
		8) Persentase penyerapan lulusan	$\frac{96}{160} \times 100\% = 60\%$ <i>A = jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2022 = 96 orang</i> <i>B = jumlah lulusan pada tahun 2022 = 160 orang</i>		Data dukung terlampir
		9) Lulusan kompetensi bersertifikat	$\frac{176}{176} \times 100\% = 100\%$ <i>A = jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun = 176 orang</i> <i>B = jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun = 176 orang</i>		Data dukung terlampir
		10) Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = jumlah CPMI dilatih = 0 orang</i> <i>B = jumlah CPMI terdaftar = 0 orang</i>	Surat keterangan terlampir	tidak ada Data

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) Migran	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	tidak ada Data
		c. Outcome : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020 = 0</i> <i>B = jumlah perusahaan pada tahun 2020 = 0</i></p>	Surat keterangan terlampir	tidak ada Data
		2) Data tingkat produktivitas total	$A - (B + C) = 0\%$ <p><i>A = Pertumbuhan Ekonomi =</i> <i>B = Pertumbuhan Modal =</i> <i>C = Pertumbuhan Tenaga Kerja</i></p>	Surat keterangan terlampir	tidak ada Data
		d. Outcome : Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{60}{152} \times 100\% = 39,47\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020 = 60</i> <i>B = Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih = 152</i></p>	Rekapitulasi PP Perusahaan se-Kobar	Data dukung terlampir
		2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{16}{32} \times 100\% = 50\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 = 16</i> <i>B = Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh = 32</i></p>	Rekapitulasi PKB perusahaan se kobar	Data dukung terlampir
		3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	<p style="text-align: center;">Jumlah = 15.104</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Konfederasi SP/SB = 1 Jumlah Federasi SP/SB = 3 Jumlah SP/SB = 29 Jumlah SP/SB di luar perusahaan = - Jumlah Anggota SP/PB di Perusahaan = 15.071 orang</p>	Daftar rekapitulasi keanggotaan federasi SP/SB Kabupaten Kotawaringin barat 2022	Data dukung terlampir
		4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{87}{76} \times 100\% = 114,47\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah = 80</i> <i>B = jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB) = 76</i></p>	Data dukung terlampir	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{809}{881} \times 100\% = 91,83\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan = 809</i> <i>B = jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor = 881</i></p>	Data badan usaha yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kobar	Data dukung terlampir
		6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{7}{152} \times 100\% = 4,61\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang berselisih = 7</i> <i>B = Jumlah perusahaan pada tahun 2022 = 152</i></p>	Register perselisihan hubungan industrial tahun 2022	Data dukung terlampir
		7) Jumlah mogok kerja	Jumlah = 1 kasus mogok kerja	Surat keterangan terlampir	
		8) Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah = 0 kasus	Surat keterangan terlampir	
		9) Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah = 0 kasus	Surat keterangan terlampir	tidak ada Data
		10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah = 0 kasus	Surat keterangan terlampir	Tidak ada data
		11) Jumlah perselisihan PHK	Jumlah = 5 kasus	Data perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja tahun 2022	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah = 27 orang	Data perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja tahun 2022	Data dukung terlampir
		13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah = 3 kasus	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit tahun 2022	Data dukung terlampir
		14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	surat keterangan terlampir	
		15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57$ <i>A = Jumlah Perjanjian Bersama = 2</i> <i>B = Jumlah kasus perselisihan = 7</i>	Register perselisihan hubungan industrial tahun 2022	Data dukung terlampir
		e. Outcome : Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah = 760		Data dukung terlampir
		2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah = 1.259 orang		Data dukung terlampir
		3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Jumlah = 6	Surat keterangan terlampir	
		4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Jumlah = 0 orang	Surat keterangan terlampir	
		5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah = 1 orang	Surat keterangan terlampir	
		6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah = 4	Surat keterangan terlampir	
		7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah = 1		Data dukung terlampir
		8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	
		9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi =</i> <i>B = Jumlah CPMI/CTKI =</i></p>	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	
		11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan = B = Jumlah PMI yang pulang =</i>	Surat keterangan terlampir	
		12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja = B = Jumlah PMI/TKI =</i>	Surat keterangan terlampir	
		13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan = B = Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya =</i>	Surat keterangan terlampir	
		14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah LTSA yang terbentuk = 0 B = Jumlah daerah kantong PMI/TKI = 0</i>	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	a. Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Link data dukung: https://s.id/1BnrU		
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah = 38 SKPD		Data dukung terlampir
		2) Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah = (32 OPD) kegiatan	Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan PPRG Tahun 2022	Data dukung terlampir
		b. Outcome : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota			
		1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah = 1 media 1. SBTV		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah = 2 1. UNIT PPA Polres Kobar 2. UPTD PPA DP3AP2KB		Data dukung terlampir
		3) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$ <i>A = jumlah korban kekerasan anak yang dilayani = 58</i> <i>B = jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten = 58</i>	Rekap kasus anak berdasarkan jenis kasus ub. Januari-Desember 2022	Data dukung terlampir
		4) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah = 1	Aktivis/Relawan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Kel. Candi	Data dukung terlampir
		5) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Jumlah = 1		Data dukung terlampir
		c. Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah = 28	Daftar organisasi wanita kabupaten kotawaringin barat tahun 2022	Data dukung terlampir
		2) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah = 0 Orang	Surat keterangan terlampir	
		3) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	
		4) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah = 3	Daftar penerima dan besaran hibah berupa uang kepada organisasi wanita kab. Kobar tahun 2022	Data dukung terlampir
		5) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah = 1	SK Bupati Kotawaringin Barat NO.402/29/DP3AP2KB.5/VII/2020 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kab. Kotawaringin Barat.	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Jumlah = 2 1. Unit PPA Polres Kobar 2. UPTD PPA DP3AP3KB		Data dukung terlampir
		7) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$ <i>A = jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan = 13</i> <i>B = jumlah korban kekerasan terhadap perempuan = 13</i>	Rekap kasus perempuan berdasarkan jenis kasus ub. Januari-Desember 2022	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	PANGAN	a. Outcome : Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Link data dukung: https://s.id/1Dhg5		
		1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya Jumlah = 2		Data dukung terlampir
		2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Laporan pasar pangan murah Tahun 2022	Data dukung terlampir
		3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada regulasi harga minimum daerah	Surat keterangan terlampir	
		4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat Jumlah = 3		Data dukung terlampir
		5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada peta ketahanan dan kerentanan pangan		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada daerah rentan rawan pangan tahun 2022 di Kotawaringin Barat		Data dukung terlampir
		7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		Tahun 2022 penyaluran pangan karena keadaan darurat bajir
		8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada kegiatan pengawasan keamanan pangan segar		

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	PERTANAHAN	a. Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Link data dukung: https://s.id/1EeOs		
		1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) =</i> <i>B = Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun =</i></p>	Surat keterangan terlampir	
		2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber daritanah kelebihan maksimum absentee = 1</i> <i>B = Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform = 1</i></p>		Data dukung terlampir
		3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah luas tanah yang telah dibayarkanganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee =</i> <i>B = Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek =</i></p>	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{32}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak = 32</i> <i>B = Jumlah dokumen izin membukatanah yang dimohon dalam 1 tahun =</i></p>		Data dukung belum tersedia
		5) Dokumen Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik =</i> <i>B = Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun =</i></p>	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	LINGKUNGAN HIDUP	a. Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Link data dukung: https://s.id/1BnsJ		
		Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	a. IKA = 70,00 b. IKU = 93,14844 c. ITH = 67,72	Laporan IKA, IKU, ITH	Data dukung terlampir
		b. Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota			
		1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Ada / Tidak Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Ada / Tidak Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Ada / Tidak Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
		1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota = 8</i> <i>B = jumlah usulan permohonan yang teregistrasi = 8</i></p>		Data dukung terlampir
		2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah PPLHD yang ada = 0</i> <i>B = jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota = 0</i></p>	Surat Pernyataan terlampir	
		3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jmlh MHA yg diakui dgn perda = 0</i> <i>B = jmlh usulan MHA = 0</i></p>	Surat Pernyataan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan = 0</i> <i>B = jmlh MHA yg ada = 0</i>	Surat Pernyataan terlampir	
		5) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$ <i>A = Pengaduan masyarakat yang ditangani = 5</i> <i>B = Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi = 5</i>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	a. Outcome : Perekaman KTP Elektronik	Link data dukung: https://s.id/1BntZ		
		1) Penerbitan akta perkawinan	$\frac{226}{226} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan = 226</i> <i>B = Peristiwa perkawinan yang dilaporkan = 226</i>	Laporan jumlah penerbitan akte perkawinan di Disdukcapil Kobar tahun 2022	Data dukung terlampir
		2) Penerbitan akta perceraian	$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah akta perceraian yang diterbitkan = 23</i> <i>B = Peristiwa perceraian yang dilaporkan = 23</i>	Laporan jumlah penerbitan akte perceraian di Disdukcapil Kobar Tahun 2022	Data dukung terlampir
		3) Penerbitan akta kematian	$\frac{1.536}{1.536} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah akta kematian yang diterbitkan = 1.536</i> <i>B = Peristiwa kematian yang dilaporkan = 1.536</i>	Laporan jumlah penerbitan akte kematian di Disdukcapil Kobar Tahun 2022	Data dukung terlampir
		4) Penyajian data kependudukan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupatenkota dalam satu tahun = 2 kali</i> <i>B = 2 kali setahun</i>	Laporan data penyampaian data kependudukan tahun 2022	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	a. Outcome : Persentase pengentasan desa tertinggal	Link data dukung: https://s.id/1Bnv0		
		1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah = 81 desa		Data dukung terlampir
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	81 – 81 = 0 A = Jumlah Desa yang melakukan kerja sama antar desa pada tahun 2022 = 81 B = jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun 2021 = 81		Data dukung terlampir
		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah = 164 Lembaga Masyarakat Jumlah = 0 Lembaga Adat		Data dukung terlampir
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	21– 21 = 0 A = Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun 2022 = 21 B = jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun 2021 = 21		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	a. Outcome : TFR (Angka Kelahiran Total)	Link data dukung: https://s.id/1BzIH		
		1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	Surat keterangan terlampir	
		2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	MUKP = 0	Surat keterangan terlampir	Perhitungan bukan kewenangan Kabupaten
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR = 44,9 $ASFR = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	Surat pernyataan TFR dan ASFR 15-19 Tahun Kab. Kobar Tahun 2022	Data dukung terlampir
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{18.096}{56.596} \times 100\% = 31,97\%$ A = jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) = 18.096 B = jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) = 56.596	Jumlah pus berdasarkan peserta KB aktif	Data dukung terlampir
		5) Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	Belum melakukan perhitungan

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		1) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP = 0</i> <i>B = Jumlah faskes = 0</i>	Surat keterangan terlampir	Belum melakukan perhitungan
		2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{26.771}{37.114} \times 100\% = 72,13 \%$ <i>A = Jumlah Peserta KB Aktif = 26.771</i> <i>B = Jumlah PUS = 37.114</i>	Jumlah peserta KB Aktif Tahun 2022 dan Jumlah PUS Tahun 2022	data dukung terlampir
		3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah = 0 KKBPK	Surat keterangan terlampir	Belum ada KKBPK
		4) Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{0}{0} \times 100\% = 19,52\%$ <i>A = jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern = 0</i> <i>B = jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan = 0</i>	Surat keterangan terlampir	Belum melakukan perhitungan

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah =0</i> <i>B = jumlah seluruh kabupaten/kota =0</i></p>	Surat keterangan terlampir	Belum melakukan perhitungan
		2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI =0</i> <i>B = jumlah Keluarga PBI =0</i></p>	Surat keterangan terlampir	Belum melakukan perhitungan

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	PERHUBUNGAN	a. Outcome : Rasio konektivitas Kabupaten/kota	Link data dukung: https://s.id/1Bnwq		
		1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	$\frac{5}{6} \times 100\% = 83,33\%$ <p><i>A = Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia = 5</i> <i>B = Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan = 6</i></p>	Data fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan	Data dukung terlampir
		2) Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{4.941}{11.616} \times 100\% = 42,53\%$ <p><i>A = Jumlah kendaraan yang diuji per tahun = 4.941</i> <i>B = Jumlah kendaraan wajib uji = 11.616</i></p>		Data dukung terlampir
		3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$ <p><i>A = Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan = 1</i> <i>B = Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota = 3</i></p>		Data dukung terlampir
		4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{7}{22} \times 100\% = 31\%$ <p><i>A = Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota = 7</i> <i>B = Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota = 22</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	a. Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Link data dukung: https://s.id/1Bnxq		
		1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{37}{38} \times 100\% = 97,37\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 37</i> <i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 38</i></p>		Data dukung terlampir
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{37}{38} \times 100\% = 97,37\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo = 37</i> <i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 38</i></p>		RSUD menggunakan fasilitas internet tersendiri
		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	<p style="text-align: center;">Ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email Instansi/PNS 2. Manajemen router internet astinet 3. HT Frekwensi 4. CCTV ada 8 Titik 		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Outcome : Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi			
		1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 = 52</i></p> <p><i>B = Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah = 52</i></p>		Data dukung terlampir
		2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{24}{38} \times 100\% = 63,16\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar = 24</i></p> <p><i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 38</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 38</i> <i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 38</i></p>		Data dukung terlampir
		4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{4}{13} \times 100\% = 30,77\%$ <p><i>A = Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik = 4</i> <i>B = Jumlah layanan = 13</i></p>		Data dukung terlampir
		5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{2}{13} \times 100\% = 15,38\%$ <p><i>A = Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik = 2</i> <i>B = Jumlah layanan = 13</i></p>		Data dukung terlampir
		6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{3}{13} \times 100\% = 23,08\%$ <p><i>A = Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan = 3</i> <i>B = Jumlah sistem elektronik = 13</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{3}{13} \times 100\% = 23,07\%$ <p><i>A = Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah = 3</i> <i>B = Jumlah layanan publik dan layanan administrasi = 13</i></p>		Data dukung terlampir
		8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{24}{38} \times 100\% = 63,16\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah = 24</i> <i>B = Jumlah perangkat daerah = 38</i></p>		Data dukung terlampir
		9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{24}{38} \times 100\% = 63,16\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat = 24</i> <i>B = Jumlah perangkat daerah = 38</i></p>		Data dukung terlampir
		10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya = 38</i> <i>B = Jumlah perangkat daerah = 38</i></p>		Data dukung terlampir
		11) Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$ <p><i>A = Jumlah data yang dapat berbagi pakai = 2</i> <i>B = Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah = 7</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{12}{38} \times 100\% = 31,58\%$ <p><i>A = Jumlah data yang dapat berbagi pakai = 12</i> <i>B = Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah = 38</i></p>		Data dukung terlampir
		13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{11}{39} \times 100\% = 28,21\%$ <p><i>A = Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo = 3</i> <i>B = Jumlah ASN Pengelola TIK = 28</i></p>		Data dukung terlampir
		14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	<p style="text-align: center;">Master Plan = Ada Perda/Perkada = Ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Master Plan. Poin dalam master plan paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran • Penganggaran • Strategi • Peta Jalan • Arah Kebijakan • Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): <ul style="list-style-type: none"> • Penugasan pejabat • Kewenangan • Tugas dan tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen masterplan • Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik 	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{2}{6} \times 100\% = 33,33\%$ <p><i>A = Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan Pemerintahan Daerah = 2</i> <i>B = Jumlah komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah = 6</i></p>		Data dukung terlampir
		2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) = 5</i> <i>B = Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah) = 5</i></p>		Data dukung terlampir
		3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP = 8</i> <i>B = Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik = 8</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	a. Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Link data dukung: https://s.id/1BnyD		
		1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <i>A = Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan =</i> <i>B = Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam =</i>	Surat keterangan terlampir	
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <i>A = Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan =</i> <i>B = Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan =</i>	Surat keterangan terlampir	
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{46}{237} \times 100\% = 19,41\%$ <i>A = Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi = 46</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada = 237</i>		Data dukung terlampir
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{12}{43} \times 100\% = 27,91\%$ <i>A = Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya = 12</i> <i>B = Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada = 43</i>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{69}{237} \times 100\% = 29,11\%$ <p><i>A = Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan = 69</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada = 237</i></p>		Data dukung terlampir
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{190}{45.018} \times 100\% = 0,42\%$ <p><i>A = Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian = 190</i> <i>B = Jumlah anggota koperasi yang ada = 45.018</i></p>		Data dukung terlampir
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{237} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan = 0</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada = 237</i></p>	Surat keterangan terlampir	
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			Dimanual tertulis tidak perlu diisi
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{48}{237} \times 100\% = 20,25\%$ <p><i>A = Jumlah koperasi yang telah diterbitkansertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) = 48</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada = 237</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{7}{237} \times 100\% = 2,95\%$ <i>A = Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitas pembiayaan = 7</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada = 237</i>		Data dukung terlampir
		11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <i>A = Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitas pemasaran =</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada =</i>	Surat keterangan terlampir	
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{113}{237} \times 100\% = 47,68\%$ <i>A = Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitasi pendampingankelembagaan dan usaha = 113</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada = 237</i>		Data dukung belum tersedia
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{29}{237} \times 100\% = 12,24\%$ <i>A = Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitasi kemitraan = 20</i> <i>B = Jumlah koperasi yang ada = 237</i>		Data dukung belum tersedia
		b. Outcome : Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			
		1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{3.345}{14.195} \times 100\% = 23,56\%$ <i>A = Jumlah pertumbuhan wirausaha baru = 3.345</i> <i>B = Jumlah wirausaha yang ada = 14.195</i>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{10.485}{14.195} \times 100\% = 73,86\%$ <i>A = Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) = 10.485</i> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 14.195</i>		Data dukung terlampir
		3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{5}{14.195} \times 100\% = 0,035\%$ <i>A = Jumlah usaha mikro yang bermitra = 5</i> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 14.195</i>		Data dukung terlampir
		4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{72}{727} \times 100\% = 9,9\%$ <i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi = 72</i> <i>B = Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk = 727</i>		Data dukung terlampir
		5) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = 0</i> <i>B = Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran = 0</i>	Surat keterangan terlampir	
		6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{30}{14.195} \times 100\% = 0,21\%$ <i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan = 30</i> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 14.195</i>		Data dukung terlampir
		7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{30}{14.195} \times 100\% = 0,21\%$ <i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha = 30</i> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 14.195</i>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	PENANAMAN MODAL	a. Outcome : Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	link data dukung: https://s.id/1BnzW		
		1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah = 1 perda / perkada	Perda Kab. Kobar No.9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	
		2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada / Tidak		Surat Pernyataan
		3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada / Tidak		Surat Pernyataan
		4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah = 1 kegiatan	Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	
		5) Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah = 2 kegiatan Pameran/Promosi	1. Pameran APKASI Otonomi Expo 2022 2. Pameran Kobar Expo 2022	
		6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah = 1 kali kegiatan		Data dukung terlampir
		7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah = (3 pengaduan) kali kegiatan		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

		8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah = 1.532	Rekap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan	
		9) Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah Nilai = Rp 12.617.305.437.689,00		
		10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah = 14 orang	Rekap perjalanan dinas pelatihan	Data dukung terlampir
		11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah = ... Perusahaan (230 orang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2022 2. Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun 2022 	
		12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan Kabupaten kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	<p>Jumlah permintaan yg diterima = 7.648 data</p> <p>Jumlah permintaan yg terpenuhi = 7.628 data</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	a. Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Link data dukung: https://s.id/1BnBM		
		1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah = 0 orang		Data dan data dukung belum tersedia
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah = 0 orang		Data dan data dukung belum tersedia
		b. Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		1) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah = 0 orang		Data dan data dukung belum tersedia
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah = 4.362 orang		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		c. Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga			
		1) Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah = 14 orang		Data dukung terlampir
		2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah = 16 kali	Daftar penyelenggaraan event olah raga prestasi tingkat daerah tahun 2022	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	STATISTIK	a. Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Link data dukung: https://s.id/1BnCE		
		1) Tersedianya buku profil daerah	Ada 1. Kotawaringin Barat Dalam Angka 2. PDRB Kotawaringin Barat		Data dukung terlampir
		2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah = 14 survey		Data dukung terlampir
		3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah = 12		Data dukung terlampir
		4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah = 2 survey		Data dukung terlampir
		5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah = 12		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = jumlah metadata kegiatan statistik sektoral = 33</i> <i>B = jumlah kegiatan statistik sektoral = 33</i></p>		Data dukung terlampir
		7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{33}{330} \times 100\% = 10\%$ <p><i>A = jumlah metadata indikator statistik sektoral = 33</i> <i>B = jumlah indikator statistik sektoral = 330</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	PERSANDIAN	a. Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah	Link data dukung: https://s.id/1BnDh		
		1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah kegiatan strategis teramankan = 1</i> <i>B = Jumlah kegiatan strategis yang ada = 1</i></p> <p>Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis</p> <p>Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan</p>		Data dukung terlampir
		2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian = 19</i> <i>B = Jumlah SE yang ada = 19</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan</p> <p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.</p> <p>Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai</p>		
		3) Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$ <p><i>A = Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah = 3</i> <i>B = Jumlah SE yang ada = 6</i></p> <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah titik teramankan = 3</i> <i>B = Jumlah titik pada PHKS = 3</i></p> <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi</p> <p>PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.</p> <p>JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p> <p>Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	KEBUDAYAAN	a. Outcome : Terlestarikannya Cagar Budaya	LINK DATA DUKUNG: https://s.id/1CWY1		
		1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) =	Surat keterangan terlampir	Data dukung menjelaskan kegiatan perlindungan bukan jumlah obyek
		2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK = disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya = + + =	Surat keterangan terlampir	Data dukung menjelaskan kegiatan perlindungan bukan jumlah obyek
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan = 1		Data dukung terlampir
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola = + + + + + = 73 sanggar/kelompok kebudayaan 22 juru pelihara cagar budaya		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan = + =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya perda/perbup yang mengatur kebudayaan, dan terbatasnya sdm
		6) Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) = 3		Data dukung terlampir
		7) Layanan perijinan membawa cagar budaya Kabupaten ke luar Kabupaten dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota =	Surat keterangan terlampir	Tim Ahli Cagar Budaya belum ada
		8) Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) = 2		Data dukung terlampir
		9) Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan = 5 Cagar Budaya		Data dukung terlampir
		10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)= + + + =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat
		12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota.	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat
		13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya perda/perbup yang mengatur kebudayaan, dan terbatasnya sdm
		14) Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya perda/perbup yang mengatur kebudayaan, dan terbatasnya sdm
		15) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi =	Surat keterangan terlampir	Belum bisa terbentuk
		16) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum = + =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat
		17) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabuapten/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) = + =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		18) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) = + =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat
		19) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat =	Surat keterangan terlampir	Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	PERPUSTAKAAN	a. Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Link data dukung: https://s.id/1Bp0o		
		1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{29.864}{276.197} = 0,108$ <p><i>A = Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan di wilayahnya(dalam eksemplar) = 29.864</i> <i>B = Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) = 276.197</i></p>	Jumlah koleksi judul dan koleksi jmlah buku yang ada di perpustakaan tahun 2022	Data dukung jumlah penduduk belum ada dari dukcapil
		2) Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{170.800}{276.197} \times 100\% = 61,84\%$ <p><i>A = Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite = 170.800</i> <i>B = Jumlah penduduk di wilayahnya = 276.197</i></p>	Jumlah kunjungan tahun 2022	Data dukung jumlah penduduk belum ada dari dukcapil
		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{293}{276.197} = 0,001$ <p><i>A = Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya = 293</i> <i>B = Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) = 276.197</i></p>	Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Data dukung jumlah penduduk belum ada dari dukcapil
		4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{4}{297} \times 100\% = 1,35\%$ <p><i>A = Jumlah perpustakaan sesuai standarnasional perpustakaan = 4</i> <i>B = Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya = 297</i></p>	Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah = 96	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Tahun 2022	data dukung terlampir
		b. Outcome : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah = 1 item	Kitab burdah	Data dukung terlampir
		2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah = 0 item	Surat keterangan terlampir	
		3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah = (60 buku) item	Daftar local content yang dimiliki DPK Kab. Kobar Tahun 2022	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24.	KEARSIPAN	a. Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Link data dukung: https://s.id/1Bp0Y		
		1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{376}{1.910} \times 100\% = 19,69\%$ <p><i>A = Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkandaftar arsip = 376</i> <i>B = Jumlah seluruh arsip aktif = 1.910</i></p> <p>Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Jumlah seluruh arsip aktif dapat dilihat dari Jumlah arsip pada JRA	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{43.096}{43.096} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah arsip inaktif yang telahdibuatkan daftar arsip = 43.096</i> <i>B = Jumlah seluruh arsip inaktif = 43.096</i></p> <p>Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Data dukung terlampir
		3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{1.500}{1.500} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah arsip statis yang telahdibuatkan sarana bantu temu balik = 1.500</i> <i>B = Jumlah seluruh arsip statis = 1.500</i></p> <p>Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012</p>	Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{44.596}{44.596} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 44.596</i> <i>B = Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten = 44.596</i></p> <p>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN</p>	Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip	Data dukung terlampir
		b. Outcome : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
		1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Ya NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip		Data dukung terlampir
		2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Ya NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Kabupaten	Ya NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah		Data dukung terlampir
		4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten yang sesuai NSPK	Tidak NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Surat keterangan terlampir	
		5) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Surat keterangan terlampir	
		6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK	Tidak NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	a. Outcome : Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/ kota di wilayah Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Link data dukung: https://s.id/1Bp1j		
		1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah = 2.901 RTP	Data dukung terlampir	RTP Perikanan Laut 1.489 RTP, RTP Perikanan Darat 1.412 RTP
		2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{0}{0} \times 100\% = \dots \%$ <i>A = Jumlah TPI yang operasional = 0</i> <i>B = Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota = 0</i>	Surat keterangan terlampir	Tempat Pelelangan Ikan tidak dioperasikan karena pada tahun 2021 Perda Pelelangan Ikan belum disahkan
		3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah = 2 izin		Data dukung terlampir
		4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah = 25 Unit Usaha		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih = 194.300 ekor		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	PARIWISATA	a. Outcome : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Link data dukung: https://s.id/1Bp1s		
		1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi = 55 Entitas Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	Daftar objek wisata Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022	Data dukung terlampir
		2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata = 144 <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata 	Rekap Data Infrastruktur Pariwisata s.d. Tahun 2022	Data dukung terlampir
		3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota = 238 TDUP	Rekapitulasi tanda daftar usaha pariwisata Tahun 2022	Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa 		
		4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah = 19.689 Orang	Data kunjungan wisatawan tahun 2022	Data dukung terlampir
		5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	<p>Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri = 22 event</p> <p>Bisa sebagai peserta atau penyelenggara</p>	Data event daerah yang diselenggarakan tahun 2022	Data dukung terlampir
		6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota = 0	Surat keterangan terlampir	
		7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri = 0	Surat keterangan terlampir	

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{127}{1.411} \times 100\% = 9,00\%$ <p><i>A = Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi = 127</i> <i>B = Jumlah tenaga kerja pariwisata = 1.411</i></p> <p>Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sub sektor biro perjalanan wisata • Sub sektor hotel dan restoran • Sub sektor spa • Sub sektor restoran, bar dan jasa boga • Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) • Bidang kependudukan wisata selam • Bidang kependudukan wisata • Bidang kependudukan ekowisata • Bidang arung jeram • Bidang kependudukan wisata agro • Bidang jasa boga • Bidang kependudukan wisata goa • Bidang manajerial spa • Bidang MICE 	Data tenaga kerja pariwisata Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022	Data dukung terlampir
		9) Persentase SDM peserta pembekalan kepariwisataan	$\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan = 15</i> <i>B = Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan = 15</i></p>	Data peserta pembekalan sektor kepariwisataan Kab. Kobar Tahun 2022	Data dukung terlampir
		10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah = 10 lokasi		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	PERTANIAN	a. Outcome : Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Link data dukung: https://s.id/1Bp33		
		1) Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah = 629 Unit		Data dukung terlampir
		2) Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah = 13 Unit		Data dukung terlampir
		3) Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian = 0		Surat Keterangan terlampir
		4) Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{629}{629} \times 100 = 100\%$ <i>A = Jumlah sarana yang aktif digunakan = 629</i> <i>B = Jumlah sarana yang dibangun = 629</i>		Data dukung terlampir
		5) Persentase jumlah usulan usaha pertanian Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah usulan yang difasilitasi = 0</i> <i>B = Jumlah usulan usaha pertanian = 0</i>	Surat keterangan terlampir	Belum ada usulan
		b. Outcome : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			
		1) Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 50</i> <i>B = Luas area terkena bencana = 50</i> Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	KEHUTANAN		Link data dukung: https://s.id/1Bp5b		
		1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada	Proposal Rencana Tahura Di Kobar	
		2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi = 0		Belum ada
		3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi = 0 hektar		Belum ada
		4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun = 0		Belum ada

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	a. Outcome : Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Link data dukung: https://s.id/1Bp3A		
		1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah = 0 izin	Tidak ada pemanfaatan panas bumi di Kobar	Surat Keterangan terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	PERDAGANGAN	a. Outcome : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	<p>Link data dukung: https://s.id/1Bp5w</p>		
		1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja =1</i> <i>B = Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar = 1</i></p> $\frac{120}{120} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja =120</i> <i>B = Jumlah permohonan izin tokoswalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar =120</i></p>		Data dukung terlampir
		2) Persentase penerbitan TDG	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja =2</i> <i>B = Jumlah permohonan penerbitan TDG = 2</i></p>		Data dukung terlampir
		3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penerbitan TDG = 42</i> <i>B = Jumlah gudang yang ada di Kab Kota = 42</i></p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</p> <p>a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> <p>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> <p>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p>	<p>Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p><i>A = Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar =</i></p> <p><i>B = Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri =</i></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p><i>A = Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar =</i></p> <p><i>B = Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri =</i></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p> $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p><i>A = Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar =</i></p> <p><i>B = Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri =</i></p>	Surat keterangan terlampir	Tidak ada waralaba di Kab. Kobar

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota = 0</i> <i>B = Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer = 0</i></p>	Surat keterangan terlampir	Tidak pernah melakukan kegiatan tersebut
		6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) = 0</i> <i>B = Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar = 0</i></p>	Surat keterangan terlampir	
		7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (0,5 + 0,29) \times 100\% = 79,54\%$ <p><i>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i> <i>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</i> <i>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</i></p> <p><i>(13/22*100% = 59,09)</i> <i>(59,09*0,5 = 0,29)</i></p>		Data dukung terlampir
		8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<p>Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok = 7,66%</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk			
		1) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{6.346,08 \text{ ton}}{90\% \times 31.397,91 \text{ ton}} \times 100\% = 22,45\%$ <p>a = Jumlah pupuk yang disalurkan = 6.346,08 ton b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kabupaten sebesar (90% dari RDKK) = 90% c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) = 31.397,91 ton (Alokasi yg disetujui 7.033 Ton)</p>		Data dukung terlampir
		c. Outcome : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku			
		1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{1419}{1419} \times 100\% = 100\%$ <p>A = Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan = 1419 B = Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota = 1419</p>		Data dukung terlampir
		2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{132}{152} \times 100\% = 86,84\%$ <p>A = Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku = 132 B = Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan = 152</p>		Data dukung terlampir

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	PERINDUSTRIAN	a. Outcome : Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Link data dukung: https://s.id/1Bp60		
		1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah realisasi izin yang diterbitkan = 0</i> <i>B = Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk = 0</i>	Surat keterangan terlampir	Tahun 2022 tidak ada perusahaan yang mengajukan IUKI dan IPKI
		b. Outcome : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK			
		1) Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK = 0 % Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) = Ya / Tidak b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) = Ya / Tidak c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Kabupaten (25%) = Ya / Tidak d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh	Surat keterangan terlampir	Penyusunan RPIK Kab. Kobar dianggarkan pada tahun 2023

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Gubernur Kabupaten (15%) = Ya / Tidak e) Penetapan Perda RPIK (10%) = Ya / Tidak Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK Jika Ya = 100%; jika tidak = 0%		
		c. Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{8}{67} \times 100\% = 11,94\%$ <i>A = Jumlah realisasi izin yang diterbitkan = 8</i> <i>B = Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk = 67</i>		Data dukung terlampir
		d. Outcome : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah realisasi izin yang diterbitkan =</i> <i>B = Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk =</i></p>	Surat keterangan terlampir	Tahun 2022 tidak ada perusahaan yang mengajukan IPUI
		e. Outcome : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas = ...</i> <i>B = Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota = ...</i></p>	Surat keterangan terlampir	Perusahaan yang wajib mengisi data dan menyampaikan laporan kegiatan industri pada SIINas perusahaan industri berskala besar

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32.	TRANSMIGRASI		Link data dukung: https://s.id/1DrVf		
		1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Jumlah = 1 SKP	Surat keterangan terlampir	
		2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	Tidak ada data
		3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah = 0	Surat keterangan terlampir	Tidak ada data

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Perencanaan Dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{A}{B} = 17.724$ <p><i>A = Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan = Rp. 251.696.697.437</i> <i>B = Jumlah APBD = Rp. 1.420.053.654.390</i></p>	BKAD	Data Unaudited
		2) Rasio PAD	$\frac{A}{B} \times 100\% = 16,50\%$ <p><i>A = Jumlah PAD = Rp 233.165.265.534,65</i> <i>B = Jumlah Pendapatan pada APBD= Rp. 1.412.954.169.584,52</i></p>	BAPENDA	Data Unaudited
		3) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	INSPEKTORAT	
		4) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	INSPEKTORAT	
		5) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p><i>A = Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures = Rp 951.967.688.429</i> <i>B = Jumlah belanja APBD = Rp. 1.420.053.654.390</i></p>	BKAD	Data Unaudited
		6) Opini Laporan Keuangan	WTP = 8 kali WDP = 2 kali		Tahun 2022 belum update

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Disclamer = - kali		
2.	PENGADAAN	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{B} \times 100\% = -\%$ <p><i>A = Jumlah kontrak infrastuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n</i> <i>B = Jumlah kontrak keseluruhan tahun n</i></p>		tidak ada proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{240}{1.311} \times 100\% = 18.307 \%$ <p><i>A = Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 240</i> <i>B = Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif 1.311</i></p>		
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{A}{B} \times 100\% = 28.86 \%$ <p><i>A = Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan 396.363.073.458</i> <i>B = total belanja operasi dan modal 1.373.551.016.925</i></p>		
		4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{A}{B} \times 100\% = \dots \%$ <p>Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) =</p> <p>Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun</p>		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(n-1) =		
4.	KEPEGAWAIAN	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1267}{1650} \times 100\% = 76.788\%$ <p><i>A = Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 1267</i> <i>B = Seluruh jumlah pegawai 1650</i></p>	BKPP	
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{504}{1650} \times 100\% = 30,54\%$ <p><i>A = Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) 504</i> <i>B = Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 1650</i></p>	BKPP	
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{50}{504} \times 100\% = 9,92\%$ <p><i>A = Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 50</i> <i>B = Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 504</i></p>	BKPP	
5.	MANAJEMEN KEUANGAN	1) Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\frac{A}{B} - 1 \right] = 9.1586$ <p><i>A = Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1.420.053.654.390</i> <i>B = total belanja APBD = 1.563.223.468.525</i></p>	BKAD	Data Unaudited

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2) Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\frac{A}{B} - 1 \right] \times 100\% = 17.79\%$ <p><i>A = Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi 233.177.455.634</i> <i>B = Total PAD dalam APBD 283.646.085.100</i></p>	Penghitungan dari Bapenda Kab.Kobar	data unaudited
		3) Assets Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada daftar asset tetap? Ya 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan Ya 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya 	BKAD	
		4) Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{A}{B} \times 100\% = 6.673 \%$ <p><i>A = Nilai realisasi SiLPA = 97.531.350.426</i> <i>B = Total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.461.583.803.894</i></p>	BKAD	
6.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{A}{B} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda = 9</i> <i>B = realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda = 9</i></p>		
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{A}{B} \times 100\% = 41.67 \%$		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>A = Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda = 5</i> <i>B = Total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12</i>		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Misi		Tujuan			Sasaran Strategis				Target
		Uraian		Indikator Kinerja	Uraian		Indikator Kinerja		
I	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;	1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini atas audit BPK	WTP
					2	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	2	Nilai SAKIP Kabupaten	A
					3	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3	Maturitas SPIP	Level 3
					4	Meningkatnya Pelayanan Publik	4	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	99
II	Meningkatkan kualitas hidup	2	Meningkatkan kualitas	Indeks Pembanguna	5	Meningkatnya derajat	5	Angka Harapan	13,57

BAB II CAPAIAN KINERJA

	manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olah raga;		sumberdaya manusia	n Manusia		pendidikan masyarakat	6	Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Jumlah	9,2
					6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup	71,36
					7	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.	8	Cabang olah raga yang prestasi	46
III	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;	3	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi	8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.	9	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	7,50
							10	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,50
							11	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	15
					9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.	12	Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	2,2 %
							13	Rasio PAD	12

BAB II CAPAIAN KINERJA

							terhadap total pendapatan daerah		
					10	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infratraktur Ekonomi.	14	Kualitas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44,73
							15	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,471 %
			Angka Kemiskinan.		11	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	16	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	73 %
					12	Menurunnya tingkat pengangguran	17	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Air	65
							19	Indeks Kualitas Udara	72
							20	Indeks Kualitas Hutan	67
					14	Menurunnya risiko bencana	21	Indeks risiko bencana	80
IV	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan	4	Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi	Indeks Pembangunan Masyarakat	15	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat	22	Indeks toleransi (Inklusi Sosial)	0,76

	bermasyarakat		masyarakat pluralis.			beragama			
					16	Meningkatnya desa mandiri	23	Presentase Desa Mandiri	12 %
					17	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	24 25	Indeks Pembangunan Gender Kategori Kabupaten Layak Anak	99,3 Nindya
V	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;	5	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan	1 8	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	26 27	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang terselesaikan Persentase penurunan tindak kriminal	70% 17,5 %
VI	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	6	Peningkatan Pariwisata Daerah.	<i>Tourism Intencity Index</i>	19	Meningkatkan industri kepariwisataan	28 29 30	Rata-rata lama tinggal Jumlah Persentase peningkatan wisatawan <i>Spending of Money</i>	4 10,15 95 M

BAB II CAPAIAN KINERJA

					20	Meningkatkan kelestarian seni dan budaya	31	Persentase cagar budaya yang lestari	100%
--	--	--	--	--	----	--	----	--------------------------------------	------

Sumber : data diolah oleh Sekretariat Daerah

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Misi		Tujuan		Sasaran Strategis				Target	Realisasi	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian		Indikator Kinerja				
I	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;	1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini atas audit BPK	WTP	WTP
					2	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	2	Nilai SAKIP Kabupaten	A	B
					3	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
					4	Meningkatnya Pelayanan Publik	4	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	99	86,47
II	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan,	2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	5	Angka Harapan Lama Sekolah	13,57	12,75
					6	Rata-rata Lama	6	Rata-rata Lama	9,2	8,54

BAB II CAPAIAN KINERJA

	kesehatan, dan olah raga;						Sekolah Jumlah			
					6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup	71,36	70,98
					7	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.	8	Cabang olah raga yang prestasi	46	44
III	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;	3	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.	9	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	7,50	*6,60
							10	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,50	*5,71
							11	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	15	*2,62 (PPK) *6,30 (Perikanan)
					9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.	12	Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	2,2 %	240,73%
							13	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	12	16,50
					10	Meningkatnya	14	Kualitas jalan	44,73	57,915%

					Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infratraktur Ekonomi.	15	Kabupaten dalam kondisi baik Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,471 %	0,433%	
			Angka Kemiskinan.	11	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	16	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	73 %	101,98%	
				12	Menurunnya tingkat pengangguran	17	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5	4,51	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Air	65	70	
						19	Indeks Kualitas Udara	72	93,15	
						20	Indeks Kualitas Hutan	67	67,72	
				14	Menurunnya risiko bencana	21	Indeks risiko bencana	80	121,90	
IV	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	4	Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis.	Indeks Pembangunan Masyarakat	15	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	22	Indeks toleransi (Inklusi Sosial)	0,76	0,78
					16	Meningkatnya desa mandiri	23	Presentase Desa Mandiri	12 %	475%
					17	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan	24	Indeks Pembangunan Gender	99,3	91,96

BAB II CAPAIAN KINERJA

					perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	25	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya	96,65	
V	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;	5	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan	18	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	26	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang terselesaikan	70%	83,37%
							27	Persentase penurunan tindak kriminal	17,5 %	-11,90 %
VI	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.	6	Peningkatan Pariwisata Daerah.	<i>Tourism Intensity Index</i>	19	Meningkatkan industri kepariwisataan	28	Rata-rata lama tinggal	4	1,36
							29	Jumlah Persentase peningkatan wisatawan	10,15	20,41
							30	<i>Spending of Money</i>	95 M	93,8 M
					20	Meningkatkan kelestarian seni dan budaya	31	Persentase cagar budaya yang lestari	100%	100%

Sumber : data diolah oleh Sekretariat Daerah (* data belum rilis BPS)

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Misi		Tujuan		Sasaran Strategis				Target	Capaian 2021	Capaian 2022				
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja									
I	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;	1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	WTP			
					2	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	2	Nilai SAKIP Kabupaten				A	B	B
					3	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3	Maturitas SPIP				Level 3	Level 3	Level 3
					4	Meningkatnya Pelayanan Publik	4	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat				99	84,15	86,47
II	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui	2	Meningkatkan kualitas sumberdaya	Indeks Pembangunan Manusia	5	Meningkatnya derajat pendidikan	5	Angka Harapan Lama Sekolah Rata-rata Lama	13,57	12,71	12,75			

BAB II CAPAIAN KINERJA

	pendidikan, kesehatan, dan olah raga;		manusia		masyarakat	6	Sekolah Jumlah	9,2	8,41	8,54	
					6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,36	70,68	70,98	
					7	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.	Cabang olah raga yang prestasi	46	12	44	
III	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;	3	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.	9	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	7,50	6,60	*6,60
							10	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,50	5,71	*5,71
							11	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	15	2,62 (PPK)	*2,62 (PPK)
										6,30 (Perikanan)	*6,30 (Perikanan)
				9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.	12	Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	2,2 %	-46,42%	240,73%	
						13	Rasio PAD terhadap total pendapatan	12	24,00	16,50	

BAB II CAPAIAN KINERJA

						daerah					
					10	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infratruktur Ekonomi.	14	Kualitas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44,73	56,71%	57,915%
							15	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,471%	0,437%	0,433%
			Angka Kemiskinan.		11	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	16	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	73 %	127,39	101,98%
					12	Menurunnya tingkat pengangguran	17	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5	4,70	4,51
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Air	65	53,75	70
							19	Indeks Kualitas Udara	72	91,99	93,15
							20	Indeks Kualitas Hutan	67	66,91	67,72
					14	Menurunnya risiko bencana	21	Indeks risiko bencana	80	133,58	121,90
IV	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	4	Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis.	Indeks Pembangunan Masyarakat	15	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	22	Indeks toleransi (Inklusi Sosial)	0,76	0,78	0,78
					16	Meningkatnya desa mandiri	23	Presentase Desa Mandiri	12 %	534,98%	475%
					17	Meningkatkan	24	Indeks	99,3	91,67	91,96

BAB II CAPAIAN KINERJA

					perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	25	Pembangunan Gender Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya (800)	126,95%	96,65	
V	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;	5	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan	18	26	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	70%	99,53%	83,37%	
						27	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang terselesaikan	17,5 %	-12,63%	-11,9%	
VI	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	6	Peningkatan Pariwisata Daerah.	<i>Tourism Intensity Index</i>	19	28	Meningkatkan industri kepariwisataan	Rata-rata lama tinggal	4	1,06	1,36
						29		Jumlah	10,15	-26,60	20,41
						30		Persentase peningkatan wisatawan	95 M	35 M	93,8 M
					20	Meningkatkan kelestarian seni dan budaya	31	Persentase cagar budaya yang lestari	100%	100%	100%

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Misi		Tujuan		Sasaran Strategis				Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2022	% Capaian Thd Target Akhir RPJMD	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian					
I	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;	1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan	1	Opini atas audit BPK	WTP	WTP	100%	WTP	100%
					2	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	2	Nilai SAKIP Kabupaten	A	B	79	B	79
					3	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100%
					4	Meningkatnya Pelayanan Publik	4	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	99	86,47	87,34	99	87,34
II	Meningkatkan kualitas hidup	2	Meningkatkan kualitas	Indeks Pembanguna	5	Meningkatnya derajat	5	Angka Harapan Lama Sekolah	13,57				

BAB II CAPAIAN KINERJA

	manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olah raga;		sumberdaya manusia	n Manusia		pendidikan masyarakat	6	Rata-rata Lama Sekolah Jumlah	9,2				
					6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup	71,36	70,98	99,46%	71,36	99,46%
					7	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.	8	Cabang olah raga yang prestasi	46	44	95,65%	46	95,65%
III	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;	3	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.	9	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	7,50	*6,60	-	-	-
							10	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,50	*5,71			
							11	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	15	*2,62 (PPK) *6,30 (Perikanan)			
					9	Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah.	12	Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN	2,2 %	240,73%		2,2%	
							13	Rasio PAD terhadap total	12	16,50	137,50%	12	137,50%

BAB II CAPAIAN KINERJA

						pendapatan daerah							
				10	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infratraktur Ekonomi.	14	Kualitas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	44,73%	57,915%	129,47%	44,73%	129,47%	
				15		Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,471 %	0,437%	108,03%	0,471%	108,03%		
			Angka Kemiskinan.	11	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	16	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	73 %	74,45%	101,98%	73%	132,94%	
				12	Menurunnya tingkat pengangguran	17	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5	4,51	55,65%	2,5	55,65%	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	18	Indeks Kualitas Air	65	70,00	107,69%	65	107,69%	
		19				Indeks Kualitas Udara	72	93,15	129,38%	72	129,38%		
		20				Indeks Kualitas Hutan	67	67,72	101,07%	67	101,07%		
				14	Menurunnya risiko bencana	21	Indeks risiko bencana	80	121,90	66%	80	66%	
IV	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat	4	Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis.	Indeks Pembangunan Masyarakat	15	Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama	22	Indeks toleransi (Inklusi Sosial)	0,76	0,78	102,63	0,76	102,63
					16	Meningkatnya desa mandiri	23	Presentase Desa Mandiri	12 %	46 Desa	475%	12%	475%

BAB II CAPAIAN KINERJA

				17	Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak	24	Indeks Pembangunan Gender Kategori Kabupaten Layak Anak	99,3	91,69	92,60	99,3	92,60	
						25		Nindya	Pratama	Pratama	Nindya	Pratama	
V	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;	5	Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan	18	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum	26	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang terselesaikan	70%	88,37%	126,24%	70%	88,37%
							27	Persentase penurunan tindak kriminal	17,5 %	-11,9%	-68%	17,5%	11,9%
VI	Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.	6	Peningkatan Pariwisata Daerah.	<i>Tourism Intencity Index</i>	19	Meningkatkan industri kepariwisataan	28	Rata-rata lama tinggal	4	1,36	34%	4	34%
							29	Jumlah Persentase peningkatan wisatawan	10,15	20,41	201%	10,15	201%
							30	<i>Spending of Money</i>	95 M	93,8 M	98,7%	95 M	98,7%
					20	Meningkatkan kelestarian seni dan budaya	31	Persentase cagar budaya yang lestari	100%	100%	100%	100%	100%

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran, serta program pendukung sasaran tidak menjadi bagian perhitungan efisiensi.

No	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja			Anggaran (Rp.) melalui APBD			Tingkat Efisiensi		Keterlibatan Pihak ke 3 dalam pencapaian Kinerja	
		Target	Realisasi	% capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Rp.	% capaian	%	jumlah nilai efisiensi	Jenis Bantuan	jumlah
1	Kualitas jalan Kabupaten dalam kondisi baik Program : 1. Penyelenggaraan Jalan	44,7 3%	57,91 5%	129,4 7	Rp 67.731.712.597	Rp67.450.306.852	99,58			Rp.20.24 5.008.89 5,24	Bantuan CSR pembangunan jalan 48,17 Km dari Total Panjang 115,68 Km
2.	Angka Harapan Hidup Program : 1. Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	71,3 6	70,98	99,46	Rp 656.572.684	Rp 541.937.266	82,54 %	17, 46 %	Rp 224.753.936	Bantuan CSR 2 Unit Ambulance	Rp 1.315.326.600

	<p>Masyarakat</p> <p>2. Penin- gkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</p> <p>3. Sediaa- n Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>4. Pemb- erdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>										
3.	<p>Cabang Olahraga Yang Berprestasi</p> <p>Program :</p> <p>1. Pengembanga- n kapasitas daya saing keolahragaan</p>	46	44	95,65 %	Rp 2.473.998.136	Rp 2.330.173.965	94,19	5,8 1%	Rp. 143.824.171	-	-
4	<p>Meningkatnya kesejahteraan PMKS</p>	73%	74,45	101,9 8	Rp 8.018.141.000	Rp 7.855.730.395	97,22	2,7 8	Rp 224.400.605	Bantuan CSR KORINDO	Rp 3.000.000

BAB II CAPAIAN KINERJA

										Bantuan CSR CBI	7 Unit Kursi Roda
5	Indeks Kualitas Air (IKA) Program : Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	65	70,00	107,6 9	696.834.421	691.357.312	99,21	8,4 8	5.477.109	-	-
	Indeks Kualitas Udara (IKU) Program : Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	72	93,15	129,3 8	696.834.421	691.357.312	99,21	30, 17	5.477.109	-	-
	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Program : 1. Program	67	67,72	101,0 7	6.816.799.598	6.250.832.488	91,70	9,3 7	565.967.110	-	-

	pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya										
6	Indeks toleransi (Inklusi Sosial) Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,76	0,78	102,63%	Rp 786.322.060	Rp.758.958.480	96,52	6,38	Rp 27.363.580	-	-
7	Presentase Desa Mandiri Program : 1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan	12%	475%	475	2.242.808.148	2.221.941.784	99	3,76	20.866.364	-	-

	Kerjasama Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
8	Meningkatkan Perlindungan dan Keberdayaan Perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan konusifitas Kabupaten/Kota Layak Anak	99,3	91,69	93,59	1.415.710.956	1.164.653.360	82,27	17,73	251.057.596	-	-
	Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya (800)	Pratama (773,25)	96,65						-	-

9	Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum Program : 1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	70%	88,37 %	126,24%	5.353.130.000	4.834.110.772	90,30	9,7	519.019.228	-	-
10	Rata-Rata lama tinggal	4	1,36	34	1.092.564.297	1.082.044.535	99,07			Bantuan Sosial Pengemb	88.508.000

BAB II CAPAIAN KINERJA

	Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									angan Desa Wisata	
11	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	12,0 0	16,50	137,5 0	Rp 2.909.571.662	Rp2.353.280.775	80,88	19, 12	Rp. 556.290.887	-	-
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan Program : 1. Pelayanan Penanaman Modal	98	99,74	99,74	Rp164.702.980	Rp162.879.660	98,89	1,1	Rp1.823.320		
13	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat 1. Program pengemban gan iklim	100	111	111	Rp.345.615.000	Rp.321.697.138	93,08	6,9	Rp.23.917.862		

	penanaman modal										
	2. Program promosi penanaman modal	2,63	221	221	Rp.271.024.300	Rp.247.500.845	91,32	8,7	Rp.23.523.455		
	3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	64,29	64,44	64,44	Rp.428.369.200		76,12	23,9	Rp.102.283.740		
	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	90	100	111,11	Rp.1.217.715.330	Rp.1.108.115.799	91	9	Rp.109.599.531		
	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota										

BAB II CAPAIAN KINERJA

	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	100	Rp.4.602.381.932	Rp.4.537.834.469	98,60	1,4	Rp.64.547.463		
Total Efisiensi									2.864.715.957		21.651.843.495

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

LKjIP Kabupaten Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini merupakan akuntabilitas kinerja yang berbentuk laporan dalam rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan diukur atas dasar penilaian terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran strategis selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Kotawaringin Barat tahun 2022 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan

cara membandingkan target dengan Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka menginterpretasikan atas pencapaian dan indikator kinerja sasaran digunakan skala dalam lima kategori sebagai berikut:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	91 % - 100%	Sangat Tinggi
2	76 % - 90%	Tinggi
3	66 % - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	>50 %	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa implementasi RPJMD/IKU Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja telah mencakup pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan. Ketiganya dilaksanakan dalam rangka pencapaian realisasi sasaran strategis.

Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 19 (sembilan belas) Sasaran dan 36 (tiga puluh enam) Indikator Sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja. Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja. Misi III terdapat 1 tujuan 6 sasaran dan 13 indikator kinerja. Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja. Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja. Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja;
- Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 13 indikator kinerja;
- Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja;
- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja.
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.

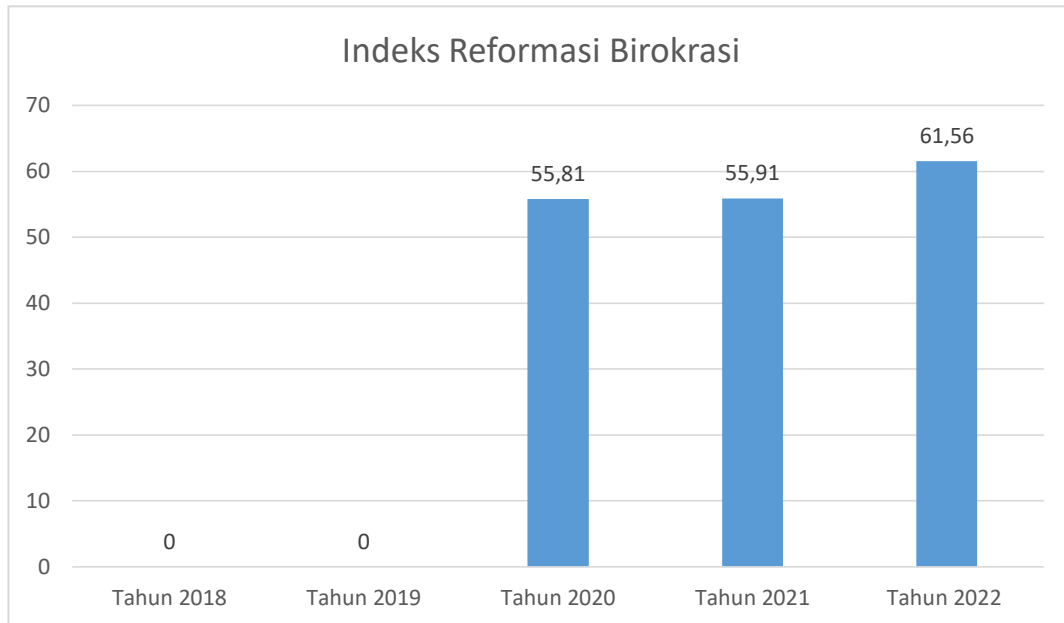
(20 sasaran strategis dan 31 Indikator Kinerja Utama).

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2017-2022 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah reuiu pada tahun 2020. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dengan kategori capaian kinerja sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2022 terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada awal RPJMD tahun 2017, penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilaksanakan sehingga belum mendapatkan nilai evaluasi dari Kemenpan RB. Pada Tahun 2020 dan 2021 dilakukan PMPRB dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan nilai 55,81 dan 55,91 dengan predikat “CC”. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan nilai 61,56 dengan capaian kinerja sebesar 103,44 % atau capaian Sangat Tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

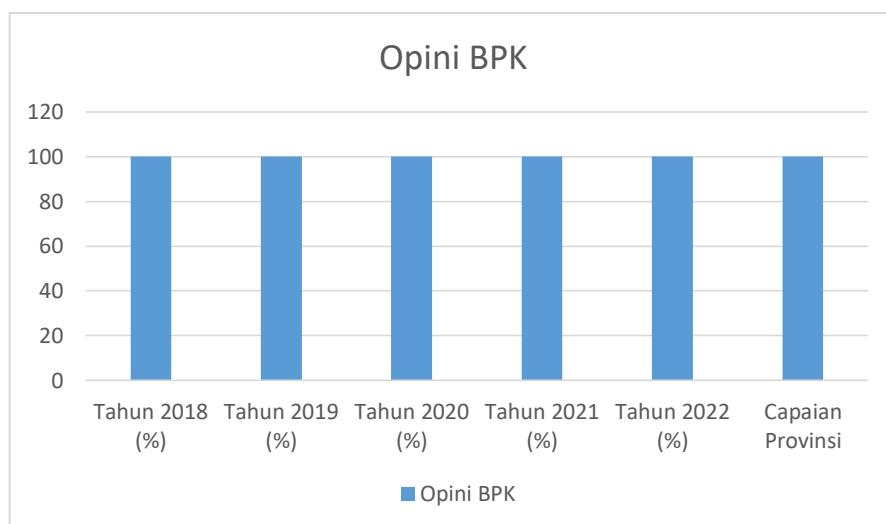
1. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Didukung oleh empat sasaran, yakni :

Sasaran ke 1 :

- Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan

a. Opini atas audit BPK



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Opini atas Audit BPK	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Hasil pemeriksaan Tim Audit BPK
Rata-rata Capaian Kinerja									100			100	

Sumber: Data diolah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kabupaten Kotawaringin Barat terus berkomitmen dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, kualitas tata kelola keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat mampu di jaga dengan kualitas baik sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 atau sudah 8 tahun mendapatkan opini WTP dari BPK. Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

mendapatkan Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 oleh Tim Audit BPK dengan capaian kinerja sebesar 103,44 % atau capaian Sangat Tinggi.

Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan:

1. Informasi keuangan yang tersaji dalam LKPD merupakan keberadaan dan keterjadian yang senyatanya ada, pernyataan bahwa semua telah disajikan secara lengkap, ada pemisahan hak dan kewajiban secara jelas, penilaian dan alokasi sudah dilakukan dengan tepat dan telah disajikan sesuai SAP;
2. Semua informasi keuangan telah diungkapkan secara cukup;
3. Semua informasi keuangan telah disajikan dengan proses pengendalian yang efektif;
4. Semua informasi keuangan merupakan gambaran transaksi yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja :

1. Komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai Opini WTP atas Laporan Keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Secara rutin melaksanakan pemantauan pemanfaatan Aset dan update data potensi inventarisasi Aset Daerah;
3. Melakukan Desk Laporan Keuangan sebelum melakukan penyusunan Laporan Keuangan Daerah Konsolidasi dan Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

4. Memiliki Regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Rutin melakukan upaya-upaya peningkatan Kompetensi SDM di internal BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan / SDM ke pelatihan teknis / sosialisasi / Bimbingan Teknis ke Instansi Pusat / Provinsi / Lembaga Akademis;
6. Secara berkala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan internal kepada jajarannya dengan memberikan arahan dan petunjuk serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
7. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM atau pegawai yang handal melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain;
8. Memerintahkan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengusulkan anggaran secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, alokasi dan sumber daya yang tersedia;
9. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data dan catatan atas laporan persediaan dari OPD kemudian melakukan perbandingan dengan hasil review dari Inspektorat, sehingga data riil persediaan sesuai dengan catatan pada LKPD;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjelas status aset yang dipinjam-pakaikan pihak lain;
11. Melakukan verifikasi dan validasi data aset: penginputan data melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), rekonsiliasi aset secara berkala (tiap 6 bulan) antara Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan semua Organisasi perangkat daerah (OPD),

- inventarisasi fisik aset di semua Organisasi perangkat daerah (OPD);
12. Melakukan inventarisasi terhadap aset yang telah rusak berat, hilang, status kepemilikan belum jelas, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak diketahui keberadaannya dan kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aset yang akan diusulkan untuk dihapuskan;
 13. Melakukan Inventarisasi Aset Daerah ke masing-masing OPD se-Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penyelarasan data;
 14. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait melalui rapat koordinasi dan evaluasi penerimaan PAD;
 15. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit reguler dan revidi atas LKPD sehingga penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan cepat ditindaklanjuti;
 16. Melaksanakan Rapat koordinasi TP-TGR secara berkala untuk menindaklanjuti penyetoran kembali kerugian daerah;
 17. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) APBD serta RAPERKADA penjabaran APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan merujuk pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Melakukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan sehingga cepat mengetahui kekurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

19. Melakukan Penguatan komitmen dan integritas Pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan;
20. Melakukan penguatan Perencanaan dan Penganggaran;
21. Peningkatan kualitas Pengadaan Barang / Jasa dan Peningkatan pengelolaan barang milik daerah;
22. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
23. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan;
24. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).



Ket : Proses Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat



Ket : Penghargaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



Ket : Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten



Ket : Tahun 2022 Proses Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

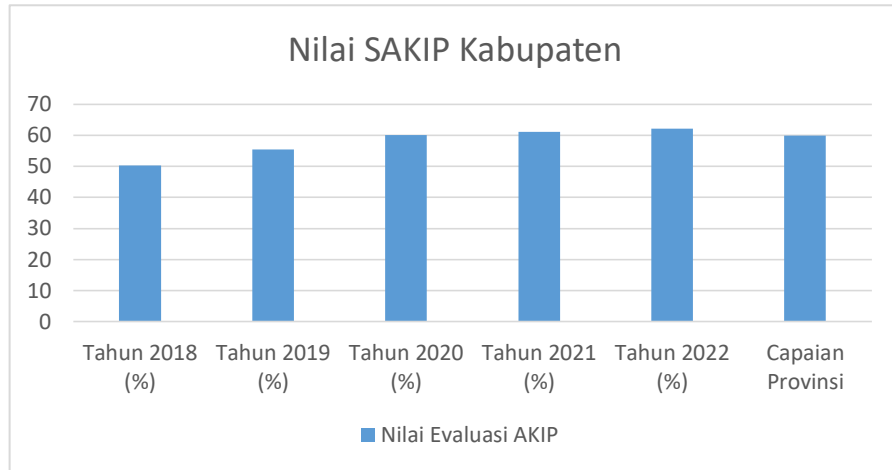
Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat dilakukan di Malang, Jawa Timur

Sasaran ke 2 :

- Meningkatkan sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Nilai SAKIP Kabupaten



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Nilai SAKIP Kabupaten	LHE Kemendagri	Nilai	100	92,48	79	A	B	79	A	B	79	LHE Kemendagri
Rata-rata Capaian Kinerja									79			79	

Sumber: Data diolah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nilai SAKIP Kabupaten dengan target pada tahun 2022 adalah kategori A. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1146/AA.05/2022, tanggal 6 Desember 2022, hal Hasil

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan nilai sebesar 63,49 dengan predikat “B” dengan capaian kinerja sebesar 79% atau capaian Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai SAKIP Kabupaten tidak mencapai target dikarenakan :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Beberapa dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum diunggah pada laman *esr.menpan.go.id*. Sebagai contoh dokumen RPJMD/RPD Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen PK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022;
 - b. Masih terdapat sasaran level Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi outcome, yaitu "meningkatkan pengembangan potensi daerah". Selain itu, terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya cukup untuk mengukur sasaran strategis, sebagai contoh pada sasaran strategis "meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga" hanya diukur menggunakan indikator "cabang olahraga yang berprestasi", indikator tersebut belum dapat mengukur kondisi peningkatan prestasi pemuda;
 - c. Masih terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum sepenuhnya berorientasi outcome, kurang sesuai dengan level jabatan yang mengampu dan atau merupakan kinerja supporting yang tidak harus

dikawal oleh Kepala Dinas. Sebagai contoh sasaran PK Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi", sasaran "menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah" dan sasaran "meningkatnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan" pada PK Kepala Dinas Sosial;

- d. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah merumuskan pohon kinerja sebagai dasar penyusunan RPD tahun 2023-2026. Namun, pohon kinerja belum mampu mengidentifikasi outcome antara (intermediate/immediate outcome) dengan baik sehingga Critical Success Factor (CSF) langsung dijabarkan ke dalam kinerja yang sifatnya operasional, selain itu penjabaran kinerja yang dilakukan belum mampu menyajikan alternatif kondisi/kinerja sebagai solusi yang efektif untuk mencapai kinerja utama daerah. Sebagai contoh ultimate outcome "meningkatnya kualitas SOM" dijabarkan ke CSF "pelayanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat", akan lebih baik CSF berbicara terlebih dahulu terkait dengan "meningkatnya angka harapan hidup" untuk dijabarkan kembali salah satunya menjadi "meningkatnya akses pelayanan kesehatan" sebagai intermediate outcome. Selain kondisi di atas, terdapat penjabaran kinerja yang prinsip logisnya terbalik, yaitu CSF "meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat terhadap peraturan yang berlaku" dijabarkan menjadi "menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum";

- e. Belum melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome antar PD sebagai upaya mempercepat tercapainya kinerja utama PD.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Aplikasi monev kinerja e-SAKIP Kotawaringin Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh PD dalam mempermudah proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres capaian kinerja dan anggaran, karena didapati beberapa PD belum mengunggah data kinerja ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian, belum mengintegrasikan aplikasi e-SAKIP dan e-KINERJA sehingga monitoring dan evaluasi kinerja PD dan individu pegawai belum dapat dilakukan secara lebih efisien;
 - b. Terdapat dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum menampilkan definisi operasional, rumus perhitungan dan sumber data setiap indikator kinerja, sehingga belum dapat dipastikan substansi dan kesesuaian setiap indikator kinerja dalam menggambarkan sasaran strategisnya. Sebagai contoh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Masih ditemukan laporan kinerja PD belum menjelaskan secara spesifik dan jelas terkait dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja setiap sasaran strategis. Sebagai contoh pada laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Masih ditemukan laporan kinerja belum membandingkan antara realisasi dengan target kinerja tahun akhir periode renstra sehingga belum terlihat seberapa besar gap yang harus dipenuhi/dikejar.

Sebagai contoh pada laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. Masih ditemukan dokumen laporan kinerja PD belum menyajikan rencana tindak lanjut/solusi atas kendala atau hambatan yang dialami dalam mencapai target kinerja;
 - d. Masih ditemukan laporan kinerja PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh pada laporan kinerja Dinas Pariwisata;
 - e. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa disertai dengan penjelasan yang cukup. Sebagai contoh beberapa indikator kinerja pada PK Kepala Dinas Kesehatan tahun 2022 ditargetkan lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, indikator-indikator tersebut diantaranya angka kematian bayi (AKB), prevalensi stunting dan prevalensi HIV.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Catatan yang disampaikan dalam LHE AKIP internal tahun 2021 kurang spesifik. Khususnya pada komponen perencanaan kinerja, belum menunjukkan titik-titik kinerja, indikator maupun target yang masih harus diperbaiki. Sebagai contoh pada LHE AKIP internal Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah salah satu catatan pada komponen perencanaan adalah belum semua ukuran/indikator kinerja memenuhi kriteria SMART, tetapi tidak disampaikan (sebagai contoh)

indikator mana yang kualitasnya belum SMART tersebut;

- b. Terdapat kondisi tim evaluator internal dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kepada PD khususnya kecamatan. Hal tersebut berpengaruh kepada progress implementasi SAKIP sebagian besar kecamatan menjadi lambat.

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningkatan nilai SAKIP Kabupaten :

1. Telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026;
2. Telah menyusun pohon kinerja RPD level Pemerintah Daerah dan PD;
3. Menyusun Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama berdasarkan saran dan masukan oleh Kementerian PAN dan RB;
4. Melakukan Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) setiap 3 bulan dan pelaksanaan Forum Grup Discussion (FGD) secara berkala dengan melibatkan stakeholder terkait membahas tentang capaian kinerja Perangkat Daerah pengampu IKU;
5. Melaksanakan asistensi SAKIP yang di dampingi oleh Kemenpan RB dan dari akademisi;
6. Paparan langsung pelaksanaan SAKIP 2021 ke Kemenpan RB agar mendapatkan masukan terkait pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Menyusun pedoman sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Telah dilakukan pembinaan dan desk bagi Perangkat Daerah yang hasil evaluasi AKIP nya rendah agar dpt meningkatkan evaluasi AKIP nya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, strategi untuk meningkatkan nilai evaluasi AKIP Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

1. Telah dilaksanakan asistensi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan narasumber Akademisi dari Universitas. Pada kegiatan asistensi tersebut, telah dijelaskan perihal variabel-variabel yang perlu dilengkapi untuk meningkatkan nilai evaluasi dimaksud;
2. Penyusunan RPD dan Renstra Tahun 2023 – 2026 telah memuat pohon kinerja;
3. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Kotawaringin Barat, Perjanjian Kinerja seluruh Eselon II sampai dengan Eselon IV berdasarkan cascading;
4. Melakukan evaluasi AKIP pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Melakukan konsensus oleh Tim SAKIP Kabupaten bahwa akan menyusun Pohon Kinerja dan Peta Proses Bisnis pada tahun 2022 selaras dengan penyusunan RPD dan Renstra Tahun 2023 – 2026;
6. Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi SAKIP tingkat Kabupaten.



Ket : Pendampingan implementasi SAKIP dengan Kemenpan RB



Ket : Pendampingan implementasi SAKIP dengan Kemenpan RB

BAB II CAPAIAN KINERJA



Ket : Pendampingan implementasi SAKIP dengan narasumber dari akademisi

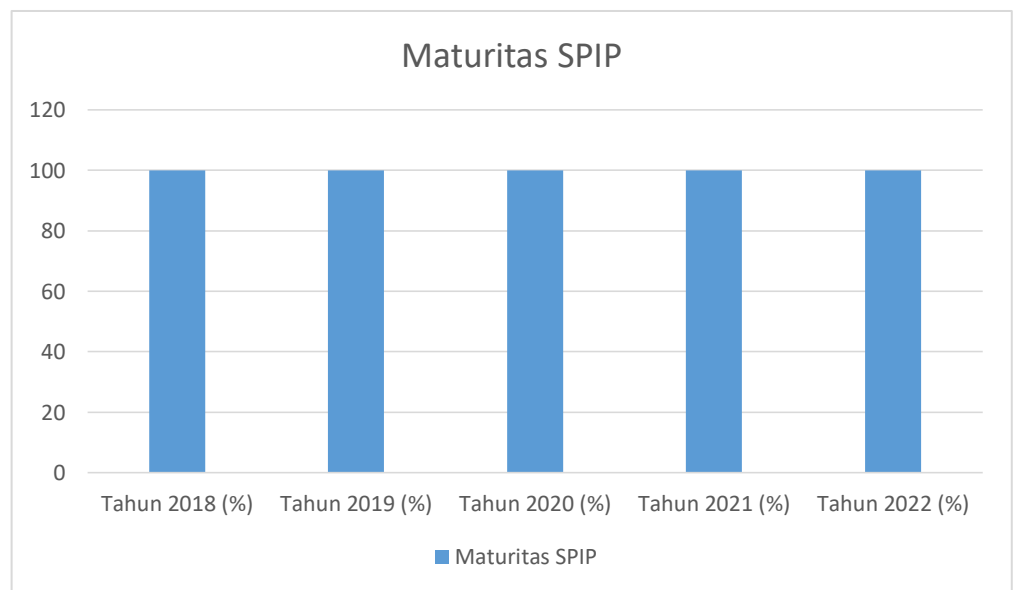


Ket : evaluasi SAKIP dihadiri oleh Plt. Sekda dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah

Sasaran ke 3 :

- Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

a. Maturitas SPIP



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Maturitas SPIP	LHE BPKP	Level	3	3	3	3	3	100	3	3	100	LHE BPKP
Rata-rata									100			100	

Capaian Kinerja											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data diolah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sasaran strategis Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Nilai realisasi capaian Tingkat Maturitas SPIP, masih diperoleh dari laporan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor S-1993/PW15/3/2021 tanggal 3 Desember 2021. Sampai dengan laporan ini disusun Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi belum dikeluarkan sehingga hasil penilaian masih merujuk kepada hasil penilaian tahun 2021 dan merujuk kepada Pernyataan Telah dilakukan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencantumkan bahwa nilai Total Skor SPIP adalah 3,735, sehingga diambil kesimpulan sementara atas hasil Penjaminan Kualitas bahwa SPIP Terintegrasi Kotawaringin Barat berada pada level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau capaian Sangat Tinggi. Adapun Proram dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah: Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Komponen Penilaian dalam laporan hasil Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	2,000
2	Struktur dan Proses	30%	0,910
3	Pencapaian Tujuan SPIP	30%	0,825
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,735
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,58
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		3,53

Kendala yang dialami sehingga hasil penilaian SPIP terintegrasi belum didapatkan sampai dengan saat ini, antara lain:

1. Tim Penilaian Mandiri mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dalam pelaksanaan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi;
2. Terdapat asesor Penilaian Mandiri Pemda yang mengundurkan diri;
3. Aplikasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi terkadang eror baik dari segi penyimpanan data ataupun monitoring proses Penilaian Mandiri;
4. Akibat dari kendala tersebut proses Penilaian Mandiri menjadi terlambat yang seharusnya Juli 2022 namun baru selesai di bulan November 2022.

Dari komponen penilaian pada tabel diatas dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk sementara telah memenuhi target RPJMD dalam upaya pencapaian maturitas SPIP Terintegrasi pada level 3 dengan nilai 3,735. Tingkat Maturitas SPIP mencapai target dikarenakan :

1. Penjadwalan dan penyusunan timeline pelaksanaan penilaian maturitas SPIP terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang baik, mulai dari pengisian template isian SPIP oleh admin Pemerintah Daerah (Pemda), Penilaian Mandiri sekaligus menyiapkan bukti pendukung oleh asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pembuatan laporan SPIP terintegrasi oleh asesor pemda dan Penjaminan Kualitas oleh penjamin kualitas;
2. Komitmen dan integritas untuk menyelesaikan penilaian mandiri Maturitas SPIP terintegrasi dengan target level 3.
3. Dilakukannya Bimtek terhadap seluruh asesor OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Dilakukannya pendampingan yang intensif oleh asesor Pemda pada asesor tingkat OPD terkait pengisian SPIP terintegrasi;
5. Dilakukannya koordinasi antar asesor Pemda dan asesor tingkat OPD;
6. Perangkat Daerah di Kab Kobar telah menyusun Manajemen Risiko karena adanya pendampingan penuh dari tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Nilai SAKIP Pemda yang telah mencapai nilai B ikut juga menjadi faktor pendorong tercapainya level 3 tersebut.
8. Mengoptimalkan peranan OPD pengampu SPIP Terintegrasi yaitu Sekretariat Daerah, Bappeda, BKAD dan Inspektorat;
9. Melakukan asistensi kepada OPD yang belum optimal dalam melakukan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi;
10. Tim Pengampu SPIP Terintegrasi melakukan konsultasi dan koordinasi ke BPKP Provinsi Kalimantan Tengah secara berkesinambungan.

BAB II CAPAIAN KINERJA



Ket : Pelaksanaan Bimtek Pengisian Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIS bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022
Tanggal 17-18 Mei 2022



Ket : Pelaksanaan Webinar terkait Bimtek Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tanggal 25 April 2022



Ket : Pelaksanaan Bimtek Maturitas SPIP Terintegrasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

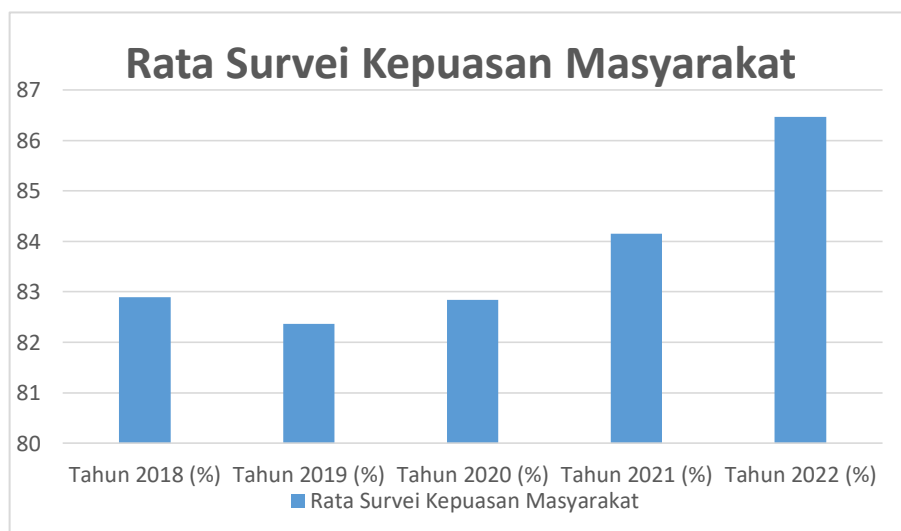


Ket : Asistensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko

Sasaran ke 4 :

- Meningkatnya Pelayanan Publik
 - a. Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebesar 86,47 dan masuk kategori B atau Baik dengan capaian kinerja sebesar 87,34 % atau capaian Tinggi. Capaian tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, capaian ini belum sesuai target yang ditetapkan yakni 99.



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat		skor	82,89	82,36	82,84	96	84,15	87,65	99	86,47	87,34	Bag. Organisasi
Rata-rata Capaian Kinerja									87,65			87,34	

Sumber: Data diolah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nilai IKM tidak mampu mencapai target disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain :

1. Target nilai IKM yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak mempertimbangkan capaian rata rata nilai IKM Kabupaten lima tahun terakhir yakni pada kisaran 82.
2. Upaya peningkatan nilai IKM melalui perbaikan kualitas layanan publik di tingkat perangkat daerah terhambat oleh minimnya anggaran dan lemahnya dukungan dari pimpinan unit layanan.

3. Belum ada regulasi ditingkat daerah yang dapat mendorong perbaikan kualitas layanan publik melalui instrumen IKM
Upaya yang dilakukan dalam upaya peningkatan nilai IKM antara lain :

1. Mengusulkan target nilai IKM yang lebih moderat dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya. Usulan ini telah disetujui dan telah mendapat pengesahan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.

KONDISI AWAL KINERJA	TARGET			
	2023	2024	2025	2026
2021	84	85	86	87
83,86	84	85	86	87

(Sumber : Dokumen RPD Tahun 2023 – 2026)

2. Melakukan rapat evaluasi dan asistensi ke 16 OPD pengampu IKU sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Rapat dilaksanakan pada 31 Maret 2022 untuk mengevaluasi pelaksanaan SKM Tahun 2021 dan persiapan pelaksanaan SKM Tahun 2022. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil evaluasi dan kendala kendala apa saja yang dihadapi OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagian besar OPD menyampaikan kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran dan minimnya anggaran dan lemahnya dukungan dari pimpinan unit layanan. Selain itu, disampaikan arahan pimpinan perihal target IKM 2022 dan strategi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

3. Menerbitkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Nomor 060/84/ORGS Tanggal 24 Agustus 2022 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan SKM. SE ini memuat ketentuan mengenai mekanisme, periodisasi dan teknis pelaksanaan serta pelaporan SKM dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah.
4. Mempermudah pelaksanaan dan pelaporan SKM melalui portal survei <https://skm.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada 2023 antara lain :

1. Melaksanakan desk evaluasi dan persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 menggunakan aplikasi e SKM ke seluruh perangkat daerah yang direncanakan pada Januari 2023. Desk dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menggunakan aplikasi e SKM untuk kegiatan survei dengan pola pelaporan per triwulan.
2. Melakukan monitoring dan asistensi secara berkala terhadap hasil SKM dan rencana tindaklanjut perbaikan oleh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

BAB II CAPAIAN KINERJA



Ket : Rapat Aplikasi e-SKM Tanggal 19 Januari 2022



Ket : Rapat Evaluasi Laporan SKM Th 2021 dan Persiapan Pelaksanaan SKM 2022 Tanggal 31 Maret 2022



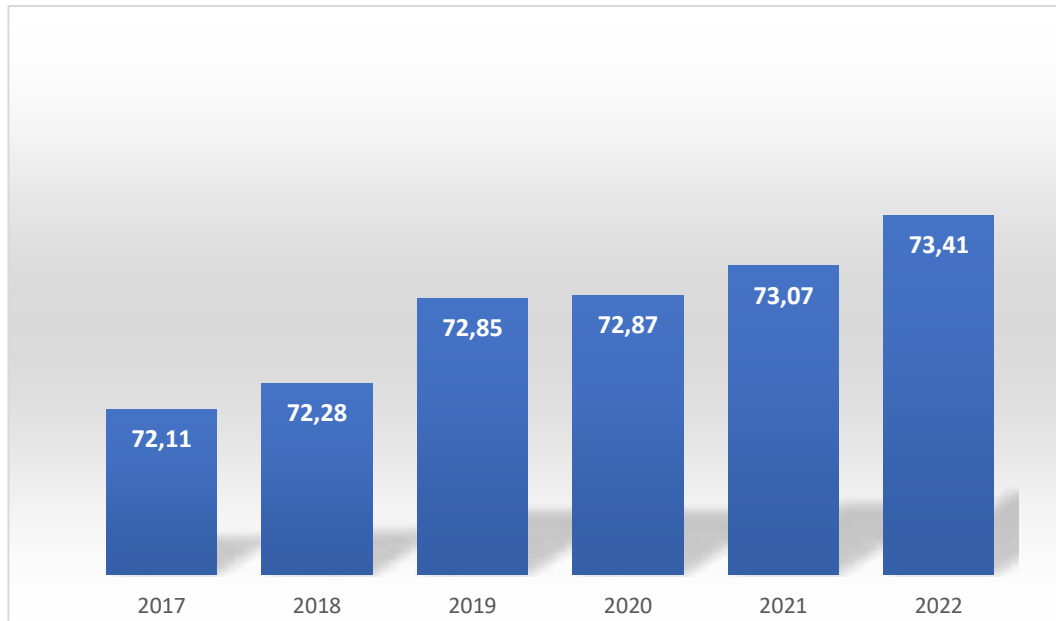
Ket : Sosialisasi Aplikasi e-SKM dengan Perangkat Daerah Pengampu IKU



Ket : Menerima Konsultasi dan Koordinasi dari Bagian Prokom terkait Pelaksanaan SKM dan Penggunaan Aplikasi e-SKM Tanggal 25 Agustus 2022

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : Laporan Rakordal Triwulan IV Tahun 2022, Bappedalitbang Kab. Ktw. Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM Kabupaten Kotawaringin Barat yang dihitung menggunakan metode penghitungan yang direvisi tahun 2010 dan mengadopsi perubahan metodologi pada tahun 2014, pada tahun 2022 mencapai angka 73,41. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,34 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 73,07. Secara umum IPM di Kotawaringin Barat masih di atas rata-rata IPM Kalteng secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2022 terus menunjukkan kinerja yang positif. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat menandakan bahwa semakin membaiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, meningkatnya kemampuan daya beli dan semakin baiknya pembangunan yang dirasakan penduduk.

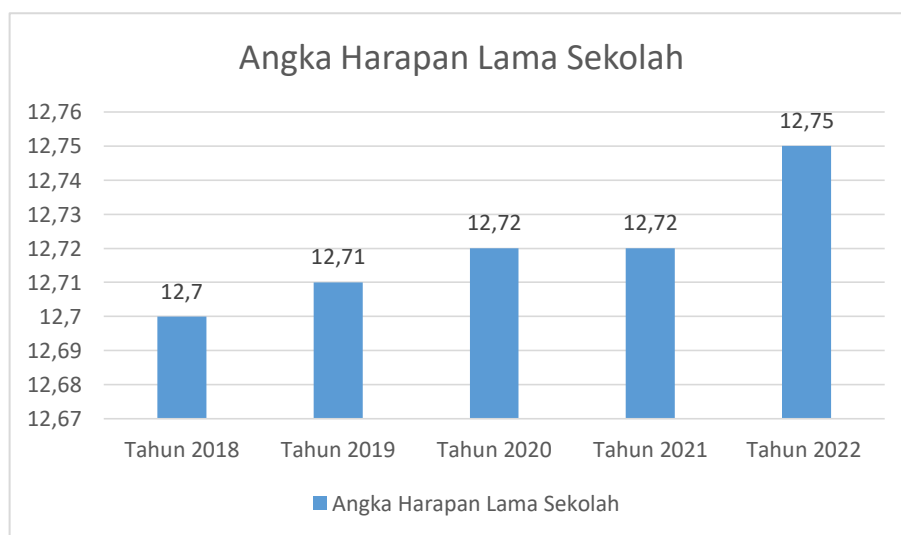
2. Tujuan 2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Didukung oleh 3 sasaran, yakni :

Sasaran ke 1 :

- Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

a. Angka Harapan Lama Sekolah



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Angka Harapan Lama Sekolah		Tahun	12,7	12,71	12,72	13,38	12,73	95,14	13,57	12,75	93,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja												93,96	

Sumber: Badan Pusat Statistik Pangkalan Bun

Angka Harapan Lama Sekolah dengan target pada tahun 2022 adalah 13,57 tahun dan capaian 12,75 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah tidak mencapai target dikarenakan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun

2022 = 12,75 tahun artinya penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan menamatkan Pendidikan sampai SMA/SMK/MA Pendidikan 12 tahun dan kuliah selama 0,75 Tahun atau sekitar 9 Bulan. Pendidikan tinggi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sehingga keterbatasan Pemerintah Kabupaten dalam upaya meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah, tidak mencapai target dikarenakan :

- 1) Ketersediaan Data Base masih sangat terbatas;
- 2) Data Pokok Pendidikan belum akurat dan valid serta terintegrasi;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan;
- 4) Belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa;
- 5) Kurangnya Satuan Pendidikan Menengah di Kabupaten;
- 6) Kurangnya fasilitas pendidikan sekolah tinggi dan Universitas di Kabupaten

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah :

- 1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan fasilitas dan Penambahan Unit Sekolah Baru pendidikan menengah (SMA/SMK) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2) Terkait dengan peran serta pemerintah daerah terhadap Perguruan Tinggi yang berada dikabupaten kotawaringin barat, yang mana kewenangan berada pusat, namun hal ini sangat berpengaruh pada capaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat, terhadap sarana prasarana perguruan tinggi pemerintah daerah hanya

memungkinkan memberikan bantuan berupa alat peraga sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati.

- 3) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pengembangan fasilitas pendidikan tinggi (Universitas Antakusuma, Stikes Borneo Cendekia Medika, STITNA dan Universitas Terbuka) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat
- 4) Pengadaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD dan SMP), Pengadaan perlengkapan dasar bagi peserta didik kurang mampu jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan wujud perhatian pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jumlah peserta didik jenjang SD penerima perlengkapan dasar sebanyak 774 orang sedangkan jenjang SMP sebanyak 800 orang
- 5) Penyerahan Perlengkapan Dasar SMPN 3 Kumai, Penyerahan Perlengkapan Dasar SD-SMP Satu Atap Negeri 1 Kumai dan Penyerahan Perlengkapan Dasar SDN 5 Raja.
- 6) Diklat Calon Pengawas Sekolah, Pelaksanaan diklat ini diikuti sebanyak 45 orang dengan narasumber dari Widyaprada BPMP Kalteng.
- 7) Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Hal Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Kegiatan ini diikuti sebanyak 35 orang dengan narasumber dari Pengawas Sekolah Kabupaten.
- 8) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Paud, Pelatihan diikuti sebanyak 40 orang dengan narasumber dari Pengawas Sekolah Kabupaten.
- 9) Kegiatan Pemanfaatan Platform SDS, Raport Pendidikan Dan Platform Merdeka Mengajar, Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 orang dengan narasumber dari Widyaprada BPMP Kalteng.

- 10) Kegiatan Pelatihan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Bagi Guru, Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 orang dengan narasumber dari Balai Guru Penggerak Kalteng.
- 11) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah, Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) disetiap Satuan Pendidikan. Pada tahun 2022 pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi di beberapa Satuan Pendidikan melalui sumber dana APBD maupun DAK Fisik.



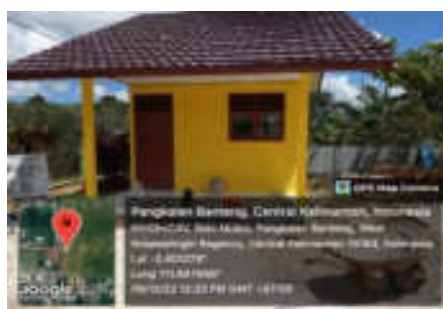
Ket : Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam pengembangan fasilitas pendidikan tinggi



Ket : Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penambahan Satuan Pendidikan Menengah

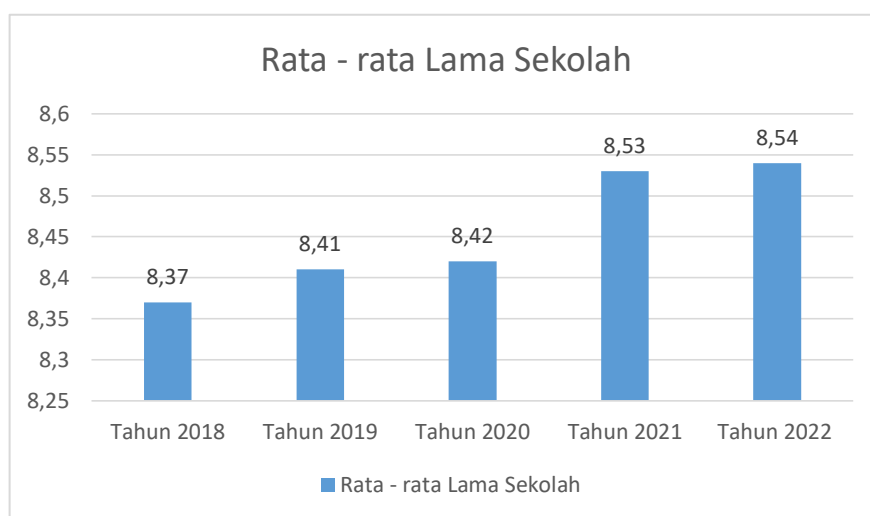


Ket : Penyerahan Perlengkapan Dasar ke SMP dan SD di Kab. Kotawaringin Barat



Ket : Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) disetiap Satuan Pendidikan

b. Rata-rata Lama Sekolah Jumlah



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Rata - rata Lama Sekolah		Tahun	8,37	8,41	8,42	9,01	8,53	94,67	9,2	8,54	92,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rata-rata Capaian Kinerja												92,83	

Sumber : Badan Pusat Statistik Pangkalan Bun

Rata-rata Lama Sekolah dengan target pada tahun 2022 adalah 9,02 tahun dan capaian 8,54 tahun. Rata-rata Lama Sekolah tidak mencapai target dikarenakan kurangnya keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa selain itu Angka target yang di targetkan terlalu tinggi, melihat angka capaian tiap tahunnya selalu terjadi peningkatan capaian, Namun demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah daerah telah berusaha secara

maksimal dengan sumber daya yang ada untuk meningkatkan Rata - Rata Lama Sekolah dengan membantu masyarakat yang ingin melanjutkan Pendidikan ditingkat Menengah melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket C atau Setara SMA dan anak putus sekolah. Hal tersebut tergambar dari peningkatan warga belajar pendidikan kesetaraan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 2.289 orang warga belajar apabila dibandingkan di tahun 2021 hanya sebanyak 1.811 orang warga belajar. Sedangkan untuk Cakupan Layanan Pendidikan Kesetaraan ada peningkatan sebesar 2 satuan PKBM di tahun 2022 sehingga menjadi 1 SKB dan 12 PKBM yang tersebar di 4 kecamatan dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 1 SKB dan 10 PKBM dan tersebar di 3 Kecamatan.

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningkatan Rata-rata Lama Sekolah :

- 1) Sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial dan kunjungan kesekolah/warga masyarakat.
- 2) Mendorong penduduk diatas usia 25 tahun yang rata-rata pendidikannya SMP untuk melanjutkan kejenjang SMA/paket C di SKB/PKBM yang ada.
- 3) Mendorong masyarakat/ investor untuk berinvestasi di dunia Pendidikan Non Formal melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
- 4) Bekerja sama dengan pemerintah desa dan program dari instansi lain.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan non formal.
- 6) Sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat

- 7) Mendorong penduduk diatas usia 25 tahun yang rata-rata pendidikannya SMP untuk melanjutkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan.
- 8) Mendorong masyarakat / investor untuk berinvestasi di dunia Pendidikan Non Formal melalui PKBM (Pusat kegiatan belajar masyarakat).
- 9) Bekerja sama dengan pemerintah desa dan program dari instansi lain.
- 10) Mendorong PKBM swasta untuk bekerja sama dengan SD/SMP/SMA terdekat dilingkungannya untuk melacak siswa yang putus sekolah dan menyelamatkan dengan melanjutkan Pendidikan melalui program kesetaraan (paket A/B/C).
- 11) Pelaksanaan Asesmen Nasional Pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)
- 12) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Satuan Pendidikan Nonformal
- 13) Mengupdate APLIKASI SIAPTARA yang telah diluncurkan pada tanggal 16 Juni 2021 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga belajar Pendidikan Kesetaraan.
- 14) Melakukan penandatanganan MOU antara lembaga PNF (SKB/PKBM) dengan lembaga pendidikan formal/lembaga pendidikan keagamaan (pesantren/salafiah) yang ada di Pemerintah desa/kelurahan.
- 15) Bertambahnya satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Non Formal sebanyak 2 (dua) Satuan Pendidikan yang semula dari 1 SKB dan 10 PKBM bertambah menjadi 1 SKB dan 12 PKBM.
- 16) Memberikan stimulus bagi masyarakat usia diatas 25 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan di paket kesetaraan dengan bekerjasama dengan stakeholders lain untuk

BAB II CAPAIAN KINERJA

membantu mensosialisasikan program kesetaraan di 6 (enam) Kecamatan.



Ket : Penggunaan Aplikasi SIAPTARA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga belajar Pendidikan Kesetaraan.



Ket : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Satuan Pendidikan Nonformal

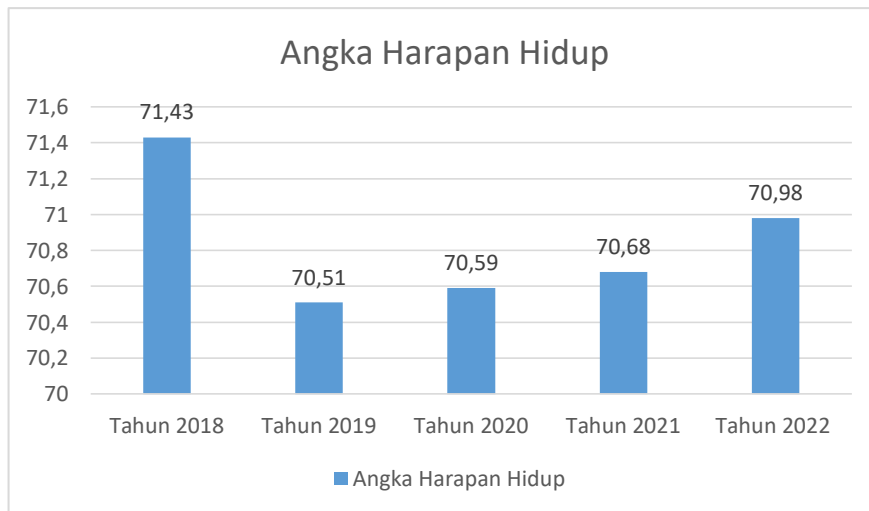


Ket : Pelaksanaan Asesmen Nasional Pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)



Ket : Memberikan stimulus bagi masyarakat usia diatas 25 tahun yang ingin melanjutkan pendidikan di paket kesetaraan dengan bekerjasama dengan stakeholders lain untuk membantu mensosialisasikan program kesetaraan di 6 (enam) Kecamatan.

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - a. Angka Harapan Hidup



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Angka Harapan Hidup		Nilai	71,43	70,51	70,59	71,17	70,68	99,31	71,36	70,98	99,47	Dinas Kesehatan
Rata-rata Capaian Kinerja												99,47	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Angka harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebesar 70,98 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,47% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**. Jika dilihat dari tren selama 5 Tahun terakhir Angka Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan.

Angka Harapan Hidup tidak mencapai target dikarenakan:

1. Jumlah kematian ibu masih cukup tinggi, sepanjang tahun 2022 jumlah kematian ibu mencapai 9 kasus atau 205 Per

- 100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab tertinggi kematian ibu adalah hipertensi pada kehamilan dan perdarahan.
2. Jumlah kematian bayi khususnya pada kelompok neonatus masih cukup tinggi, sepanjang tahun 2022 jumlah kematian bayi sebanyak 54 kasus atau 12,34 Per 1.000 Kelahiran Hidup. Kematian bayi terbanyak terjadi pada kelompok neonatus (0-28 hr) sebanyak 44 kasus atau 81,5%. Penyebab utama kematian neonatus adalah berat badan lahir rendah, asfiksia, dan kelainan kongenital.
 3. Jumlah kematian pada pasien penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular masih cukup tinggi, sepanjang tahun 2022 data RSUD Sultan Imanuddin menyatakan sedikitnya terdapat 32 kasus.
 4. Masih terdapat balita dengan kasus gizi buruk yang berpotensi menurunkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit infeksi.
 5. Jumlah penderita Tuberkulosis yang tidak ditemukan sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar masih cukup tinggi.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan angka harapan hidup :

1. Meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, melalui pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan.
2. Meningkatkan pemenuhan ketersediaan alat kesehatan yang sesuai standar melalui pengadaan, perbaikan dan kalibrasi secara berkala.
3. Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembayaran biaya iuran JKN hingga total coverage (UHC).

4. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah.
5. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, pertemuan monitoring dan evaluasi program.
6. Melaksanakan pembinaan UKBM khususnya Posyandu
7. Memastikan fasilitas kefarmasian dan fasilitas kesehatan swasta memiliki izin dan mentaati ketentuan yang berlaku.

Perbaikan kinerja kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah:

1. Meneruskan upaya pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar
2. Meneruskan upaya pengadaan, perbaikan dan kalibrasi alat kesehatan secara berkala
3. Mempertahankan keberadaan tenaga kontrak daerah
4. Meneruskan peningkatan kompetensi petugas dengan lebih banyak menyelenggarakan pelatihan yang terstandar.
5. Memaksimalkan penggunaan dana BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas.
6. Meningkatkan mutu pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat khususnya Posyandu
7. Meningkatkan mutu pembinaan ke fasilitas kefarmasian.

BAB II CAPAIAN KINERJA

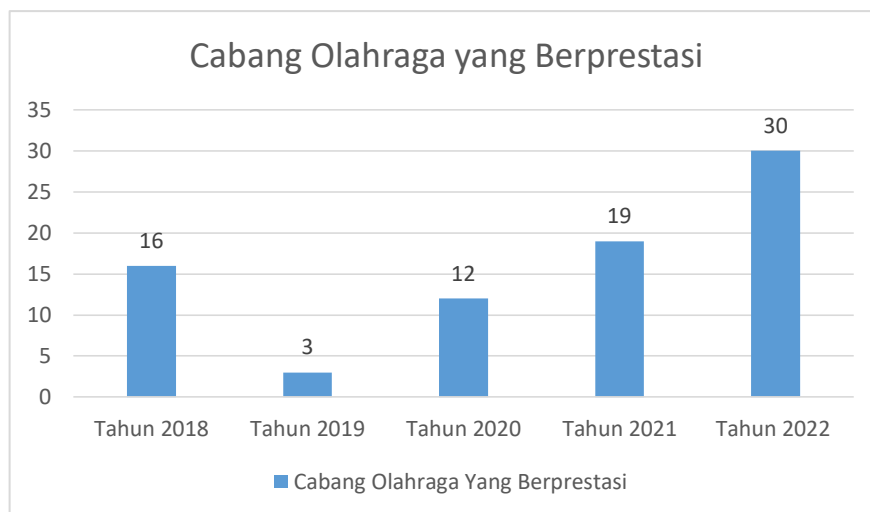
Data penghargaan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 (seluruh Perangkat Daerah) sebagaimana berikut di bawah ini.

No.	Foto	Keterangan foto
1		Penyerahan Piagam Penghargaan Keberhasilan UHC (<i>Universal Health Care</i>) dalam rangka HUT Kabupaten Kotawaringin Barat yang ke-63 karena penerima kepesertaan BPJS (PBI dan Mandiri) mencapai 95% dari penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat
2		Penyerahan Piagam Penghargaan dari pemerintah pusat melalui BKKBN atas komitmen serta inovasi terhadap upaya percepatan penurunan stunting di daerah
3		Penyerahan Piagam Penghargaan sebagai Terbaik Capaian Vaksinasi Lengkap COVID-19

BAB II CAPAIAN KINERJA

4		Piagam Penghargaan sebagai Terbaik Capaian Vaksinasi Lengkap COVID-19 bagi Masyarakat Umum dan Rentan
5		Piagam Penghargaan sebagai Terbaik Capaian Vaksinasi Lengkap COVID-19 bagi Remaja
6		Piagam Penghargaan sebagai Terbaik Capaian Vaksinasi Lengkap COVID-19 bagi Anak-anak

- Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
 - a. Cabang olahraga yang berprestasi



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Cabang Olahraga Yang Berprestasi		Jumlah	16	3	12	35	19	54,28	46	44	95,65	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Rata-rata Capaian Kinerja									54,28			95,65	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.

Cabang olah raga berprestasi meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2022 terdapat 44 cabang olah raga yang berprestasi sedangkan pada tahun 2021 hanya 19 cabang olah raga. Dalam mendukung target kinerja, Bidang Olahraga melakukan fasilitasi beberapa aktifitas yang menunjang pengembangan SDM khususnya dibeberapa cabor diantaranya kegiatan :

- a) Training Centre PELTI, BILLIARD, FORKI, FPTI, FUTSAL, IMI, ISSI, PABBSI, PASI, PBVSI, PERBAKIN, PERBASI, PBSI;

- b) Training Centre PERCASI, PERPANI, PERSANI, PERSEROSI, PERTINA, PODSI, PRSI, PSSI, PSTI, PTMSI, TAEKWONDO, IPSI;
- c) Mengikuti kejurwil cabang olahraga Taekwondo di Banjarmasin;
- d) Mengikuti kejurnas cabang olahraga Taekwondo di Banten;
- e) Mengikuti kejurda cabang olahraga catur di Palangka Raya;
- f) Mengikuti POPPROV di Palangka Raya; dan
- g) Mengikuti PRA POPNAS di Banjarmasin.

Tercapainya pembinaan cabang-cabang olahraga berprestasi adalah merupakan program yang dijalankan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinergi dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Dengan mengikutsertakan cabang olahraga dalam event-event olahraga baik tingkat daerah, wilayah maupun nasional. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet berprestasi dari tiap-tiap cabang olahraga dengan harapan dapat mengikuti event olahraga dijenjang selanjutnya.

Adapun capaian prestasi olahraga pada tahun 2022 dalam daerah adalah sebagai berikut :

1. Medali emas ganda putri cabang olahraga bulutangkis pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Wina Candra Wati dan Safira Melilani
2. Medali emas tunggal putri cabang olahraga bulutangkis pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Loisa Brita Cristi
3. Medali emas tunggal putra cabang olahraga bulutangkis pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya,

Kalimantan Tengah atas nama Reasya Saputra

4. Medali emas nomor tanding kyorugi under 46 kg putri cabang olahraga taekwondo pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Amanda Putri Thalia
5. Medali emas nomor tanding kyorugi under 59 kg putra cabang olahraga taekwondo pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Maykell Aditya Putra Utomo
6. Medali emas nomor tanding 100 meter putri cabang olahraga atletik pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Yuvita Subu
7. Medali emas nomor tanding lompat tinggi putra cabang olahraga atletik pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Arya Juliansyah
8. Medali emas nomor tanding perorangan putri cabang olahraga tenis lapangan pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Raisa Zaki Faturahman
9. Medali emas nomor tanding komite putra 50 kg cabang olahraga karate pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Genta Adhyaksa Napitupulu
10. Medali emas nomor tanding speed perorangan putri cabang olahraga panjat tebing pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Yulia Agnes P.BR Butar Butar
11. Medali emas nomor tanding lead perorangan putri cabang olahraga panjat tebing pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Yulia Agnes P.BR Butar Butar

12. Medali emas nomor tanding boulder perorangan putri cabang olahraga panjat tebing pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Yulia Agnes P.BR Butar Butar
13. Medali emas nomor tanding speed perorangan putri cabang olahraga panjat tebing pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Yulia Agnes P.BR Butar Butar
14. Medali emas nomor tanding ganda putra cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Ali Adam dan M. Safi'ih
15. Medali emas nomor tanding ganda putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Melisa Firlinawati dan Adinda Dwi Ratna
16. Medali emas nomor tanding regu putra cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Faiz Susanto, Lutpy Septiansyah dan Lukman Hakim
17. Medali emas nomor tanding laga kelas A putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Reva Herlita
18. Medali emas nomor tanding laga kelas D putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Feby Aura Pajriani
19. Medali emas nomor tanding laga kelas E putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Nurhikmah

20. Medali emas nomor tanding laga kelas G putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Intan Nur Aini
21. Medali emas nomor tanding laga kelas E putra cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Rendi Efendi
22. Medali emas nomor tanding laga kelas G putra cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama M. Aditya Setiawan
23. Medali emas nomor tanding laga kelas I putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Rahmat Sadewo
24. Medali emas nomor tanding beregu putra cabang olahraga sepak takraw pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Adri Anur, Wawa Agustian, Aria Kristian dan Heronimus Iron Liubana
25. Medali perak nomor tanding ganda putra cabang olahraga bulu tangkis pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Arifandy Dwinata dan Agit Danisa Sugianto
26. Medali perak nomor tanding kyorugi under 48 kg putra cabang olahraga taekwondo pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Alven Dayu Panca Abdi Dwi Bowo
27. Medali perak nomor tanding kyorugi under 63 kg putra cabang olahraga taekwondo pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Jeremiah Nathanael Tinambunan

28. Medali perak nomor tanding lompat jauh putra cabang olahraga atletik pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama M. haikal Faiz
29. Medali perak nomor tanding komite putri 48 kg cabang olahraga karate pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Puspa Permata Sari
30. Medali perak nomor tanding speed perorangan putra cabang olahraga panjat tebing pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama M. Nayaka Winipinandito Cannavaro
31. Medali perak nomor tanding tunggal putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Adinda Dwi Ratna
32. Medali perak nomor tanding regu putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Umi Nur Khasanah, Maryatul Ulfa Hidayatun dan Alengka Joice Tatania
33. Medali perak nomor tanding laga kelas A putra cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Ma'an
34. Medali perak nomor tanding laga kelas C putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Nur Azizah
35. Medali perak nomor tanding laga kelas F putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama

Astrid Dwi Agustin

36. Medali perak nomor tanding laga kelas B putri cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Ainur Maulida
37. Medali perunggu nomor tanding poomsae freestyle putri cabang olahraga taekwondo pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Rohana Patrizia Putri
38. Medali perunggu nomor tanding 200 meter putri cabang olahraga atletik pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Yuvita Subu
39. Medali perunggu nomor tanding kata perorangan putra cabang olahraga karate pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Genta Adhyaksa Napitupulu
40. Medali perunggu nomor tanding lead perorangan putra cabang olahraga panjat tebing pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama M. Nayaka Winipinandito Cannavaro
41. Medali perunggu nomor tanding laga kelas F putra cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama Kafi Maulilah
42. Medali perunggu nomor tanding laga kelas H putra cabang olahraga pencak silat pada event Pekan Olahraga Pelajar Provinsi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atas nama M. Ridho

Selain capaian prestasi olahraga pada tahun 2022 dalam daerah di atas, adapun capaian olahraga prestasi tingkat nasional yang di raih adalah sebagai berikut :

1. Medali perak cabang olahraga pencak silat pada event Pra Popnas Zona III di Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2. Medali perunggu cabang olahraga taekwondo pada event Kejurwil di Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Ket : Giat Bidang Pembinaan Keolahragaan Rapat TC. Persiapan Kejuaraan Sepak Bola Usia Dini DPRD KOBAR CUP TH.2022



Ket : Taekwondo Kobar ikuti kejuaraan Antasari cup 8 di Banjarmasin



Ket : Pembukaan POPPROV Kalteng 2022



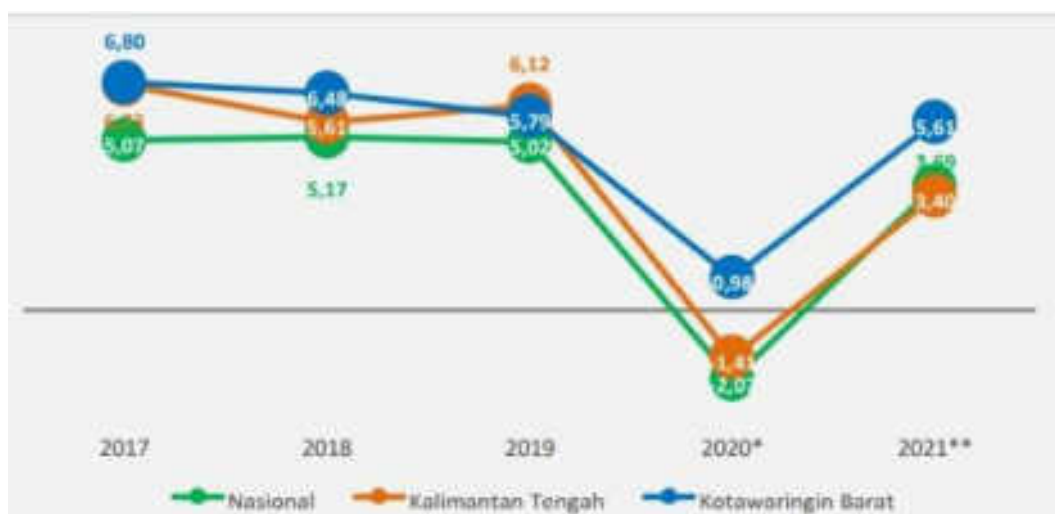
Ket : Pra Popnas Zona III 2022 Di Gor. Hasanuddin Banjarmasin

Tujuan 3 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan.

Indikator Kinerja Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 mengacu data capaian tahun 2021, mengingat rilis data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir Februari 2023. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 secara kumulatif tumbuh sebesar 5,61 persen, menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021. Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perbaikan meskipun pandemi *covid-19* belum usai. Pada tahun 2021 mengalami percepatan dari tahun 2020, bahkan hampir mendekati pertumbuhan tahun 2019 ketika belum terjadi pandemi *covid-19*.



Gambar : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dibandingkan dengan Provinsi Kalteng dan Nasional , Th. 2019-2021 (persen)

Pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat ini didorong oleh 3 lapangan usaha utama yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan usaha cukup besar di tahun 2021 yaitu : 1). Lapangan usaha kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh sebesar 14,39 persen; 2) Lapangan usaha kategori konstruksi tumbuh sebesar 12,05 persen; 3). Lapangan usaha kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 9,83 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat tinggi ini diintervensi oleh berbagai program dan kegiatan pemerintah sebagai berikut :

1. Gencarnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggalakkan kegiatan vaksinasi Covid 19 dengan pagu tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 21.056.756.785, dengan capaian jumlah vaksinasi 1 sebanyak 233.408 orang (109,90% dari target sebesar 203.208), vaksin ke 2 sebanyak 196.812 orang atau sebesar 96,82%, vaksin ke 3 sebanyak 64.047 orang (31,51%) serta mendorong program dan kegiatan

Kesehatan untuk pemenuhan SPM Kesehatan dengan menganggarkan biaya sebesar Rp 2.211.755.625 (APBD dan DAK).

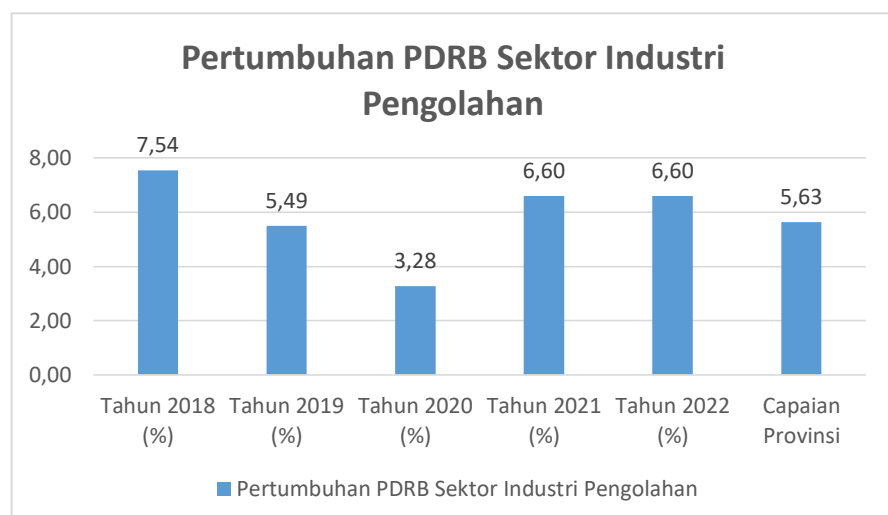
2. Guna mendorong tumbuhnya perekonomian dari lapangan usaha kategori konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan biaya pembangunan fisik infrastruktur prioritas untuk mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah khususnya infrastruktur untuk mendukung peningkatan pembangunan pertanian, pariwisata juga infrastruktur pelayanan dasar lainnya. (Dinas PUPR)
3. Guna mendorong tumbuhnya perekonomian dari lapangan usaha kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sehingga mampu meningkatkan sebesar 9,83%, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bekerjasama dengan BPJS menganggarkan untuk kegiatan JKN.

3. Tujuan 3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan:
Didukung oleh 7 sasaran, yakni :

Sasaran ke 1 :

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.

- a. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan



*capaian tahun 2022 menggunakan angka capaian tahun 2021

Salah satu yang menjadi tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, Artinya pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertumbuhan output regional yang dinyatakan dalam pendapatan perkapita yang mendorong kegiatan ekonomi lainnya dan pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta peluang berusaha dalam waktu jangka panjang.

Salah satu Sasaran dalam RPJMD yakni meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor industri pengolahan lingkup makro ekonomi daerah.

PDRB Sektor Industri Pengolahan pada skala makro pembangunan perekonomian daerah pada sektor industri pengolahan mempunyai Indikator yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dimana dari target pertumbuhan yang ditetapkan dapat tumbuh sebesar 7,50% pada tahun 2022 dengan realisasi tumbuh sebesar *6,60 % (BPS : PDRB ADHK 2021), adapun dalam pendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor Industri Pengolahan penyumbang *27,01 % dari total PDRB Kobar (BPS : PDRB ADHB 2021).

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2022 masih di diperkirakan akan tumbuh positif, dimana penyumbang terbesarnya berasal dari industri pengolahan kelapa sawit, permintaan pasar terhadap produksi hasil perkebunan kelapa sawit dan didukung dengan harga ditingkat petani maupun industri yang terus membaik mampu mendorong produksi industri CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia selain minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, minyak zaitun, minyak biji rami, minyak kelapa dsb.

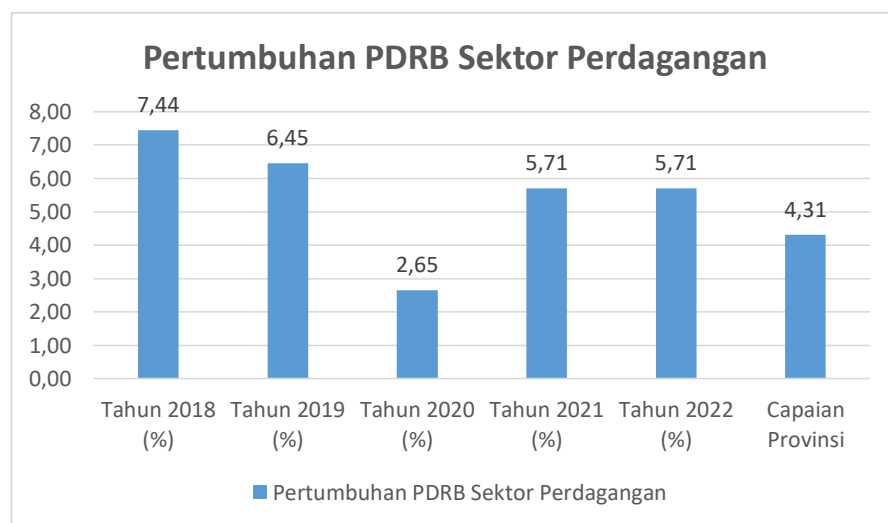
Konflik Rusia Ukraina yang terjadi saat ini cukup berpengaruh significant terhadap pemenuhan ketersediaan minyak nabati dunia dimana Ukraina dikenal sebagai produsen minyak bunga matahari terbesar di dunia yang disusul oleh Rusia di posisi kedua. Dengan terjadinya perang antara Rusia-Ukraina, maka produksi minyak bunga matahari menjadi turun drastis dan membuat jenis- jenis minyak nabati lainnya terutama minyak kelapa sawit menjadi jalan keluar untuk negara- negara yang bergantung pada minyak bunga matahari terutama bagi negara- negara uni eropa.

Penurunan pasokan minyak nabati yang bersumber dari bunga matahari dan kebutuhan masyarakat di dunia terhadap minyak nabati yang tinggi mendorong peningkatan permintaan minyak nabati lainnya seperti minyak kelapa sawit yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan produksinya.

Selain itu Permintaan kelapa sawit global juga terus meningkat walaupun dalam kondisi adanya kampanye negatif (black

campaign) terhadap produk minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) maupun produk-produk turunannya. Banyaknya jenis produk yang bisa dikembangkan menjadi berbagai produk turunan serta luasnya manfaat yang dapat digunakan oleh berbagai macam industri, sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Ratusan jenis produk turunan bisa dihasilkan dari CPO yang dibutuhkan oleh berbagai jenis industri dari berbagai negara dengan permintaan yang terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian negara tujuan utama ekspor, ini tercermin dari realisasi nilai export daerah yang tetap tumbuh positif sebesar 18,70 % atau senilai US\$ 818, 58 juta(Jan-Nov 2022) dibanding tahun 2021 senilai US\$ 689,63jt.

b. Persentase pertumbuhan PDRB Sektro Perdagangan



*capaian tahun 2022 menggunakan angka capaian tahun 2021

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan yang meningkat dan tercapai sesuai target menjadi indikator bahwa sektor ini berperan penting dalam perekonomian suatu daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengacu pada sub komponen dimana sangat tergantung pada beberapa aspek seperti tingkat konsumsi masyarakat, tingkat investasi, dan tingkat ekspor. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik, hal ini akan mendorong pertumbuhan perdagangan. Tingkat investasi yang tinggi juga akan menciptakan lapangan kerja baru, dan tingkat ekspor yang meningkat akan memperluas pasar produk lokal.

Perhitungan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan yang biasanya baru akan terbit pada akhir bulan Februari 2022 oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga data realisasi dan capaian kinerja berdasarkan indikator ini belum dapat disampaikan. Namun dengan melihat salah satu aspek perhitungannya dimana tingkat ekspor yang secara kumulatif tumbuh cukup tinggi sebesar 35,10% atau senilai lebih dari US\$ 913 juta, serta dengan mempertimbangkan Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang tumbuh di atas 7%, diperkirakan Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat juga akan tumbuh sekitar 6-9 %.

Selain sub komponen di atas, faktor-faktor seperti tingkat keterbukaan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur juga berpengaruh dalam mendukung pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi akan mempermudah akses produk lokal ke pasar internasional, sedangkan kebijakan pemerintah yang pro-industri dan pro-perdagangan yang semakin mudah dalam pemberian perizinan secara elektronik turut menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi perkembangan sektor perdagangan, serta

dukungan Infrastruktur juga masih dinilai sangat penting untuk terus ditingkatkan untuk mempermudah distribusi produk dan mempercepat proses produksi.

- c. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan.

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer dan Sektor Unggulan tidak mencapai target dengan nilai 2,62%. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan data sangat sementara yang diperoleh dari data tahun 2021, hal tersebut dikarenakan belum adanya rilis resmi dari BPS Kabupaten Kotawaringin Barat untuk data tahun 2022.

Realisasi capaian Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan diperoleh dari angka sementara rilis Tahun 2021 oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan masih di kisaran positif di angka 2,62% ******(data sangat sementara). Pertumbuhan sektor pertanian (pertanian, peternakan, perburuan dan jasa) pada tahun 2022 masih mencatat laju pertumbuhan yang positif (2,62%) di tengah krisis ekonomi akibat pandemic COVID 19 sehingga diharapkan sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu pendorong untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan produksi, penghasil devisa melalui ekspor produk turunan serta penyediaan lapangan kerja

Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan data produksi 2021 dan 2022 secara umum tidak mencapai target dikarenakan :

1. Secara umum dari data produksi seluruh komoditi tanaman pangan sampai dengan bulan Desember 2022 berdasarkan ATAP KSA sebesar total 11.213 ton mengalami penurunan sebesar (11%) dibandingkan dengan produksi tahun 2021 yaitu sebesar 12.695 ton , untuk data produksi seluruh komoditi hortikultura, dari 2022 sebesar 31.052,23 ton jika dibandingkan dengan data tahun 2021 yaitu sebesar 29.968 ton mengalami kenaikan sebesar 3,61%, sedangkan untuk produksi seluruh komoditi perkebunan rakyat (di luar PBS dan PBN) dari data 2022 sebesar 95.827 ton meningkat sebesar 1,82% jika dibandingkan dengan data tahun 2021 sebesar 94.124 ton
2. Kebijakan pemerintah pusat pada triwulan II 2022 untuk menghentikan ekspor CPO membuat harga TBS jatuh sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan sector perkebunan terutama kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kondisi iklim dan cuaca selama tahun 2022 dimana curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir pada sentra-sentra produksi

Faktor pendukung dalam pencapaian target produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah:

1. Komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah dalam pengembangan sektor pertanian dalam arti luas sebagai sektor unggulan dalam pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam membantu Ketersediaan sarana dan prasarana (pupuk, mekanisasi pengolahan lahan, sumber-sumber air yang tercukupi) yang berasal dari

bantuan yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN bidang pertanian, bidang kelautan dan Perikanan.

Sedangkan faktor penghambat dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Produksi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022 adalah

1. Ketergantungan terhadap sektor Perkebunan yang terlalu besar sehingga ketika terjadi gejolak harga komoditas perkebunan maka berpengaruh sangat besar pada PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan; Kebijakan pemerintah pusat pada triwulan II 2022 untuk menghentikan ekspor CPO membuat harga TBS jatuh sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan sector perkebunan terutama kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kurangnya minat generasi muda menggeluti profesi petani sementara generasi petani yang ada semakin menua.
3. Regenerasi tenaga penyuluh yang lambat dimana jumlah penerimaan penyuluh pertanian baru lebih sedikit dibanding dengan penyuluh pertanian yang pensiun/purna tugas;
4. Pendanaan petani yang lemah yang menyebabkan ketergantungan stimulant bantuan sarana produksi pertanian dalam usaha taninya.
5. Intensitas pemeliharaan rendah, karena pengetahuan budidaya petani yang masih minim, kemampuan pembiayaan untuk pemeliharaan yang kurang;
6. Produk komoditas petani belum memberikan nilai tambah yang maksimal karena hanya dijual dalam bentuk bahan mentah;
7. Keberadaan tanaman berumur tua/kurang produktif khususnya sawit, karet, kelapa, dan kopi.;

8. Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian dan Perkebunan yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk meningkatkan pencapaian target PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan dilakukan langkah antisipatif dan strategi untuk penyelesaian masalah yaitu sebagai berikut :

- a) Telah dilaksanakan focus pengembangan dan penguatan komoditas tanaman pangan sebagai komoditas pokok dan komoditas hortikultura sebagai penyangga inflasi dan alternatif untuk meningkatkan ekonomi melalui APBD dan APBN Tahun 2022.
- b) Telah dilaksanakannya penyuluhan pertanian secara intensif baik secara luring dan daring ke kelompok tani/GAPOKTAN perihal GAP (Good Agriculture Practice) sebagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
- c) Telah dilaksanakan pendampingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian ke kelompok pengolahan hasil pertanian berupa Unit Bangunan Pengolahan Hasil Hortikultura yang difasilitasi 2 unit, Penyediaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan yang difasilitasi 11 unit (RMU 3 unit dan Power Thresher 8 unit), Pelatihan panen, pasca panen dan pemasaran porang bekerjasama dengan BPTP Propinsi Kalimantan Tengah 40 orang, Pengembangan Unit Rumah Produksi Hortikultura yang difasilitasi 2 unit, Bantuan Sarana UPPB Karet yang difasilitasi 1 unit
- d) Telah dilaksanakan Replanting tanaman perkebunan rakyat yang sudah tidak produktif melalui skema PSR dari BPPDKS Kementerian Pertanian

- e) Telah dilakukan Review RTRW serta regulasi penyelesaian tumpang tindih serta keterlanjuran perkebunan dalam areal kawasan hutan
- f) Diversifikasi komoditi unggulan baru pertanian sebagai alternatif Kepala Sawit;
- g) Melakukan pendampingan kepada kelembagaan petani secara lebih intensif untuk pengelolaan dana bergulir melalui skema pembiayaan petani agar petani lebih mandiri dalam pembiayaan usaha taninya;
 - a. Mendorong *stakeholder* terkait untuk penumbuhan investasi hilirisasi industri pengolahan pertanian terutama sektor perkebunan untuk lebih meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - b. Mendorong petani agar menerapkan *integrated farming* pada usaha taninya sehingga sumber pendapatan petani tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja;
 - c. Penumbuhan Petani Milenial untuk penguatan sumber daya manusia bidang pertanian dengan memberikan stimulus berupa pendidikan dan pelatihan vokasi bidang pertanian, fasilitasi pembelajaran melalui demplot tentang teknik budidaya dan pasca panen, pengawalan akses KUR, pengukuhan Duta Petani Milenial dan/atau Petani Andalan, Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP), penguatan korporasi petani
 - d. Menambah personil penyuluhan pertanian untuk lebih menjangkau dan memaksimalkan pendampingan petani.
 - e. Mendorong penerapan sertifikasi pengelolaan perkebunan berbasis yuridiksi dan standarisasi produk perkebunan

PDRB sektor Perikanan menyumbang 6,30 % (data sektor perikanan tahun 2021) dari total agregat PDRB Sektor

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan sehingga Laju Pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh PDRB sektor Perikanan. Mekanisme Pengumpulan data diperoleh dari BPS dengan sumber data berasal dari Dinas Perikanan untuk data produksi ikan hasil budidaya dan produksi tangkapan. Meningkatnya angka produksi perikanan sangat berpengaruh pada pencapaian realisasi PDRB sektor perikanan, dimana jumlah produksi perikanan tiap tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat dihitung dengan mengkonversikan jumlah produksi perikanan tangkap dengan jumlah produksi perikanan budidaya. Perikanan budidaya yaitu jumlah hasil produksi perikanan budidaya yang meliputi; perikanan tawar, payau, dan laut, sedangkan produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang terdiri dari laut dan perairan umum. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2022 realisasinya sebesar 30.185,802 ton/tahun dari target 28.879,33 ton/tahun atau mencapai 104,52%, sedangkan produksi perikanan di tahun 2021 sebesar 28.676,13 ton/tahun dengan target 26.676,08 ton/tahun atau capaian 107,49%.

Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan:

1. Memberikan Bantuan Langsung Masyarakat Sarana Prasarana Penangkapan berupa Kapal beserta peralatan alat tangkap untuk meningkatkan tangkapan ikan
2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat kelompok nelayan tentang penggunaan alat tangkap
3. Memberikan bantuan langsung masyarakat berupa benih ikan dan pakan untuk pembudidaya ikan dalam meningkatkan produksi benih ikan

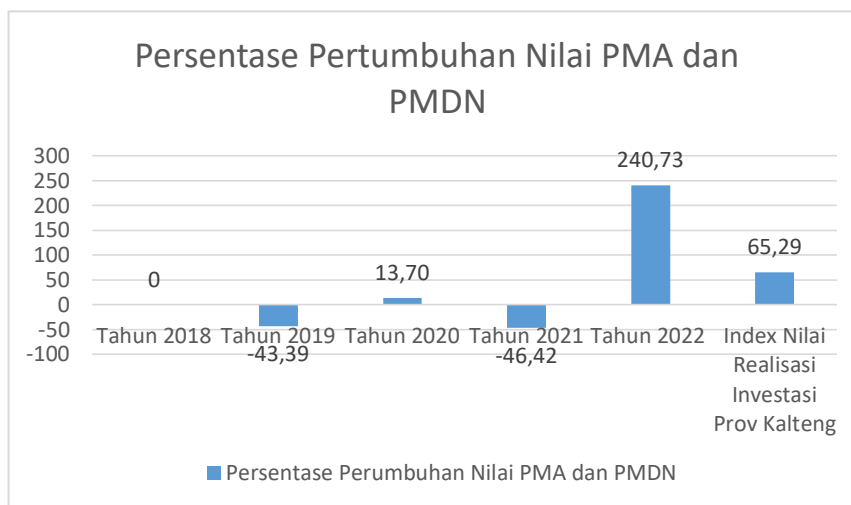
4. Memberikan bantuan langsung masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan berupa pengadaan alat pengolah ikan
5. Memberikan pelatihan manajemen usaha pemasaran hasil perikanan kepada kelompok UMKM sektor perikanan
6. Melaksanakan program dan kegiatan agar berjalan efektif, peningkatan SDM pembudidaya ikan/nelayan dan aparatur sehingga mengetahui peran dan fungsinya
7. Perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program sehingga tercapainya indikator kinerja dari hulu sampai hilir (dari proses penangkapan ikan sampai proses pemasaran untuk di konsumsi)

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai sasaran kinerja:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya melalui sistem budidaya kolam terpal dengan menggunakan teknologi CAS
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, menambah armada, alat tangkap, mesin dan GPS serta menambah trip dalam penangkapan ikan untuk meningkatkan produktivitas tangkapan ikan
3. Pengembangan kemitraan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan rantai produksi dari bisnis kelautan dan perikanan nelayan dan pembudidaya, mulai hulu hingga hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait
4. Pendampingan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku perikanan dalam peningkatan hasil produksi perikanan

Sasaran ke 2 :

- Meningkatkan Pengembangan Potensi Daerah
 - a. Persentase pertumbuhan nilai PMA dan PMDN



Sasaran RPJMD persentase nilai PMA dan PMDN Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 2017-2022 menunjukkan tabel yang fluktuatif. Pada awal RPJMD tahun 2018, prosentase nilai PMA dan PMDN Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan dikarenakan adanya perusahaan masih terhambat dalam merealisasikan investasi serta tidak ada tambahan realisasi dikarenakan dampak dari situasi pandemi Covid-19. Tahun 2022 mulai ada kenaikan pertumbuhan nilai realisasi investasi namun di tahun 2021 terjadi lagi penurunan yang signifikan disebabkan beberapa pelaku usaha belum memahami perubahan sistem OSS versi 1.1 ke OSS- RBA sehingga mempengaruhi proses pelaporan LKPM online. Di tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan disebabkan adanya intensitas koordinasi dan komunikasi dengan pelaku usaha dan intensitas pendampingan pelaporan LKPM pada periode LKPM. Indeks prosentase nilai PMA dan PMDN yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 di Kalimantan Tengah adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	Terlampir	%	n/a	-43,39	13,70	2,19	-46,42	-46,42	2,20	240,73	240,73	LKPM
Rata-rata Capaian Kinerja									-46,42			240,73	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Formulasi perhitungan realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pertumbuhan nilai} &= \frac{\text{Realisasi tahun evaluasi} - \text{Realisasi tahun sebelum evaluasi}}{\text{Realisasi PMA dan PMDN sebelum evaluasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{12.617.305 - 3.702.945}{3.702.945} \times 100\% \\
 &= \mathbf{240,73}
 \end{aligned}$$

Sumber: Data diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka peningkatan Pertumbuhan nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Membuka layanan khusus konsultasi dan pendampingan pengisian LKPM online baik ketika Pelaku usaha/pengusaha datang ke Kantor maupun saat Petugas DPMPTSP melaksanakan Pemantauan, pembinaan dan

- pengawasan ke lapangan terhadap Perusahaan baik PMA/ PMDN.
2. Melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha/ Pengusaha terkait sistem OSS dan sistem LKPM online dengan dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek OSS RBA dan LKPM Online terhadap perusahaan baik PMA dan PMDN.
 3. Melakukan Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/ pengusaha terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan (CSR, Kemitraan, Pelaporan dan tanggung jawab terhadap lingkungan) dengan melaksanakan kunjungan langsung terhadap Perusahaan baik PMA/ PMDN.
 4. Membuka layanan khusus Hallo PTSP untuk memfasilitasi dan pendampingan pengurusan perizinan kepada investor yang masih mengalami kesulitan/ kebingungan terhadap aplikasi OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA.
 5. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi daerah melalui website, media sosial dan video profil investasi persektor.
 6. Melakukan penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah dalam rangka kemudahan berusaha, melalui pembuatan Ranperbup Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ranperbup Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (sudah di sampaikan Ke Provinsi Kalimantan Tengah)

BAB II CAPAIAN KINERJA



Ket : Kegiatan Pemantauan terhadap Perusahaan



Ket : Sosialisasi & Bimtek OSS RBA dan LKPM terhadap Pelaku Usaha baik PMA maupun PMDN

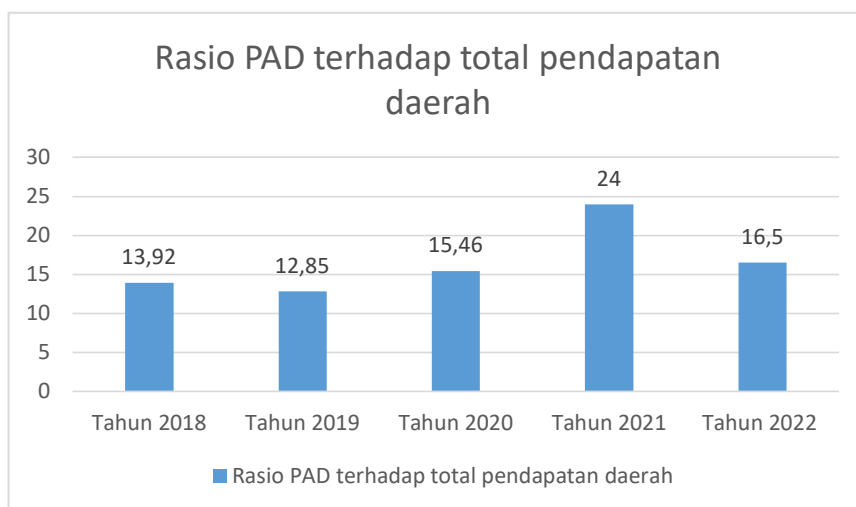


Ket : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Proyek Kegiatan Usaha PMDN.



Ket : Dokumentasi Buku Data Potensi Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

b. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah		%	13,92	12,85	15,46	11,96	24	200,67	12	16,50	137,50	
Rata-rata Capaian Kinerja									200,67			137,50	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nilai realisasi **Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah** diperoleh dari :

$$\text{Rasio Tahun 2022} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Pendapatan total}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Tahun 2022} &= \frac{233.199.840.082,25}{1.412.988.744.132,12} \times 100\% \\ &= 16,50\% \end{aligned}$$

Hasil pengukuran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah di tahun 2022 menunjukkan angka 16,50 % atau PAD memberi kontribusi sebesar 16,50 % dari total Pendapatan dari 12% yang ditargetkan di Tahun 2022. Angka ini akan terus ditingkatkan agar daerah dapat beranjak semakin mandiri.

Kode	URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN	1.408.348.703.600,00	1.412.988.744.132,12	100,33	1.633.972.466.127,94
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	283.646.085.100,00	233.199.840.082,25	82,22	392.164.379.004,55
4.1.01	Pajak Daerah	97.150.000.000,00	81.325.367.307,70	83,71	70.389.757.706,05
4.1.02	Retribusi Daerah	28.048.063.900,00	15.128.115.054,00	53,94	12.611.932.516,30
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.970.000.000,00	12.940.075.581,00	99,77	12.470.117.812,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	145.478.021.200,00	123.806.282.139,55	85,10	296.692.570.970,20

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari ke empat komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen tersebut yang dominan dan menunjang tercapainya target PAD adalah Lain-lain PAD yang sah.

Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai target, hal tersebut dipengaruhi oleh:

1. Pengoptimalan Potensi PAD dengan optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada di Daerah;
2. Melakukan Koordinasi dan evaluasi dengan seluruh SKPD pengelola PAD.

Capaian Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 secara umum tercapai sesuai target perubahan APBD. Faktor pendukung dalam pencapaian target rasio PAD terhadap total pendapatan daerah adalah :

1. Inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam mengoptimalkan PAD baik itu pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak daerah dengan adanya pembaruan sistem dengan pembayaran secara Online seperti E-SPPT, Simpeda, Info_Pajak, E-BPHTB, serta Monitoring Pajak.
2. Komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak baik itu dengan Kantor Pajak Pratama maupun Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan kerja khususnya yang berkenaan dengan Pajak Daerah;
4. Penyesuaian regulasi untuk menggali potensi yang baru



Ket : Top 99 inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Kemenpan RB



Ket : Rapat koordinasi pajak dengan desa/kelurahan se Kobar



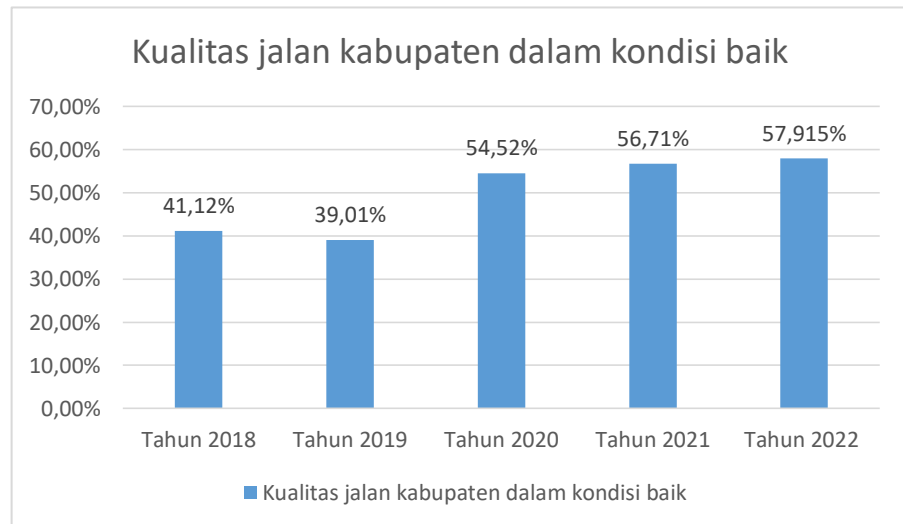
Ket : Pengecekan Dan Verifikasi Data Atas Objek Pajak Atas 6 Dokumen Yang Terdiri Dari Dokumen Penghapusan Bangunan, Penghapusan Nomor Objek Pajak Dikarenakan Penggabungan Dan Objek Pajak Ganda di Kecamatan



Ket : Monitoring ke desa-desa terkait pajak PBB-P2

Sasaran ke 3 :

- Meningkatkan Pemerataan Aksesibilitas Daerah Terkait Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi.
 - a. Kualitas jalan kabupaten dalam kondisi baik



BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Kualitas jalan kabupaten dalam kondisi baik		%	41,12	39,01	54,52	43,30	56,71	130,97	44,73	57,915	129,47	Dinas PUPR
Rata-rata Capaian Kinerja									130,97			129,47	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

- a) Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b) Jalan Kondisi Sedang adalah semua ruas jalandimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6-10 %). Kerusakan yang ada belum menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu - lintas.
- c) Kondisi Rusak adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10- 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus

berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.

- d) Kondisi Rusak Berat adalah semua ruas jalandimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Adapun kondisi panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jalan kondisi baik, sebesar 708,210 Km atau 57,915%
2. Jalan kondisi sedang, sebesar 234,674 Km atau 19,191%
3. Jalan kondisi rusak ringan, sebesar 185,428 Km atau 15,164%
4. Jalan kondisi rusak berat, sebesar 94,533 Km atau 7,731%

Berdasarkan grafik kualitas jalan kabupaten dalam kondisi baik sebagaimana disajikan diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 41,12% atau sepanjang 502,833 Km. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,11% dimana realisasi kondisi jalan baik hanya sebesar 39,01% atau sepanjang 477,070 Km , hal tersebut dikarenakan adanya perubahan metode survey dan persepsi terhadap penentuan kondisi jalan. Metode sebelumnya yang digunakan adalah metode IRI, sejak 2019 yang digunakan adalah metode RCI yang digabungkan dengan metode SDI sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR.

Pada Tahun 2020 realisasi kondisi jalan baik adalah 54,52% atau 666,730 Km, dari realisasi tersebut menunjukkan adanya

peningkatan sepanjang 189,660 Km atau sebesar 15,51% terdiri dari perkerasan jalan aspal, beton dan latrit (termasuk *output* pelaksanaan Konsorsium tahap III dan IV Konsorsium Gaya Baru) dari total panjang jalan Kabupaten Kotawaringin Barat 1222,845 Km, Jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2019 dan 2020, kondisi Jalan Baik pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,76%, dari target sebesar 43,30% terealisasi sebesar 56,71% atau 693,554 Km dan di akhir masa RPJMD yakni Tahun 2022, kualitas jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sebesar 57,91% atau 708,210 Km, meningkat sebesar 1,2% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021.

Faktor pendukung tercapainya kualitas jalan kabupaten dalam kondisi baik diantaranya adalah komitmen Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat dalam mewujudkan kualitas kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik dengan pekerjaan kontraktual serta melakukan berbagai inovasi berupa lanjutan pelaksanaan kegiatan Konsorsium. Hal tersebut dilaksanakan melalui beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan rapat kordinasi lintas instansi, lintas pemerintahan;
2. Membuat usulan penanganan jalan ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat;
3. Melakukan pemeliharaan jalan;
4. Mengoptimalkan kinerja SATGAS dalam penanganan lobang di jalan (gerakan nol lobang jalan);
5. Melibatkan peran dunia usaha/swasta dalam ikut serta pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Adapun strategi/langkah antisipatif yang telah dilakukan untuk tercapainya kualitas jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah :

1. Melakukan pendekatan ke dunia usaha/swasta dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada Tanggal 22 Maret 2022 telah dilaksanakan penandatanganan MoU dan MoA Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pola CSR Konsorsium dalam rangka mendukung peningkatan kualitas infrastruktur jalan (jalan kondisi baik) Acara dihadiri oleh Bupati Kotawaringin Barat, Kepala Perangkat Daerah dari instansi terkait serta pihak-pihak lainnya yang ikut serta dalam pelaksanaan CSR.
2. Gerakan Nol Lobang. Merupakan salah satu gerakan dalam menjaga jalan agar tetap dalam kondisi baik melalui kegiatan pemeliharaan rutin meliputi tambal sulam / *patching*, penanganan darurat / timbunan agregat / laterit dan pekerjaan lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Jalan dan didukung oleh Personil Dinas PUPR



Ket : Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Kemenpan RB



Ket : Gerakan 0 Lobang di Kabupaten Kotawaringin Barat

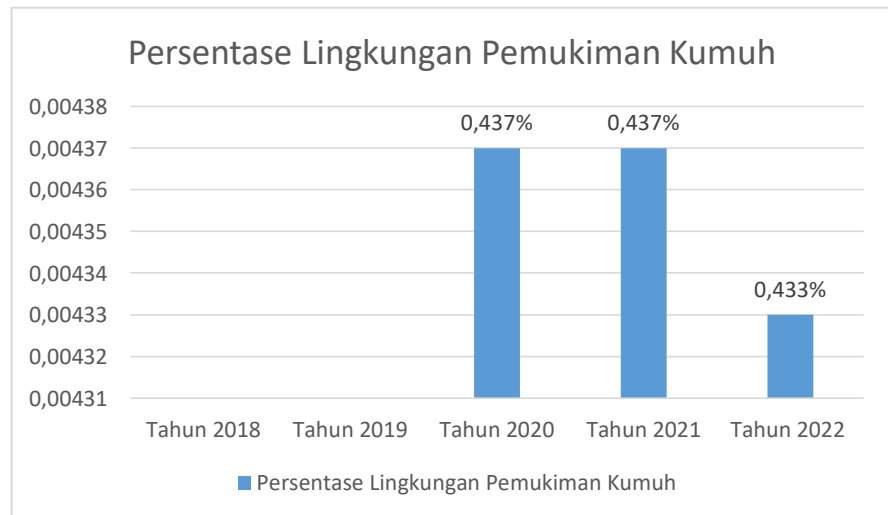


Ket : Rekonstruksi jalan, *befor and after*



Ket : Pada Tanggal 1 Juni 2022 telah dilaksanakan penandatanganan berita acara hasil pekerjaan pemeliharaan jalan melalui program konsorsium (CSR)

b. Persentase lingkungan pemukiman kumuh



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh		%	n/a	n/a	0,437	0,475	0,437	108,81	0,471	0,433	108,03	Dinas Perkim
Rata-rata Capaian Kinerja									108,81			108,03	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan terkait penanganan kawasan kumuh ini mulai dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022. Nilai realisasi capaian **Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh** diperoleh dari $(\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh} \times 100\%) / \text{Luas Wilayah}$, dari data luas awal kawasan kumuh yang tertuang pada SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/1819/PERKIM.III/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yaitu seluas 4.696,733 Ha.

Berdasarkan identifikasi dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan wilayah kumuh yang dilakukan, diperoleh data pengurang luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 34,87 Ha, sehingga total luas kawasan permukiman kumuh sampai dengan Desember 2022 tersisa 4.661,863 Ha dari Luasan Awal, adapun wilayah yang tertangani pada tahun 2022 berada di Kecamatan Arut Selatan yaitu Kelurahan Raja, Kelurahan Baru, Kelurahan Mendawai, dan Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Kumai yaitu Kelurahan Kumai Hulu dan Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Pangkalan Banteng di Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan

Lada di Desa Sungai Melawen, Kecamatan Kotawaringin Lama di Kelurahan Kotawaringin Hulu dan Kotawaringin Hilir, dan Kecamatan Arut Utara di Kelurahan Pangkut. Target RPJMD dan RENSTRA SKPD ini merupakan target menurun dengan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut; $\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh} \times 100\% / \text{Luas Wilayah}$. Sehingga realisasi lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,433% dari target 0,471% dan persentase capaian kinerja 108,03% yaitu melebihi dari target yang ditetapkan, dengan asumsi persentase lingkungan permukiman kumuh dalam suatu wilayah semakin rendah maka menunjukkan bahwa kualitas kawasan permukiman kumuh pada daerah tersebut semakin baik/ bagus.

Analisis Faktor pendukung tercapainya Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh antara lain :

- 1) Adanya sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat terkait lingkungan sehat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan permukimannya di 5 kecamatan. Selain itu juga telah dilaksanakan sosialisasi dengan pengembang perumahan terkait penanganan PSU maupun asset PSU Perumahan.
- 2) Adanya peningkatan kualitas jalan lingkungan pada wilayah permukiman kumuh melalui kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun yang dilaksanakan oleh Dinas terkait lainnya.
- 3) Tingginya swadaya masyarakat untuk berperan serta dalam usaha penanganan kawasan permukiman kumuh, khususnya pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dimana pada tahun 2022 sebanyak 59 dengan dana stimulan per unit dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman sebesar Rp 20.000.000,- dan sisa dana pembangunan merupakan swadaya penerima manfaat.

- 4) Adanya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni khususnya di kawasan permukiman kumuh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK APBN) dengan dana stimulan per unit Rp 20.000.000,- dan tambahan dana pendamping APBD sebesar Rp 15.000.000,- per unit sehingga penerima manfaat mendapatkan total bantuan per unit sebesar Rp 35.000.000,- serta sisa dana pembangunan merupakan swadaya penerima manfaat.
- 5) Peran tokoh masyarakat, kepala desa dan aparatur desa dalam memfasilitasi kegiatan sehingga menghidupkan semangat gotong royong dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh.
- 6) Telah dilaksanakannya penyusunan dokumen RP2KPKP, RP3KP, Laporan Deliniasi, dan Naskah Akademik RP2KPKPK sebagai persyaratan dasar pengusulan kegiatan penanganan permukiman kawasan kumuh di tahun n+1.

Analisis Faktor penghambat dan kendala dalam pencapaian persentase lingkungan permukiman kumuh adalah :

- 1) Kurangnya komitmen, koordinasi dan sinergisitas terpadu terhadap semua instansi dalam mensukseskan program penuntasan/penanganan kawasan kumuh, dimana program kegiatan SKPD pengampu tujuh aspek penentu kawasan kumuh belum memiliki rencana kerja dan lokus yang sama.
- 2) Belum tersedianya database terkait kawasan kumuh dan rencana aksinya.
- 3) SK Kawasan kumuh yang ada belum merinci titik koordinat masing-masing daerah kumuh, sehingga penentuan kawasan kumuh yang akan ditangani menjadi terkendala.

Strategi pemecahan masalah

- 1) Melaksanakan penyusunan kajian-kajian dan penyusunan database penanganan permukiman kumuh secara integrative sebagai acuan rencana aksi dan pemenuhan persyaratan dokumen untuk dana APBN.
- 2) Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman dan peningkatan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh secara terpadu, sinergi dan berkelanjutan dalam rangka penanganan kawasan kumuh.
- 3) Peningkatan sosialisasi program penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai upaya membangun partisipasi dan usaha mandiri/swadaya masyarakat.
- 4) Peningkatan Komitmen dan koordinasi terpadu, dimana semua instansi terkait harus fokus dan memiliki rencana kerja yang sama dalam rangka mensukseskan program penuntasan/penanganan kawasan kumuh.
- 5) Penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.



BAB II CAPAIAN KINERJA

Ket : Penataan PSU di wilayah kec Kotawaringin Lama (lanjutan)



Ket : Rapat Pokja PKP pengentasan wilayah Kumuh



Ket : Peningkatan PSU kawasan Kumuh kelurahan mendawai seberang (lanjutan)

Ket : Penyerahan perbaikan rumah tidak layak huni di Kab. Kotawaringin Barat



Ket : Peningkatan RTLH



Ket : Peningkatan PSU kawasan Kumuh kelurahan mendawai seberang (lanjutan)

Indikator Kinerja Tujuan : Angka Kemiskinan

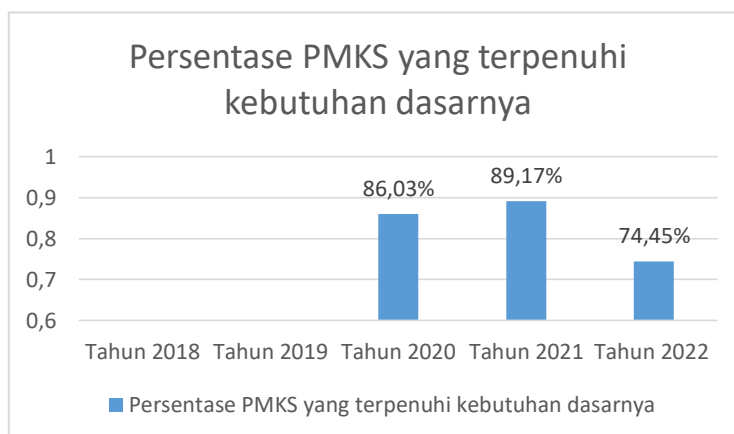


Peningkatan angka IPM sejalan dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 4,52 persen dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 3,39 persen pada tahun 2022. Meskipun hal tersebut merupakan hal yang menggembirakan namun pemerintah daerah harus tetap berupaya mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Penduduk Miskin dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami tren penurunan kecuali tahun 2021 yang mengalami kenaikan dibanding satu tahun sebelumnya. Terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Kotawaringin Barat sebanyak 10.231 jiwa di tahun 2021. Kenaikan ini diakibatkan adanya kenaikan harga bahan makanan dan nonmakanan serta adanya kebutuhan lainnya, seperti pembelian masker, handsanitizier, dan juga vitamin-vitamin. Kenaikan ini mengindikasikan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 masih harus dilanjutkan terlebih dalam masa pandemi COVID-19 dan patut menjadi perhatian pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran ke 4:

- Meningkatnya kesejahteraan PMKS
 - a. Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		%	n/a	n/a	86,03	70	89,17	127,38	73	74,45	101,98	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja									127,38			101,98	

Sumber: Data diolah oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rumus Pencapaian Kinerja : Meningkatnya kesejahteraan PMKS

$$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan dasarnya}}{\text{jumlah PMKS}} \times 100\%$$

Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memenuhi target, dikarenakan:

1. Pemberian logistik pada korban bencana alam (banjir dan angin puting beliung) dan bencana sosial (korban kebakaran) yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemberian Bantuan sosial dalam penanganan fakir miskin yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai dari kementerian sebanyak 8.491 KPM

dan tersalurnya bantuan sosial BBM sebanyak 450 juta yang di salurkan bagi tenaga kerja di bidang transportasi.

3. Tercapainya penyaluran alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebanyak 16 alat bantu yang sudah di salurkan ke masyarakat langsung.
4. Penyerahan bantuan sosial permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan gelandangan pengemis di kabupaten kotawaringin barat sebanyak 30 paket yang di berikan langsung ke penyandang.
5. Pemberian bantuan sosial bagi Usaha Ekonomi Produktif kelompok usaha bersama (UEP KUBE) sebanyak 16 UEP KUBE di Kabupaten Kotawaringin Barat

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja:
(penjelasan kinerja)

1. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam rangka pemutakhiran data
2. Membuat proposal pengajuan Corporate Social Responsibility (CSR) ke Perusahaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Menyediakan layanan pengaduan yang merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi pengaduan masyarakat yang mengadu ke Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Melakukan pendampingan dan perlindungan khusus bagi penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, dan Gelandangan Pengemis
5. Bekerja sama dengan lembaga – lembaga dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dokumentasi Kegiatan Dinas Sosial
Terkait Penyandang PMKS



Kegiatan Penyerahan Bantuan Banjir



Kegiatan penyediaan Permakanan Dapur Umum



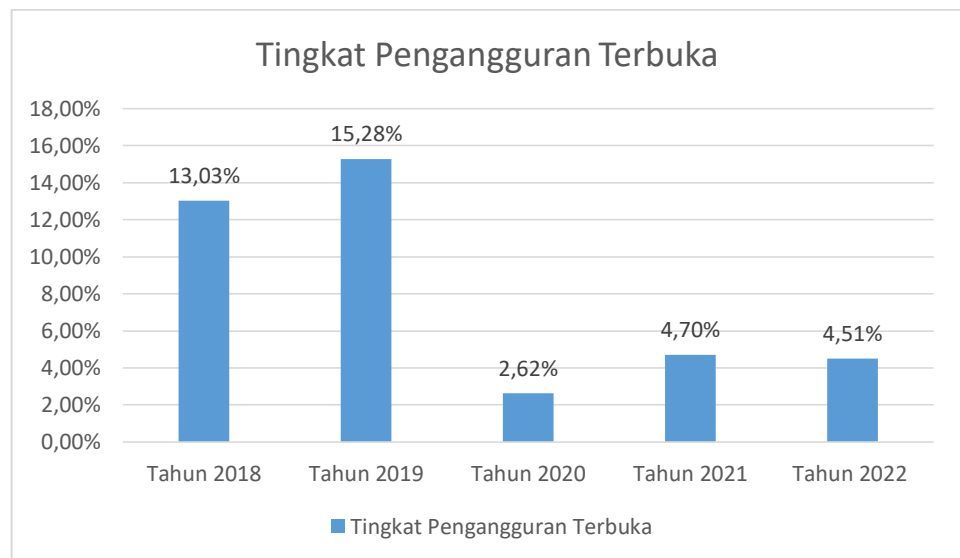
Penyerahan alat bantuan sosial kursi roda bagi Penyandang Disabilitas



Pemulangan Orang Terlantar ke desa/kelurahan asal

Sasaran ke 5:

- Menurunnya tingkat pengangguran
 - a. Tingkat pengangguran terbuka



BAB II CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka		%	13,03	15,28	2,62	2,61	4,70	55,53	2,5	4,51	55,65	Dinas Sosial
Rata-rata Capaian Kinerja									55,53			55,65	

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebesar 4,51% dengan capaian kinerja sebesar 55,65% atau kategori capaian Rendah. Jika dilihat dari tren selama 5 Tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan atau pengangguran semakin banyak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tidak mencapai target dikarenakan :

1. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga - lembaga pendidikan formal;
2. Meningkatnya jumlah pencari kerja, sedangkan pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai, akibatnya pengangguran semakin meningkat seiring dengan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja;
3. Kontribusi ekonomi global dan nasional yang belum pulih memaksa industri dan Usaha Mikro Kecil (UKM) melakukan penghematan (efisiensi);

4. Meningkatnya jumlah pencari kerja khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia sehingga mempengaruhi jumlah pengangguran di usia produktif;
5. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga – lembaga pendidikan formal.

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang penurunan tingkat pengangguran terbuka:

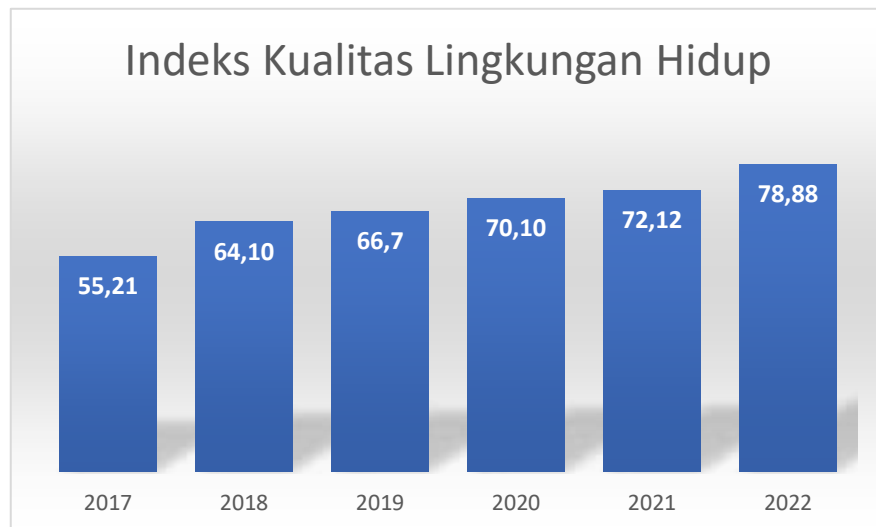
1. Mengadakan event Job Fair secara berkala ;
2. Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil menengah dan calon pelaku usaha serta mengadakan event untuk UMKM di Pangkalan Bun dan seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti : car free day, begoyap night market, Expo dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah terjadwal pada kalender event pariwisata Kobar.
3. Peningkatan investasi.

Perbaikan kinerja kedepan yang akan dilakukan:

1. Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan
2. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja;
3. Memberikan reward / insentif kepada perusahaan, industri dan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja;
4. Mendorong penciptaan wirausaha / lapangan kerja / kesempatan kerja baru; dan

5. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan agar lebih maju dan berkembang yaitu dengan memberikan stimulus berupa bantuan akses pinjaman kepada perbankan;
6. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar- besarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber : Laporan Rakordal Triwulan IV tahun 2022, Bappedalitbang Kab. Ktw. Barat

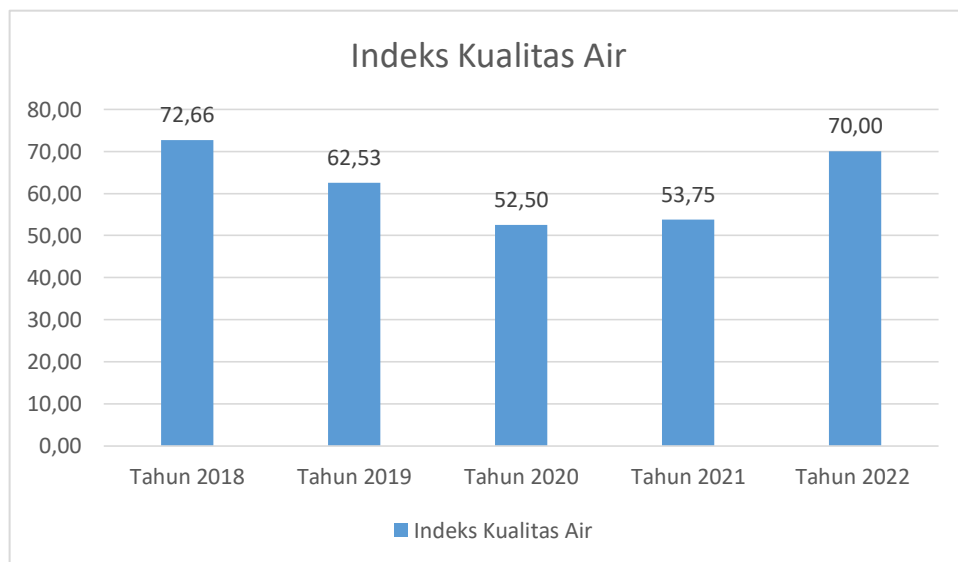
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/Pencemaran Air, Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Hutan/Lahan.

Dalam kurun waktu mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 memiliki tren positif yakni mengalami kenaikan setiap tahunnya. IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan pencapaian tujuan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sasaran ke 6:

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

a. Indeks Kualitas Air



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Kualitas Air		Nilai IKA	72.66	62.53	52.50	62	53.75	86,69	65	70.00	107.69	Laporan IKA
Rata-rata Capaian Kinerja									86,69			107.69	

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Surat Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor S.318/PPKL/SPT/REN.0/12/2020

Tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH Tahun 2020-2024.

Target Indeks Kualitas Air pada Tahun 2022 adalah 65 Nilai Indeks Kualitas Air. Data untuk pengukuran Indeks Kualitas Air diolah dari data hasil pemantauan kualitas air yang dilaksanakan per semester yaitu pada Semester I dan Semester II Tahun 2022 yang dilakukan pada 5 titik lokasi pemantauan, melalui pengambilan sampel air - Sungai Arut dengan lokasi A.1 = Desa Penyombaan, Kecamatan Arut Utara, A.2 = Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, A.3 = Jembatan Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan, A.4 = Jembatan Kotawaringin Lama, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, dan A.5 = Sungai Lamandau (Hilir Muara Sungai Arut). Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data tersebut diperoleh realisasi Indeks Kualitas Air pada Tahun 2022 adalah 70,00 dan menunjukkan nilai capaian sebesar 107,69%. Nilai tersebut diperoleh dari formulasi perhitungan di bawah ini :

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO3-N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$PIj = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2}{2}}$ <p>PIj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, R = rata-rata</p>

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan realisasi indeks kualitas air memenuhi target, hal ini disebabkan dari total

5 titik lokasi yang dilakukan 2 kali pemantauan dalam satu tahun dengan total 10 titik lokasi pemantauan berhasil memenuhi baku mutu air. Hal ini berdasarkan hasil analisa uji kualitas air yang dibandingkan dengan Kriteria Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dari 8 parameter pengujian baku mutu air sungai meliputi Padatan Tersuspensi (*Total Suspended Solids/TSS*), Derajat Keasaman (pH), Oksigen Terlarut (*Disolved Oxygen/DO*), *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Biological Oxygen Demand (BOD)*, Total Pospat, Nitrat, dan Fecal Coli memenuhi baku mutu air sungai Kelas II PP RI Nomor 22 Tahun 2021. Hal ini dikarenakan keberadaan jamban-jamban di area sungai berkurang, meningkatnya kesadaran masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan adanya petugas pengelola persampahan khusus di daerah bantaran sungai sebanyak 4 orang yang bertugas rutin setiap hari.

Dalam pencapaian indeks kualitas air hambatan dan kendala yang dialami adalah perlu adanya penyempurnaan sarana dan prasarana alat pemantauan kualitas air/ alat laboratorium pengambil sampel (*water sampler*) sehingga menghambat pelaksanaan pengambilan sampel air sungai, serta dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang belum memadai.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pencapaian Indeks Kualitas Air perlu dilakukan langkah antisipatif sebagai berikut :

- Pengendalian pencemaran air melalui pemantauan kualitas air sungai secara periodik/triwulan sehingga mewakili tiap musim dalam setahun.
- Peningkatan pengendalian pengelolaan limbah cair dan domestik dengan melakukan pembinaan kepada seluruh

masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, pemegang ijin industri baik sektor perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya yang berpotensi menghasilkan limbah, untuk mengolah limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air dengan cara memproses terlebih dahulu melalui IPAL yang dirancang sesuai dengan kondisi limbah masing-masing guna menghasilkan air limbah yang sesuai dengan baku mutu yang ditentukan.

- Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perijinan lingkungan hidup dengan melakukan pembinaan secara periodik guna meningkatkan ketaatan terhadap baku mutu serta pengawasan terhadap pembuangan limbah cair untuk penurunan beban pencemaran.
- Inventarisasi sekaligus sosialisasi terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan.
- Secara Pemerintah daerah secara bertahap akan membangun IPAL Komunal yang dipeuntukan khusus bagi UMKM yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan.

Strategi penyelesaian masalah yang dilakukan untuk mengendalikan indeks kualitas air adalah :

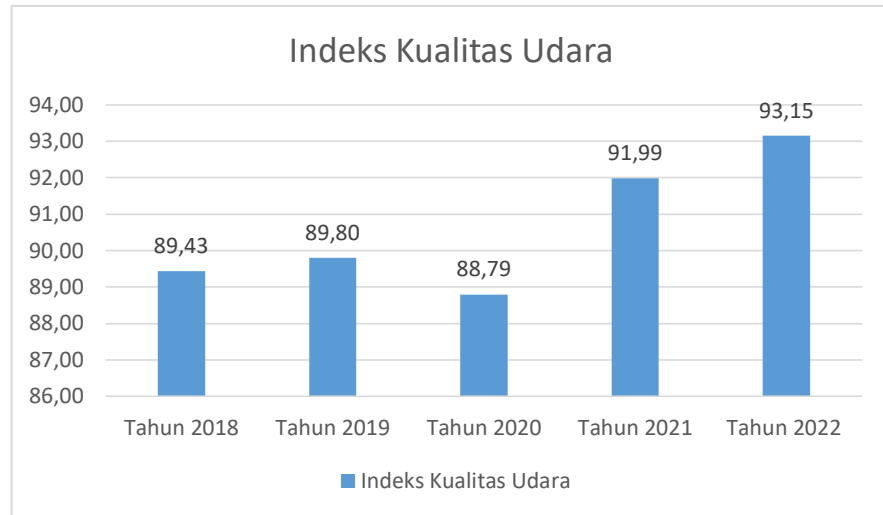
- Memperbaiki kualitas air melalui penurunan beban pencemar pada sumber pencemar, antara lain dengan cara pembersihan dan pengambilan sampah di bantaran sungai oleh petugas pengelola persampahan khusus di bantaran sungai serta melibatkan masyarakat setempat dan *stakeholder* terkait khusus di daerah permukiman.
- Peningkatan ketaatan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai

dengan ketentuan teknis dan perizinan yang telah ditetapkan. Peningkatan peran dunia usaha dilakukan dengan adanya pembinaan kepada para pelaku usaha yang menghasilkan limbah agar dapat berkomitmen untuk taat dalam pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan air limbah dalam bentuk ketaatan penyampaian laporan per semester ke Dinas Lingkungan Hidup.

- Pada tahun 2022 target pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik izin usaha dan/atau kegiatan sebanyak 28 pelaku usaha/kegiatan, dimana 21 pelaku usaha/kegiatan dinyatakan taat dan 7 pelaku usaha/kegiatan dinyatakan tidak taat. Pengawasan hanya dilakukan pada 28 pelaku usaha/kegiatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.
- Pembinaan dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus ditaati sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) .
- Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam ijin lingkungan dan perundang-undangan di bidang PPLH, pengawasan dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH dan/atau pengaduan masyarakat.
- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi, P3E Kalimantan, dan Kementerian LHK terkait penentuan titik pantau kualitas air (lokasi

pengambilan sampel air) dan memperdalam pemahaman terhadap penerapan SNI tentang tata cara pengambilan sampel dalam rangka pemantauan kualitas air sungai.

b. Indeks Kualitas Udara



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Kualitas Udara		Nilai IKU	89.43	89.80	88.79	69	91.99		72	93.15	129.38	Laporan IKU
Rata-rata Capaian Kinerja												129.38	

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂.

Indeks kualitas udara dihitung dari data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui mekanisme pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler yang dilakukan dengan APBN melalui mekanisme dekonsentrasi kepada provinsi.

Target Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 adalah sebesar 72 Nilai Indeks Kualitas Udara, pemantauan kualitas udara dilakukan per semester yaitu pada Semester I dan Semester II tahun 2022. Dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Indeks Udara IKLH} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (\text{Ieu} - 0,1) \right)$$

Sedangkan untuk nilai ieu didapat dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IEU, NO}_2 = [\text{NO}_2, \text{rata-rata}] / 40$$

$$\text{IEU, SO}_2 = [\text{SO}_2, \text{rata-rata}] / 20$$

$$\text{IEU} = \text{IEU, NO}_2 + \text{IEU, SO}_2 / 2$$

Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 dilakukan dengan 3 (metode) yakni:

1. Metode otomatis kontinyu

Metode otomatis kontinyu ini dilakukan dari peralatan Air Quality Monitoring System (AQMS) milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terletak di sudut Taman Kota Manis Pangkalan Bun dengan parameter PM₁₀, CO, dan SO₂. Sejak diresmikan pada Tanggal 20 Agustus 2020, AQMS selalu memberikan informasi perubahan data per hari

kepada masyarakat dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan kategori : baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya.

2. Metode manual aktif (3 titik lokasi)

Pemantauan kualitas udara ambien menggunakan metode manual aktif dilakukan di udara bebas di jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor yang dapat mewakili kualitas udara ambien di wilayah tersebut. Lokasi pengambilan sampling dipilih di tempat-tempat kritis, yaitu area/daerah perkotaan di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya di daerah Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Pasar Indrasari dan Bandara Iskandar. Pelaksanaan pemantauan udara ambien pada tahun ini direncanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan Metoda Manual, yaitu dilakukan dengan cara pengambilan sampel udara terlebih dahulu lalu dianalisis di laboratorium. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien meliputi pengukuran parameter lapangan dan pengambilan sampel udara menggunakan Impinger. Sampel udara yang diambil di lapangan kemudian dianalisis di laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi. Parameter yang diuji meliputi Sulfur dioksida (SO₂), Karbon monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂), Oksidan (O₃), Partikel <10µm (PM₁₀), Partikel <2,5µm (PM_{2,5}) dan TSP / Debu.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien di perkotaan Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat bagus di mana semua parameter masih memenuhi baku mutu yang

dipersyaratkan sesuai PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Metode passive sampler

Metode passive sampler adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) melakukan perhitungan Indeks Kualitas Udara Nasional dan Indeks Kualitas Udara Provinsi, dimana Indeks Kualitas Udara Nasional dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Udara Provinsi. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dibantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melakukan pemantauan mutu udara ambien dengan metode passive sampler.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, yang dilakukan pada 4 titik lokasi di wilayah industry, perumahan, perkatoran dan transportasi sebagai berikut:

1. Wilayah industri/agro industri :
P T. Korindo Ariabima Sari
2. Wilayah perumahan :
Perumahan Beringin Rindang
3. Wilayah perkantoran/komersial :
Kantor Kec. Arut Selatan
4. Wilayah transportasi :
Terminal Natai Suka

Dari hasil pemantauan dan pengukuran diperoleh rata-rata

NO₂ dan SO₂ sebesar 6,4012 dan 5,7325 sehingga nilai Indeks Kualitas Udara pada nilai 93,15. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 72 maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 129,38% dengan Kategori **Sangat Baik**.

Nilai realisasi Indeks Kualitas Udara mencapai target dikarenakan terjadi peningkatan kualitas udara yang dipengaruhi oleh pengendalian pencemaran udara serta faktor alam yaitu cuaca di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami musim hujan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya sehingga intensitas terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat relatif lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adanya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah industri (dalam bentuk gas) juga turut meningkatkan kualitas udara.

Dalam pencapaian indeks kualitas udara hambatan dan kendala yang dialami belum sempurnanya sarana dan prasarana alat pemantauan kualitas udara, untuk itu perlu penambahan parameter uji pada alat AQMS dan perlu penambahan alat AQMS untuk pengujian di titik lokasi selain taman kota (di 5 kecamatan lainnya selain Kecamatan Arut Selatan) serta perlu dilakukan pemantauan secara berkala/triwulan menggunakan metode manual aktif dan passive sampler untuk dapat merepresentasikan kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, selain itu perlu adanya dukungan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas dan anggaran yang

memadai.

Berdasarkan hal tersebut, langkah antisipatif adalah :

- Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan sebagai upaya pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- Inventarisasi emisi pencemaran udara dan penyusunan indeks kualitas udara yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan, strategi dan peraturan pengendalian pencemaran udara;
- Melakukan pemantauan udara dengan stasiun pemantau kualitas udara kontinyu (AQMS) pemantauan udara ambien yang digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan akses informasi kualitas udara (ISPU) bagi masyarakat;
- Perlu adanya kebijakan yang jelas terkait pengendalian pencemaran udara di daerah terutama yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di lahan-lahan bergambut. Dinas Lingkungan Hidup telah Menyusun dokumen RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut). Dokumen RPPEG yang ada pada saat ini belum dijadikan pedoman pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut, untuk itu diharapkan kedepannya dokumen RPPEG tersebut dapat menjadi pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

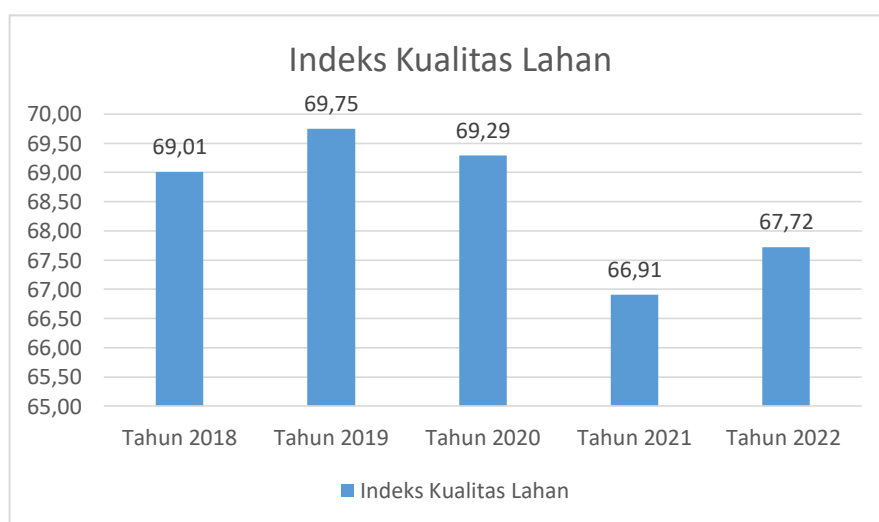
Strategi yang dilakukan untuk pencapaian indeks kualitas udara sebagai berikut:

- Membangun komitmen dengan seluruh stakeholder terkait pengendalian pencemaran udara di daerah. Melalui upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawab semua pihak baik

pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

- Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran udara tidak bergerak melalui evaluasi kinerja perusahaan sektor industry pertambangan, energi dan perkebunan.
- Antisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan stakeholder terkait meliputi BPBD dan Manggala Agni.

c. Indeks Kualitas Lahan



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Kualitas Lahan		Nilai IKL	69.01	69.75	69.29	65	66.91		67	67.72	101.07	Laporan IKL
Rata-rata Capaian Kinerja												101.07	

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan

kualitas lingkungan hidup. Metode perhitungan yang digunakan mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami.

Adapun parameter perhitungan IKL meliputi :

- a. Tutupan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder/bekas tebangan, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder/bekas tebangan, dan hutan tanaman
- b. Tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan
- c. Tutupan belukar dan belukar rawa pada Areal Penggunaan Lain (APL) namun berada pada fungsi lindung (kemiringan lereng >25% dan pada sempadan sungai, danau dan sempadan pantai)
- d. Tutupan berupa ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati).

Indeks Kualitas Lahan (IKL) ini merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan. Pada metode perhitungan sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan). Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi dimana

penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010).

Target Indeks Kualitas Lahan Tahun 2022 adalah 67 Nilai Indeks Kualitas Lahan dengan realisasi target sebesar 67,72 Nilai IKL dan persentase capaian sebesar 101,07%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kategori **Sedang**. Perolehan nilai realisasi dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

Rumus IKL (Indeks Kualitas Lahan) :

Tutupan Lahan : Provinsi/Kabupaten/Kota

$$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\left(\frac{LT}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

DKK = Σ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar

Faktor pendukung tercapainya Indeks Kualitas Lahan adalah karena adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang berupa pemeliharaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 43 RTH. Pengelolaan RTH dilakukan rutin setiap hari, dalam pengelolaannya DLH memiliki sebanyak 76 orang petugas RTH yang bekerja rutin setiap hari dan tersebar di 43 RTH tersebut yang meliputi plangson sepanjang 64,508 Km dan beberapa tugu/taman serta bundaran seluas 11,010 Ha. Selain itu, pada tahun 2022 ini telah disetujui usulan penunjukan Taman Hutan Raya (TAHURA) seluas \pm 4.609 Ha di Kec. Arut Selatan. Telah dilakukan pula penerapan dan monitoring serta evaluasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 6 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten

Kotawaringin Barat. Dimana dalam pasal 7 ayat (1) pengalokasian PAKLIK dalam ADD sebagai pemberian insentif kinerja berbasis lingkungan hidup dan kehutanan dan ayat (2) rincian ADD setiap desa se-kabupaten yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati harus mencantumkan ADD afirmasi dengan rincian 4% untuk pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau serta 2% untuk pengelolaan sumber daya air dan penanggulangan risiko bencana. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat kepada camat dan kepala desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Surat Edaran Nomor : 414.2/335/DPMD/.E/IX/2022 tentang Mekanisme Dana Desa dan Dana Transfer Lainnya ke Desa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Faktor penghambat dan kendala dalam pencapaian Indeks Kualitas Lahan adalah

- Adanya alih fungsi hutan dan lahan.
- Adanya bencana kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran seperti lahan gambut baik yang berada di lahan masyarakat maupun areal konsensi.

Berdasarkan hal tersebut, langkah antisipatif yang dapat dilakukan adalah

- Mempertahankan luasan tutupan hutan dan lahan baik yang berada di dalam maupun yang diluar Kawasan (APL).
- Memaksimalkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hutan dan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman dll.

Strategi dalam pencapaian indeks kualitas lahan sebagai berikut:

- Melakukan upaya peningkatan luas lahan pada hutan rawa primer dan semak/belukar serta mempertahankan dan meningkatkan kondisi tutupan lahan agar tidak mengalami penurunan kualitas seperti kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai kebakaran hutan/lahan dan rehabilitasi hutan/lahan, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta mempertahankan keberadaan tutupan hutan/lahan yang tumbuh secara alami di luar Kawasan hutan (APL).

d. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Gerakan Ecobrick

Gerakan ecobrick ialah salah satu cara untuk menunda residu sampah dibuang ke lingkungan. Ecobrick adalah metode untuk meminimalisir sampah dengan media botol plastik yang di isi penuh dengan sampah anorganik hingga benar-benar keras dan padat. Tujuan ecobrick sendiri adalah untuk mengurangi sampah plastik, serta mendaur ulangnya dengan media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna. Contoh pemanfaatannya adalah untuk pembuatan meja, kursi, tembok, maupun barang kesenian lainnya yang bahkan memiliki nilai jual. Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai ecobrick sejak tahun 2019 dan hingga saat ini gerakan ecobrick ini tetap berjalan.



Gambar 1. Sosialisasi pemanfaatan limbah plastic menjadi produk bernilai ekonomis

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

2. BATIK (Batako Plastik)

Batik (batako plastik) merupakan pemanfaatan sampah plastik dalam upaya pengurangan sampah. Dari sampah menjadi berkah Inovasi batik / batako plastik sesuai dengan salah satu kategori KIPP yakni bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan ini selaras dengan prinsip 3R yaitu Recycle berarti mendaur ulang barang barang yang sudah tidak bisa digunakan, dalam upaya mengurangi sampah plastik, menciptakan lapangan kerja baru, menjadikan sampah plastik sebagai sumber ekonomi baru. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Bank Sampah Berkah Jaya Plastindo melaksanakan sosialisasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RT kelompok PKK, Kelompok Pengajian.



Gambar 2. Sosialisasi pembuatan BATIK (Batako Plastik)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

3. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PAKLIK)

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang telah memiliki/menerbitkan Perbup PAKLIK. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PAKLIK), dengan indikator ekologi yaitu pengelolaan persampahan, pengelolaan sumber daya air, Ruang Terbuka Hijau, dan pengelolaan risiko bencana. Konsep PAKLIK mereformulasi ADD proporsional dengan indikator luas wilayah menjadi indikator ekologi alokasi afirmatif dan kinerja. Diharapkan dengan reformulasi ADD akan memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam melakukan supervisi dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan hidup.

e. Penghargaan yang diraih

Penghargaan lingkungan hidup yang diraih pada tahun 2022 meliputi penghargaan adiwiyata mandiri, penghargaan adiwiyata provinsi dan penghargaan adiwiyata kabupaten. Pada tahun 2022 ini dari 19 sekolah yang di usulkan untuk program penghargaan adiwiyata, dan yang memperoleh penghargaan adiwiyata sebanyak 15 sekolah, sebagai berikut:

1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten yang diusulkan 6 sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan 6 Sekolah.
2. Sekolah Adiwiyata Provinsi yang diusulkan 9 sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan 8 Sekolah.
3. Sekolah Adiwiyata Mandiri yang diusulkan 4 sekolah, yang berhasil memperoleh penghargaan 1 sekolah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/381/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, 8 sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata provinsi meliputi SDN 1 Pandu Senjaya, SDN 2 Karang Mulya, SDS 015 Best Agro, SDS 02 Bangun Jaya, SDS 1 Wana Sawit, SMPS Bumitama, SPMS 10 Best Agro dan SMAN 1 Kumai.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1177/MENLHK/P2SDM/SDM.2 tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2022, sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata mandiri adalah SMP Astra Agro Lestari.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 188.45/11/DLH/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, 6 sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan

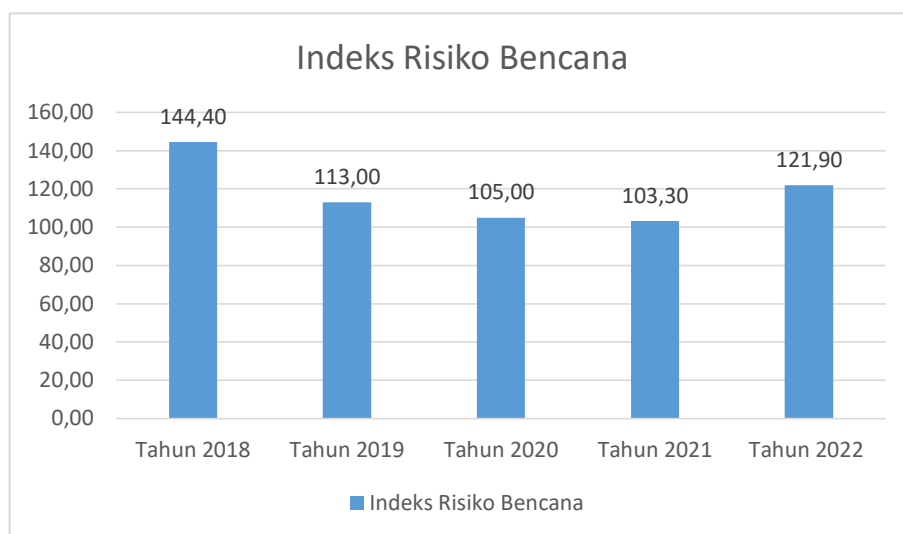
sekolah adiwiyata diantaranya yaitu SDN 1 Sungai Kapitan, SMPN 5 Kumai, MTSN 2 Kotawaringin Barat, SMPN 1 Pangkalan Banteng, SDN Karang Mulya dan SDN 1 Sungai Melawen.



*Gambar 3. Sekolah peraih penghargaan adiwiyata kabupaten
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat*

Sasaran ke 7 :

- Menurunnya risiko bencana
 - a. Indeks risiko bencana



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Risiko Bencana		Nilai IKL	144.40	113	105	87	103,3	118,73	80	121.90	66	inaRisk
Rata-rata Capaian Kinerja									118,73			66	

Pengukuran nilai Indeks Risiko Bencana Target dilakukan secara mandiri melalui Aplikasi inaRISK yang dikelola oleh BNPB, dimana setiap daerah memiliki user tersendiri untuk mengakses aplikasi tersebut. Penilaian dilakukan secara mandiri dengan menjawab kuisisioner penilaian Kapasitas Daerah dan menguplod bukti dokumen pendukungnya.

Pada awal RPJMD tahun 2017 penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kotawaringin Barat belum dilaksanakan sehingga nilai IRB masih mengacu pada tahun 2015 yaitu 144. Pada tahun 2019 dilakukan Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk

menghitung nilai IRB Kabupaten Kotawaringin Barat, karena situasi pandemi COVID-19 Nilai IRB belum diverifikasi BNPB. Pada tahun 2021 nilai IRB Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 133,58, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 121,90, dengan demikian kinerja BPBD mengalami peningkatan jika dibanding dengan kinerja tahun 2021.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2022 yaitu :

- Meningkatkan layanan informasi rawan bencana melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, penyebaran informasi rawan bencana melalui pemasangan spanduk, baleho dan penyebaran pamflet.
- Mengikatkan layanan kesiapsiagaan melalui aktifasi posko siaga bencana di Pusdalops PB, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- Meningkatkan layanan pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana melalui kegiatan respon cepat darurat bencana.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 atau target akhir tahun RPJMD sebesar 80, maka kinerja penurunan IRB tahun 2022 mencapai 66% dengan katagori **sedang**. Capaian kinerja penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) tidak mencapai target RPJMD dikarenakan :

- Kurangnya koordinasi lintas instansi yang terlibat dalam penyiapan data dukung yang diperlukan dalam penilaian Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana melalui aplikasi inARISK.
- Dokumen KRB dan RPB belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat dan instansi terkait yang terlibat dalam

penanggulangan bencana, dokumen KRB dan RPB belum mempunyai legalitas.

- Belum tersedianya dokumen Rencana Kontijensi perjenis ancaman bencana.
- Belum dilaksanakan Pelatihan, Gladi/Simulasi bagi penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- Sistem informasi bencana kabupaten belum terintegrasi dengan sistem informasi bencana nasional (Pusdalops BNPB).

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang penurunan Indeks Risiko Bencana :

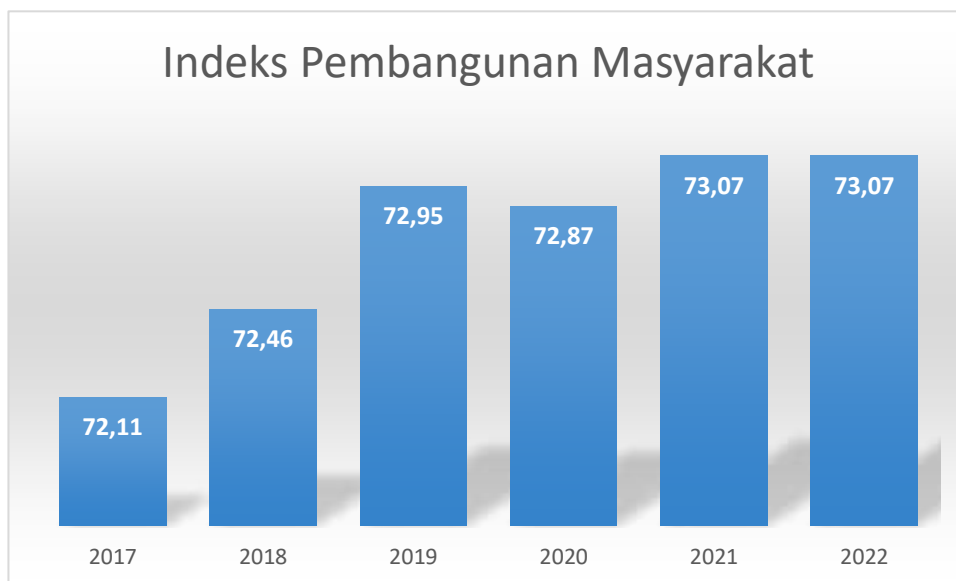
- Mengadakan FGD penyusunan dokumen penilaian Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana secara berkala.
- Menyusun peta risiko, peta kerentanan dan kajiannya melalui Kajian Risiko Bencana.
- Menyusun Dokumen Rencana Kontijensi.
- Melaksanakan pelatihan penanggulangan bencana (Gladi/Simulasi) sesuai dokumen rencana kontijensi yang disusun.
- Meningkatkan efektifitas Pusdalops PB dengan melakukan penataan struktur kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan sarpras pusdalops PB.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk menurunkan Nilai Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

- Melakukan FGD penilaian Indeks Kapasitas Daerah melibatkan SKPD terkait dengan narasumber dari BNPB.
- Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana.

Tujuan 4 : Mewujudkan Pembangunan Sosial Dan Toleransi Masyarakat Pluralis

Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Pembangunan Masyarakat



Sumber : BPS Kab. Ktw. Barat, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka IPM Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 73,07. Angka tersebut meningkat 0,20 poin atau 0,27 persen dari angka IPM tahun 2020, dimana nilainya sebesar 72,87. Hal tersebut tak lepas dari usaha pembangunan kualitas manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tergambar dari peningkatan angka IPM dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Kotawaringin Barat masih sebesar 72,11. Sampai dengan tahun 2021 IPM Kotawaringin Barat sebesar 73,07. Peningkatan IPM mencapai 0,96 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia sudah cukup baik.

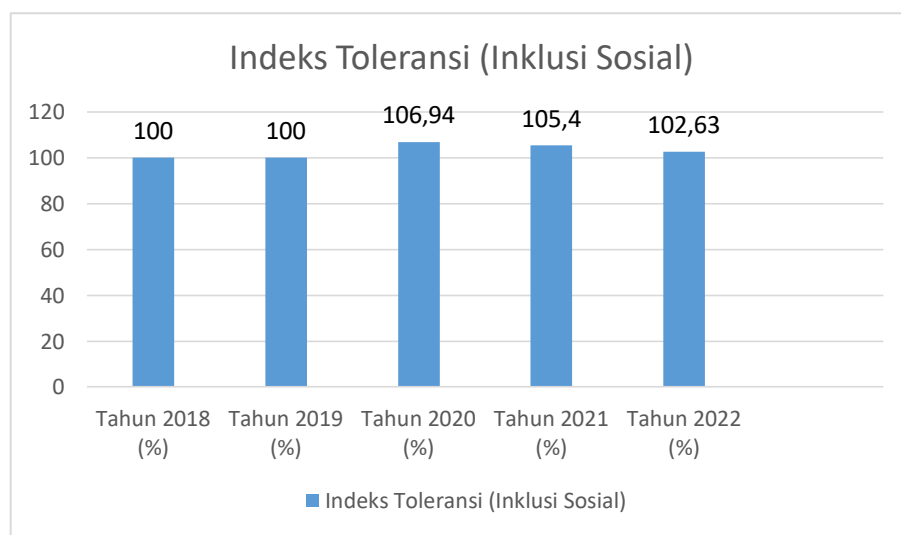
4. Tujuan 4 Mewujudkan pembangunan sosial dan toleransi masyarakat pluralis.

Didukung oleh 3 sasaran, yakni :

Sasaran 1:

- Meningkatnya toleransi kerukunan antar umat beragama

a. Indeks toleransi (Inklusi Sosial)



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks toleransi (Inklusi Sosial)	terlampir	%	n/a	0,77	0,77	0,74	0,78	105,40	0,76	0,78	102,63	Dinas P3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja									105,40			102,63	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terus berkomitmen menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, dimana Badan Kesbangpol memiliki fungsi sebagai koordinator dan fasilitator dengan tetap memperkuat koordinasi dan konsolidasi bersama mitra kerja yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), hal ini salah satu

pendukung dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Toleransi (Inklusi Sosial) selama 5 (lima) tahun terakhir.

Indeks Toleransi/ Inklusi Sosial dengan target pada Tahun 2022 adalah 0,76 dan realisasi 0,78 serta capaian 102,63 %. Strategi tercapainya Indeks Toleransi / Inklusi Sosial pada tahun 2022 adalah dengan melakukan survey terhadap sampel populasi yang mana dijadikan sampel adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan 2 (dua) variabel dan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

- Variabel Penerimaan Perbedaan Terhadap Budaya Sosial dengan indikator menerima kegiatan agama lain dan menerima tempat ibadah agama lain.

Adapun perhitungan populasi yang dijadikan sampel adalah anggota FKUB berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Indikator menerima kegiatan agama lain dan;
- Indikator menerima tempat ibadah lain.

Nilai Interval = Nilai Bobot

Nilai Bobot	Keterangan
1	Tidak Setuju
2	Kurang Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Rumus Indeks Toleransi /Inklusi Sosial

$$\text{dimensi indeks} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per item} \times \text{nilai penimbang (Bobot)}}{\text{Total item yang terisi}}$$

Sample Kuisioner		Rata-Rata Sample	Nilai Bobot	Ket.	Per-hitungan
Indikator I	Indikator II				
1	2	4	5	6	7 = 4*5
5 Org	5 Org	5 Org	4	Sangat Setuju	20
8 Org	8 Org	8 Org	3	Setuju	24
4 Org	4 Org	4 Org	2	Kurang Setuju	8
0 Org	0 Org	0 Org	1	Tidak Setuju	0
17 Org	17 Org	17 Org			52

$$\text{Dimensi Indeks} = \frac{52}{17} = 3,06$$

$$\text{Indeks Toleransi} = \frac{3,06}{4} = 0,78$$

Ket. Angka 4 adalah Jumlah Indikator

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan:

1. Implementasi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
2. Implementasi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
3. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di tingkat

kecamatan, karena selama ini hanya ada FKUB dan FPK tingkat kabupaten, hal ini membuat laporan kegiatan yang diperoleh bersifat universal / umum, dengan inovasi membentuk FKUB dan FPK pada tingkat kecamatan selama tahun 2022 akan mempermudah memperoleh laporan tingkat kecamatan dan data lebih akurat.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja:

1. Rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai ujung tombak dalam menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai koordinator dan fasilitator.
2. Melaksanakan sosialisasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 6 (Enam) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi pembentukan FPK di Kec. Pangkalan Lada dan Kecamatan Kumai.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi revolusi mental.
5. Mengikuti pelaksanaan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda.
6. Melaksanakan kegiatan kaji Banding Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
7. Melaksanakan sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang bertujuan menambah ilmu pengetahuan tentang kebangsaan dan membangun NKRI serta meningkatkan rasa nasionalisme.

BAB II CAPAIAN KINERJA



Ket : Kegiatan Rapat Anggota FPK Audiensi FPK Dengan Pj. Bupati Kotawaringin Barat Di Aula Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Ket : Rapat Persiapan Sosialisasi Pembentukan FKUB Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat

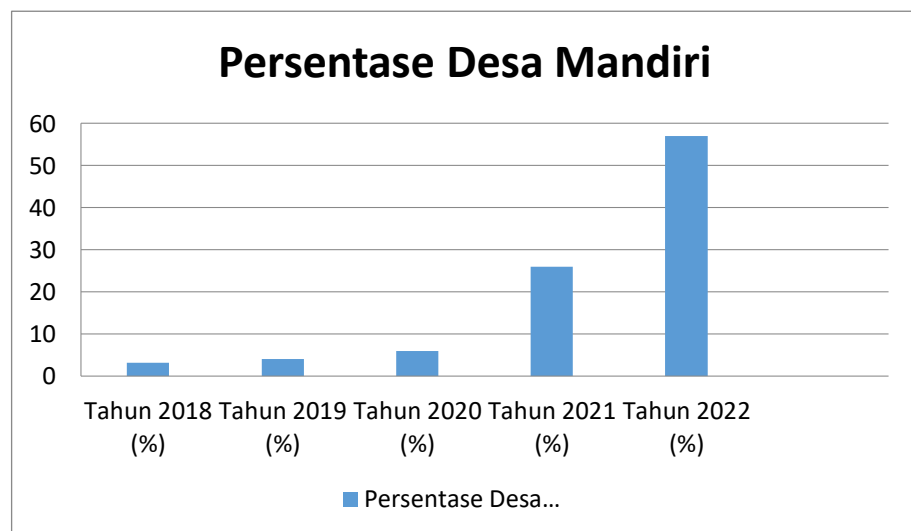


Ket : Kegiatan Sosialisasi Pembentukan FKUB Tingkat Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Di Kecamatan



Ket : Kegiatan Sosialisasi Pembentukan FKUB Tingkat Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Di Kecamatan

- Meningkatnya desa mandiri
 - a. Presentase Desa Mandiri



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Presentase Desa Mandiri		%	3,2	4	11,11	6	26	433	12	57	475	Dinas P3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja									433			475	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berkomitmen dalam untuk meningkatkan status Desa mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana capaian yang diperoleh melebihi dari target. Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa mengalami peningkatan berdasarkan pada penilaian kualitas ketahanan ekologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial. Peningkatan status Desa mandiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disetiap tahunnya.

Peningkatan status Desa mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan :

1. Pendampingan dalam pengelolaan dana Desa yang dimulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana Desa yang tepat sasaran dan tepat waktu;
2. Melaksanakan konsenyering bagi Perangkat Desa yang diadakan secara rutin diakhir tahun;
3. Pendampingan dalam pengalokasian penerimaan dana Desa, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan sarana prasarana sebagai pendukung dalam meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Lingkungan;
4. Melalui Pemerintah Daerah mendorong untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan di Desa, sehingga meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Sosial;

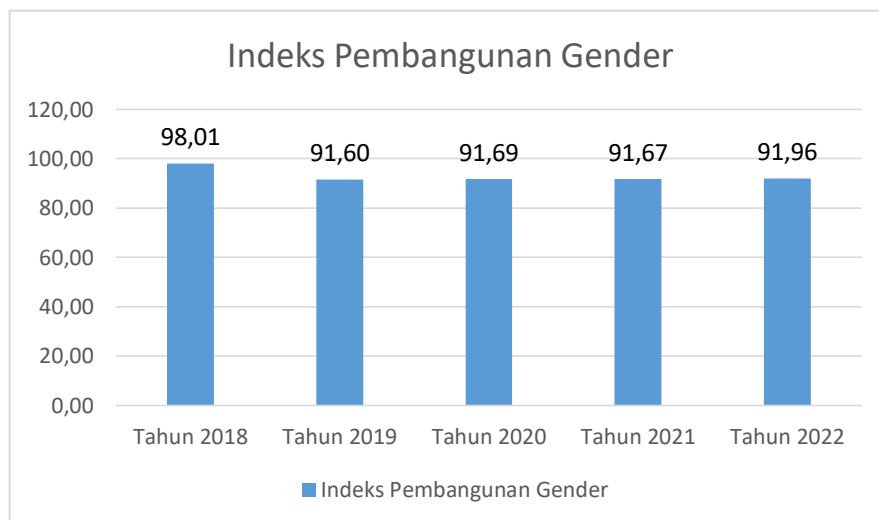
5. Pendampingan bagi pengurus BUMDes dalam upaya pengelolaan keuangan BUMDes, sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks ketahanan Ekonomi dimasyarakat;
6. Pendampingan kelembagaan yang ada di Desa maupun tingkat Kecamatan berupa PKK dan Posyandu;
7. Peran pendamping Desa, Kecamatan dan P3MD tingkat Kabupaten yang terjalin baik dan optimal dalam memberikan pendampingan/bimbingan di Desa.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja :

1. Membuat surat Kepala Dinas ke Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran dan pembangunan di Desa;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Camat dan Kasi PMD sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten ditingkat Kecamatan;
3. Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan pendamping tingkat Desa, Kecamatan dan P3MD Kabupaten dalam upaya penilaian Desa;
4. Melaksanakan bimtek/pelatihan bagi lembaga – lembaga yang ada di Desa.

- Meningkatkan perlindungan dan keberdayaan perempuan dan anak sebagai upaya kesetaraan gender dan kondusifitas Kota/Kabupaten layak anak

a. Indeks Pembangunan Gender



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Gender		Nilai	98.01	91.60	91.69	97.98	91.67	99.66	93.00	91.96	92.60	Dinas P3AP2KB
	Rata-rata Capaian Kinerja								99.66			92.60	

Index Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender: secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender. $IPG = IPM P / IPM L \times 100$. Capaian dijabarkan dalam tabel diatas telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sesuai sasaran/indikator IKU daerah. Untuk mencapai IPG telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya

Sosialisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Walaupun secara nilai belum mencapai target karena hal ini disebabkan oleh penentuan target yang cukup tinggi bahkan melebihi target IPG Nasional. Sesungguhnya capaian IPG Kotawaringin Barat telah melebihi provinsi dan nasional.

Untuk mencapai IPG telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya Sosialisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Walaupun secara nilai belum mencapai target Sesungguhnya capaian IPG Kotawaringin Barat telah melebihi provinsi dan nasional. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target pada tahun 2022 adalah 99,3 dengan realisasi sebesar 91.69.

Pencapaian Indeks Pembangunan Gender untuk 2022 tidak mencapai target dengan capaian 93,59 % hal ini dikarenakan IPG diukur/dinilai dari 3 komponen sebagai berikut:

1. Angka Harapan hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang;
2. Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca dan tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal;
3. Sumbangan pendapatan, mencerminkan kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan untuk sektor non pertanian.

Dari 3 (tiga) komponen pengukuran IPG tersebut, tidak hanya ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun juga melibatkan berbagai instansi lainnya. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Dinas pengukuran IPG tersebut, tidak hanya ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga mempunyai sasaran pada sebagai berikut:

- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dengan target pada tahun 2022 adalah 30% dan realisasi sebesar 55,10% serta capaian sebesar 183,67%.

Jumlah laki – laki dan perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah sebanyak 3.900 orang, dari jumlah tersebut terdiri dari perempuan sebanyak 2.149 orang dan jumlah laki – laki 1.751 orang

- Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta dengan target pada tahun 2022 adalah 30% dengan realisasi sebesar 16,99% dan capaian 56,63%.

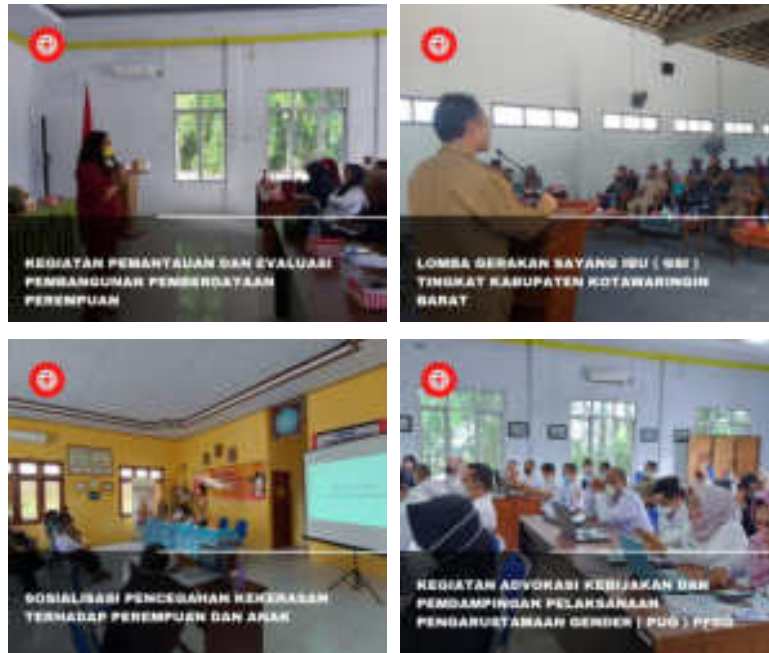
Jumlah laki – laki dan perempuan yang bekerja pada Lembaga Swasta sebanyak 10.300 orang, dengan rincian perempuan sebanyak 1.750 orang dan laki – laki sebanyak 8.550 orang.

- Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu jumlah kasus dibagi jumlah rumah tangga di kali 1.000, target 2022 adalah sebesar 0,001 dengan capaian sebesar 0,01514.

Tingginya rasio kekerasan pada tahun 2022 disebabkan karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian KDRT. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan dibukanya *hotline* dan dilaksanakannya sosialisasi serta penyuluhan mengenai

BAB II CAPAIAN KINERJA

KDRT kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perangkat desa, sehingga, capaian terhadap rasio KDRT mengalami peningkatan.



b. Kategori Kabupaten Layak Anak



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)	Sumber Data
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)		%	Inisiasi (338,25)	Pratama (570)	Pratama (570)	Madya (601-700)	Pratama (888,68)	126,95	Nindya (800)	Pratama (773,25)	126,95	Dinas P3AP2KB
Rata-rata Capaian Kinerja									126,95			126,95	

Formulasi perhitungan KLA sudah terhitung dalam Aplikasi Evaluasikla pada Kementrian PPPA. Skor yang didapatkan tersebut setelah kita memenuhi syarat dan ketentuan dari 5 Kluster dan 24 Indikator.

Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan target pada tahun 2022 adalah Nindya (skor yang harus dicapai adalah 800-900), dan capaian Pratama dengan skor sebesar 773.25 secara skor ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Kota Layak Anak tidak mencapai target Nindya dikarenakan :

1. Belum terlatihnya semua operator yang ada di setiap OPD yang terkait dengan KLA;
2. Belum adanya tenaga di setiap OPD yang mengikuti Bimtek keahlian di Bidang KHA yang berskala Nasional;
3. Belum terbentuknya lembaga yang mendukung dalam pencapaian KLA ke predikat yang lebih baik, misalnya belum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta belum terbentuknya gugus tugas KLA di setiap Desa dan Kecamatan;
4. Belum maksimalnya pembentukan Lembaga perlindungan anak di Desa dan kelurahan, misalnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dimana PATBM ini

diharapkan di semua desa dan kelurahan sudah terbentuk/sudah ada PATBM;

5. Belum adanya Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), Masjid/mushola Ramah Anak (MRA) dan Gereja Ramah Anak (GRA) yang berstandarisasi, Karena mulai tahun 2021 untuk SRA, PRA, MRA dan GRA di haruskan yang sudah berstandarisasi di dalam penilaain KLA;
6. Belum maksimalnya Ruang Bermain Anak (RBA) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang berstandarisasi;
7. Kurangnya SDM di Bidang Perlindungan Anak sehingga target pengstandarisasi untuk semua lembaga yang ada belum maksimal.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja :

1. Pada kegiatan tahun 2022, DP3AP2KB mendapatkan Kategori PRATAMA pada penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan pada bulan Maret-April untuk penilaian mandiri, dan pada bulan Juli dilakukan oleh Tim Independen dan kementerian PPPA RI, dari hasil penilaian mandiri, untuk Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan nilai tertinggi seprovinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 773,25.
2. Untuk PATBM sampai dengan tahun 2022 yang sudah terbentuk berjumlah 14 Desa/Kelurahan dari 94 desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dimana dari data tersebut PATBM kita yang terbentuk belum mencapai 50%. PATBM setiap tahunnya hanya bisa kita laksanakan sebanyak 2 lokasi di Desa/Kelurahan, dimana peningkatan PATBM ini merupakan salah satu strategi dalam upaya mencapai KLA ke tingkat yang lebih baik.

3. Pada tahun 2022, DP3AP2KB mengikuti Standarisasi PISA dimana DP3AP2KB sebagai *Leadingsector* dan Lokus ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Standarisasi dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Oktober 2022, dan setelah melalui berbagai verifikasi maka di tetapkan bahwa Lokus yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak telah terstandarisasi dan mendapatkan penghargaan dengan kategori PRATAMA, yang ditunjukan dengan surat nomor B-688/D.PHA/TK.01.02/11/2022 tanggal 4 November 2022, dari Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Republik Indonesia.



Ket: Rapat Koordinasi Penilaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2022 Aula Bappeda Kotawaringin Barat.



Ket: Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Sekolah



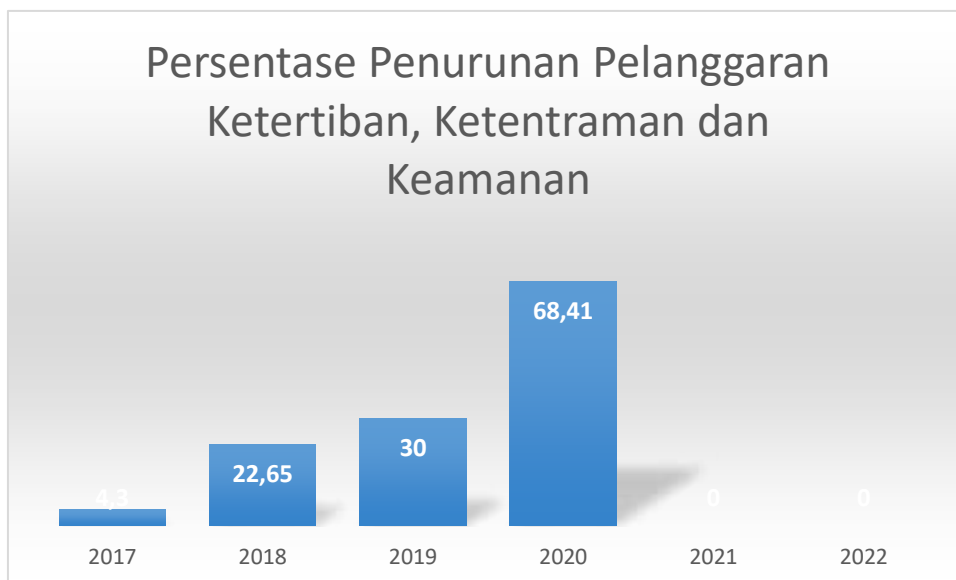
Ket: Pembinaan Terhadap Forum Anak Kabupaten



Ket Sosialisasi KHA kepada Petugas RBA oleh Auditor kementerian PPPA via zoom

Tujuan 5 : Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Indikator Kinerja Tujuan : Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan



Sumber : BPS, 2022

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan menunjukkan upaya pemerintah untuk menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan daerah. Ketentraman, ketertiban dan keamanan daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan sebagai pemicu investasi daerah dimana dengan tingkat kriminalitas rendah, meningkatkan minat investor .

Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kabupaten Kotawaringin Barat selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan, tahun 2019 hingga tahun 2020 Indeks Persentase Penurunan Ketertiban, Ketentraman Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 38,41 persen hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil menurunkan tingkat kriminalitas. Sedangkan data persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan Kabupaten

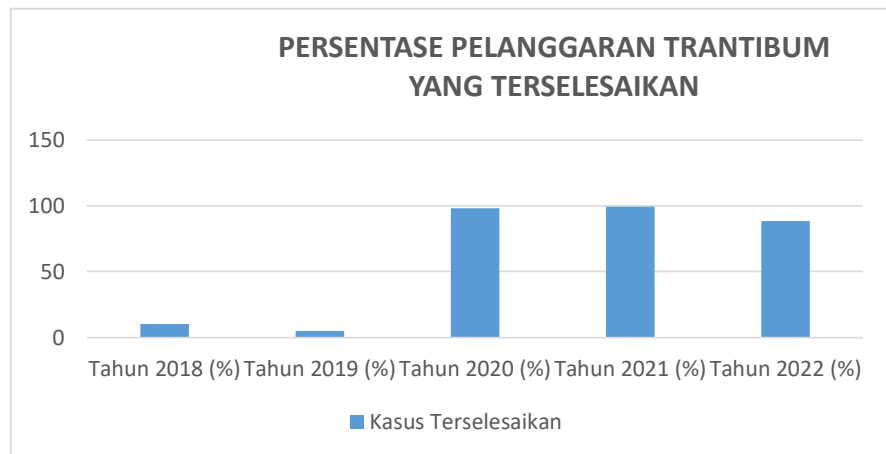
kotawaringin Barat tahun 2021 tidak didapatkan data capaiannya sedangkan data persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan tahun 2022 pada saat laporan ini dibuat belum dirilis oleh BPS.

5. Tujuan 5 Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Didukung oleh 1 sasaran, yakni :

Sasaran 1 :

- Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum
 - a. Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang terselesaikan



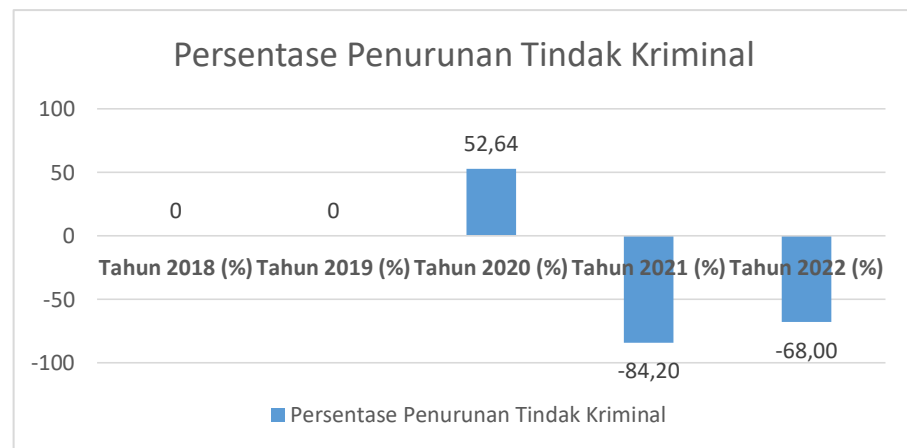
Dalam menangani kasus pelanggaran perda dalam 5 (lima) tahun mengalami capaian secara fluktuasi (naik turun), hal itu dapat terlihat pada 2019 yang mencapai dibawah Tahun 2018 sebesar 5,12% sedangkan pada Tahun 2018 sebesar 10%. Penurunan ini dikarenakan ada 4 (empat) kasus yang masih BAP pada PPNS. Kasus ini tidak terselesaikan karena jadwal sidang tipiring hanya satu kali dalam satu minggu.

Lonjakan kenaikan capaian kasus yang terselesaikan yaitu pada Tahun 2021 sebesar 99,53%. Tercapainya capaian ini dikarenakan pada tahun 2021 penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan

difokuskan kepada Perbub 54 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari penegakan perbub tersebut, pada tahun 2020 diperoleh sebesar 1952 pelaku pelanggaran tidak mematuhi prokes dalam bermasker dan pada tahun 2021 diperoleh 5610 pelaku pelanggaran prokes dari bulan Januari sd Desember 2021.

Pada Tahun 2022, capaian kinerja mengalami penurunan dari capaian Tahun 2021 sekitar 11%. Namun pencapaian 88,37% pada Tahun 2022 melebihi dari target 2022 sebesar 70%. Hal ini didukung oleh dari 43 jumlah pelaku pelanggaran, ada 38 pelaku pelanggaran yang diproses hingga selesai.

b. Persentase penurunan tindak kriminal



Persentase penurunan tindak kriminal pada diagram diatas berbanding terbalik dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terhitung mulai tahun 2021 s.d 2022 untuk persentase penurunan tindak kriminal tidak mencapai target, hal tersebut disebabkan kasus tindak kriminal sangat pelik untuk dapat ditargetkan tingkat penurunannya setiap tahun, karena sifatnya kondisional dan situasional (kasuistis).

Persentase penurunan tindak kriminal, tidak mencapai target dikarenakan :

1. Tindak kriminal dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dalam jumlah kasus.
2. Penurunan tindak kriminal sifatnya kondisional dan situasional (kasuistis), hal inilah yang membuat tidak tercapainya target indikator sasaran persentase penurunan tindak kriminal tahun.

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang penurunan tindak kriminal :

1. Adanya perjanjian kerjasama (Mou) antara kepolisian Resort Kotawaringin Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : B/04/111/2022 RES KOBAR dan Nomor : 300/248/KESBANG.I/2022 tentang kesepakatan bersama sebagai dasar kerjasama para pihak dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada para pihak, didasarkan atas asas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
2. Sinergitas / kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang beranggotakan Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom P. Bun, BIN, BAIS, Kejaksaan Kobar, Unit Kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit dan SKPD terkait serta Camat se-Kobar yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat dengan melakukan Patroli Cipta Kondisi di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta melakukan rapat-rapat untuk membahas perkembangan daerah terkini untuk memberikan masukan kepada Pimpinan Daerah.

3. Melibatkan peran serta masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang beranggotakan masyarakat biasa yang terdiri dari tokoh agama / masyarakat, Ormas/LSM/, wartawan dalam rangka menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitarnya untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak keamanan agar setiap permasalahan dapat dideteksi dini sehingga tidak menjadi konflik yang lebih besar lagi.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka Pencegahan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan rencana kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Instansi terkait (SOPD di Kab. Kobar dan Instansi Vertikal) dengan memetakan potensi konflik dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu sebagai tindakan pencegahan dini juga melaksanakan monitoring potensi konflik di 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perbaikan kinerja kedepan yang akan dilakukan :

1. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Bentuk Rapat Tim Terpadu dan Monitoring Potensi Konflik
2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Pemantauan Orang Asing
3. Monitoring Keamanan Dalam Rangka Cipta Kondisi Bersama Instansi Vertikal (Aparat Keamanan Daerah)
4. Monitoring / Pemantauan Orang Asing di Beberapa Kecamatan
5. Pelaksanaan Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)



Ket : Kegiatan FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAM
Kab. Kotawaringin Barat



Ket : Kegiatan FORKOPIMDA dan FORKOPIMCAM
Kab. Kotawaringin Barat



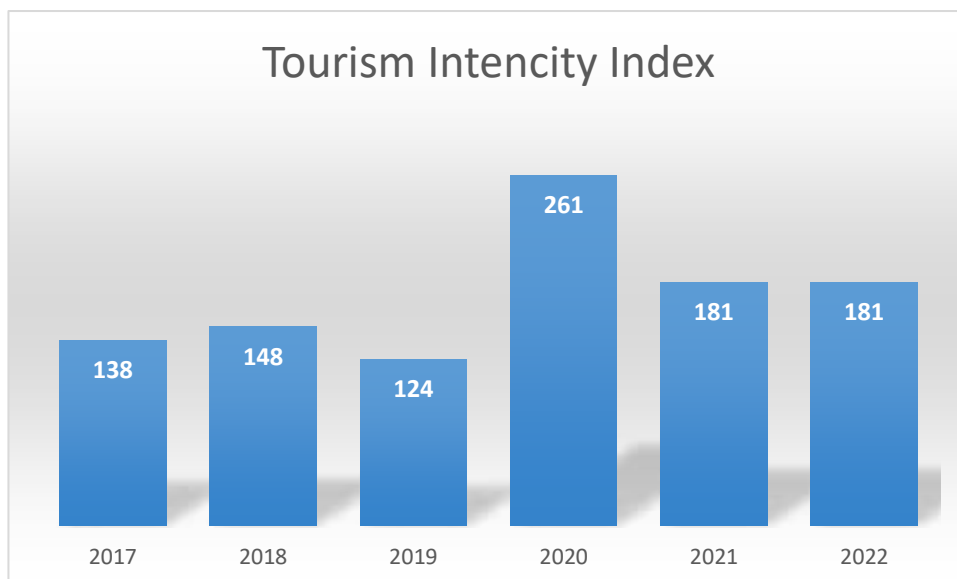
Ket : Giat Monitoring Dan Patroli Cipta Kondisi Dari Instansi Vertikal



Ket : Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Serta Tim Penanganan Konflik Sosial

Tujuan 6 : Peningkatan Pariwisata Daerah.

Indikator Kinerja Tujuan : *Tourism Intensity Index*



Sumber : RKPD Kab. Ktw. Barat Tahun, 2023

Secara umum kinerja indikator *Tourism Intensity Indeks* masih belum maksimal dimana tahun 2019 masih belum memenuhi kinerja namun tahun 2020 meningkat cukup signifikan dan memenuhi target. Kondisi tahun 2019 dipengaruhi karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurun sehingga menuntut adanya kebijakan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dalam mendorong pencapaian kinerja indikator *Tourism Intensity Indeks*. Angka capaian tahun 2022 merupakan data capaian tahun 2021, hal tersebut dikarenakan pada saat laporan ini di buat BPS belum merilis data Capaian *Tourism Intensity Indeks* tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat

6. Tujuan 6 peningkatan pariwisata daerah

Didukung oleh 2 sasaran, yakni :

Sasaran ke 1 :

- Meningkatkan Industri Kepariwisataaan

a. Rata-rata lama tinggal

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kotawaringin Barat pada tahun 2022 sebesar 1,36 hari jauh dari target yang ditetapkan

sebesar 4 hari namun capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,06 hari

Rata-rata lama tinggal wisatawan tidak mencapai target dikarenakan :

1. Berkurangnya event pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Keengganan Wisatawan untuk tinggal lama disuatu tempat karena dampak adanya pandemi covid-19;
3. Dampak dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan ekonomi akibat krisis energi dan adanya perang;
4. Tidak dapatnya data tentang jumlah wisatawan asing yang menginap di klotok.

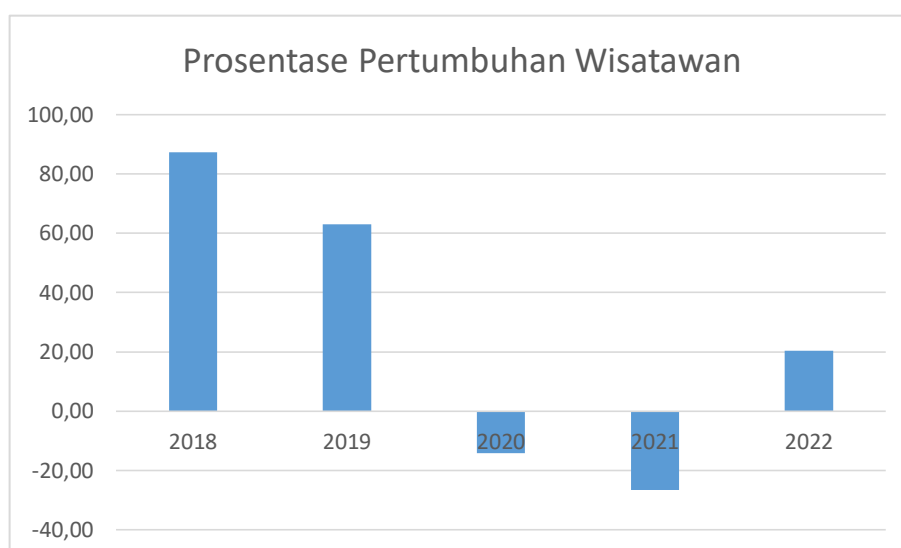
Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan:

1. Mengadakan event-event yang dapat mendatangkan wisatawan di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti : car free day, begoyap night market, Expo dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah terjadwal pada kalender event pariwisata Kobar.
2. Melakukan Sosialisasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan di obyek-obyek wisata dalam rangka memberikan edukasi dan meyakinkan akan wisata aman/ aman berwisata.
3. Menjalin kerjasama dengan pelaku wisata dan asosiasi serta perkumpulan pelaku wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Mencari dan mengembangkan destinasi-destinasi wisata baru di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perbaikan kinerja kedepan yang akan dilakukan (diisi rencana kinerja 2023 untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal) :

1. Mengadakan event-event yang dapat mendatangkan banyak wisatawan
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata khususnya untuk melakukan peningkatan lama tinggal;
3. Memberikan informasi terkait investasi pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat kepada para investor.

b. Prosentase Jumlah Kunjungan Wisatawan



Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wisman	15.173	18.834	14.552	1.251	160	19.689
Wisnus	128.694	250.672	424.982	375.844	276.630	313.581
Jumlah	143.867	269.506	439.534	377.095	276.790	333.270
% Pertumbuhan		63,77	87,33	63,09	-14,21	-26,60

Kabupaten Kotawaringin Barat terus berkomitmen dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, prosentase peningkatan wisatawan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun secara jumlah

wisatawa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 prosentase peningkatan wisatawan menjadi minus karena dampak adanya pandemi covid-19 yang muncul pada triwulan ke-2 tahun 2020 dimana terjadi pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri, kondisi yang sama berlanjut pada tahun 2021 dengan semakin meningkatnya kasus covid 19, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh dinas pariwisata sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat mulai dari penerapan level PPKM dan pelayanan vasinasi untuk masyarakat serta penerapan protokol kesehatan.

Prosentase peningkatan wisatawan dihitung dengan rumus jumlah wisatawan tahun n dikurangi dengan jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi dengan jumlah wisatawan tahun n-1. Peningkatan wisatawan tahun 2022 lebih didorong oleh keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata karena setelah 2 tahun adanya covid-19 dan larangan pemerintah untuk melakukan kegiatan wisata dan berkerumun.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meskipun masih dalam kondisi pasca pandemi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata melakukan upaya-upaya untuk ningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat, diantaranya dengan melakukan promosi baik melalui media online maupun offline. Salah satu event promosi yang diikuti pada tahun 2022 adalah Anugerah Pesona Indonesia (API) yang diselenggarakan di Aceh dan pada ajang ini Dinas Pariwisata berhasil mengantarkan Desa Pasir Panjang memperoleh juara 2 untuk kategori destinasi baru.

Selanjutnya pelaksanaan event pemilihan Aba-ambo Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai ajang menjaring generasi muda untuk menjadi duta wisata yang nantinya akan mewakili Kabupaten Kotawaringin Barat untuk maju ditingkat provinsi maupun nasional sekaligus mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat Khususnya dan Kalimantan Tengah pada Umumnya.

Pada akhir tahun 2022 dilaksanakan rapat penyusunan kalender event, kegiatan ini bertujuan untuk mendata event yang berpotensi mendatangkan wisatawan sekaligus menyusun jadwal pelaksanaan event-event yang berlangsung di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun yang akan datang, harapannya supaya dalam pelaksanaannya tidak saling berbenturan melainkan saling berbagi waktu agar dapat dikunjungi banyak orang atau wisatawan. Pelaksanaan Calender Of Event (COE) juga bertujuan untuk menjaring event yang dapat dimasukkan dalam Claender Of Event Nasional yang sampai tahun ini Kabupaten Kotawaringin Barat belum memilikinya.

Kemudian dalam rangka menjaring wisatawan dan menghidupkan pelaku ekonomi kreatif Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pariwisata juga melakukan kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan pameran pariwisata bertajuk "*Tourism Kobar Rebound 2022*" yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Antakusuma Pangkalan Bun.

Selain pameran di dalam daerah Dinas Pariwisata juga diberi kesempatan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk ikut dalam pameran tingkat Nasional di Jakarta bertajuk

“Pameran Desa Wisata Indonesia Bangkit” buah dari keberhasilan Dinas Pariwisata mengantarkan Desa Sei Sekonyer sebagai Juara II Desa Wisata untuk kategori Daya Tarik Pengunjung dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

c. *Spending Of Money*

Spending Of Money wisatawan dipengaruhi oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung, jumlah pelaku wisata, dan daya tarik wisata. *Spending of Money* pada Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun 2021, kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya wisatawan yang datang meskipun belum mampu melampaui angka yang ditargetkan.

Ketidak tercapaian angka *Spending Of Money* disebabkan oleh:

1. Berkurangnya penyelenggaraan event Pariwisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Menurunnya jumlah pelaku ekonomi kreatif.
4. Turunnya daya beli wisatawan akibat ketidak pastian ekonomi global.
5. Tingginya biaya berwisata

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningkatan *Spending of Money*:

1. Melakukan event event yang mendatangkan banyak wisatawan
2. Meningkatkan promosi pariwisata baik di dalam daerah maupun diluar daerah

3. Melakukan Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku wisata dan Ekraf
 - Data penghargaan yang diterima Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022
 1. Penghargaan Kementerian Parekraf Kepada Desa Wisata Sekoyer yuang masuk dalam 50 Besar Desa Wisata di Indonesia
 2. Penghargaan Desa Sekonyer sebagai Juara II Desa Wisata untuk kategori Daya Tarik Pengunjung dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022
 3. Piala dan Penghargaan kepada Desa Pasir Panjang yang memperoleh juara II untuk kategori destinasi baru pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API Award tahun 2022)
 - Data inovasi seluruh Perangkat Daerah :

Kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan pameran pariwisata bertajuk *"Tourism Kobar Rebound 2022"* dan Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Pasir Panjang.



Ket : Kepala Dinas Pariwisata bersama Kabid Pemasaran Pariwisata dan Kepala Desa Pasir Panjang menerima penyerahan penghargaan pada acara API Award 2022 di Aceh



Ket : Menerima penghargaan sebagai Juara II Desa Wisata untuk Kategori Pengunjung pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022 di Jakarta

BAB II CAPAIAN KINERJA



Ket : Rapat penyusunan Calender of Event di ruang rapat Sekda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022

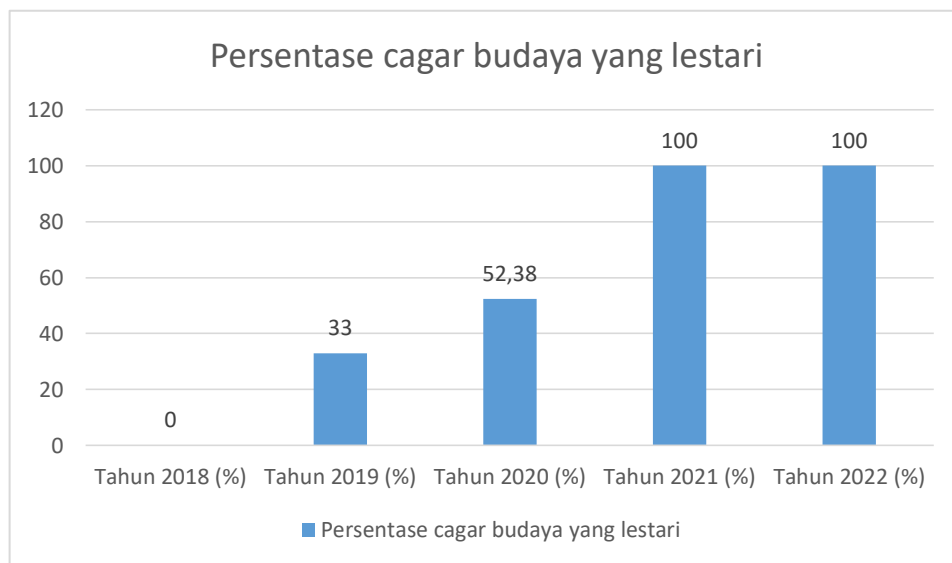


Ket : Pameran Pariwisata kerjasama Dinas Pariwisata dengan Kantor Perwakilan BI wilayah Provinsi Kalteng di Gedung Serbaguna Antakusuma Pangkalan Bun

Sasaran ke 2 :

- Meningkatkan kelestarian seni dan budaya

a. Persentase cagar budaya yang lestari



No	Indikator Sasaran	Formulasi	Satuan	Realisasi			Tahun 2021		Capaian kinerja Tahun 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian kinerja Tahun 2022 (%)
				2018	2019	2020	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase cagar budaya yang lestari		%	-	33	52,38	76	100	131,58	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja									131,58			100

Sumber : Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat

Keberhasilan pelestarian seni dan cagar budaya dalam pemenuhan target dilakukan dengan cara memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi kepada pemajuan kebudayaan, memberdayakan secara maksimal sumber daya manusia yang ada (juru pelihara) dalam memelihara cagar budaya, serta melakukan upaya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dengan melakukan event-event budaya dalam rangka menumbuh kembangkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya khususnya budaya di Kab. Ktw. Barat.

Adapun Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia nomor : PM.28/PW.007/MKP/2008 antara lain ; Masjid Kyai Gede di Kec. Ktw. Lama, Astana Al-Nursari di Kec. Ktw. Lama dan Astana Adipati Mangkubumi di Kec. Arut Selatan. Sedangkan yang termasuk dalam situs budaya di Kab. Ktw. Barat berdasarkan Keputusan Bupati Ktw. Barat Nomor: 114 tahun 2021 antara lain; (Kec. Arut Selatan) - Istana Kuning, Gubah Besar & Gubah Kecil, Rumah Betang dan Pemandian Tujuh Putri. (Kec. Kumai) – Monumen Panglima Utar, Meriam Kubu, Monumen Merah Putih, Makam Pangeran Bendahara I dan II serta Makam Panjang Sei. Rengas. (Kec. Arut Utara) – Sepundu Zakaria bertuliskan Arab Jawi, Batu Petahan, Palagan Sambu, Rumah Adat Betang, Monumen Pantar Patih Kuta Batu, Rumah Adat Balai Antang. (Kec. Ktw. Lama) – Makam Kyai Gede dan Makam Kuta Tanah.

Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan dalam rangka melestarikan seni dan cagar budaya pada tahun 2022 antara lain:

1. Menyediakan tenaga juru pelihara pada cagar dan situs

budaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka memelihara dan menjaga situs/cagar budaya, dengan rincian sebagai berikut : 1 orang di Makam Gubah Kecil, 1 Orang di Makam Gubah Bosar, 3 orang di Astana Mangkubumi, 4 orang di Istana Kuning, 2 orang di Rumah Betang Pasir Panjang, 1 orang di Mekan Bendahara I dan II Kumai, 1 orang di Monumen Palagan Sambu, 1 orang di Anjungan Kobar TMII Jakarta, 2 orang di Anjungan Kobar di Palangkaraya, 1 orang di Masjid Jami Kyai Gede Kolam, 1 orang di Makam Kuta Tanah Kolam, 1 orang di Astana Alnusari Kolam dan 2 orang di Makam Kyai Gede Kolam.

2. Menyalurkan bantuan alat kesenian dan kebudayaan kepada 16 sanggar/kelompok seni/kelompok kebudayaan dalam rangka terus melestarikan kesenian dan kebudayaan di Kab. Ktw. Barat
3. Menyelenggarakan event-event budaya/seni tingkat Kabupaten dan mengikuti event kebudayaan tingkat provinsi maupun nasional antara lain dengan menyelenggarakan Festival dan Lomba LASQI (Qasidah dan Terbang) tingkat Kabupaten dan Provinsi Kalteng, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Bahasa Daerah (Festival Bahasa Ibu) tingkat Kabupaten dan Provinsi, Penampilan Kebudayaan Kotawaringin Barat di Anjungan Kalteng Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka Presidensi G-20 serta rangkaian HUT Kobar antara lain ; Betomu Minyadi, Upacara Adat di Sembaga Mas dan Pawai Nasi Adab.

BAB II CAPAIAN KINERJA



Ket. : Pembagian alat kebersihan Makam Kyai Gede Dan Masiid Kvai Gede



Ket. : Pembagian bahan bakar mesin potong rumput Astana AI Nursari



Ket. : Monev di makam Pangeran Bendahara



Ket. : Monev di Kuta Tanah makam Sultan/ Raja Kutaringin

- Data inovasi seluruh Perangkat Daerah :
Inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

No	Uraian Inovasi	Maksud dan Tujuan	Keterangan
1	Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemkab. Kobar	Sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan SKM.	Bagian Organisasi Setda 24 Agustus 2022
2	Bahaum CSR	Untuk mengakomodir usulan-usulan Musrenbangcam dan usulan SKPD yang	Bappeda 7 September 2022

BAB II CAPAIAN KINERJA

		tidak terdani melalui APBD maka diteruskan untuk didanai dari CSR perusahaan	
3	Pengelolaan data terintegrasi dan terupdate melalui google sheet	Untuk mempermudah penyampaian laporan evaluasi dari perangkat daerah	Bappeda
4	Pembagian bibit cabe rawit gratis ke masyarakat	Upaya pengendalian inflasi pangan di provinsi Kalimantan Tengah melalui penanaman cabe di lahan pekarangan untuk memenuhi keperluan pribadi dan dijual untuk peningkatan pendapatan	TPID Kobar dan Dinas Ketahanan Pangan 18 & 29 September 2022
5	Integrated Area Development (IAD)	Untuk mengintegrasikan pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat (dari pengembangan pariwisata, UMKM dan pembangunan sarana dan prasarananya)	Tahap Penyusunan Tim Bappeda 22 September 2022
6	Budidaya Anggur bagi Kelompok Wanita Tani, Penyuluh dan Peminat Bertanam Anggur	Mendorong masyarakat untuk menanam anggur secara benar sehingga dapat berbuah dan hasilnya memuaskan serta merangsang tumbuhnya Kampung	Dinas Ketahanan Pangan 12 Oktober & 3 November 2022

BAB II CAPAIAN KINERJA

		Anggur sebagai lokasi agro wisata	
7	Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Produksi Untuk IKM dengan Bulog Pangkalan Bun	Dalam rangka pengendalian inflasi dan upaya membantu IKM yang terdampak inflasi maka dilakukan kerjasama penyediaan bahan baku produksi untuk IKM. Bahan baku dimaksud yaitu beras ketan, gula pasir, kedelai, minyak goreng, tepung tapioka dan tepung rerigu	Disperindag UKM 19 Oktober 2022
8	Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Satuan Pendidikan Menghadapi Banjir	Pengaturan dan penyesuaian proses belajar mengajar untuk sekolah yang terdampak banjir sehingga siswa tetap bisa belajar dimanapun	Dinas Dikbud 20 Oktober 2022
9	Dialog Interaktif Kesehatan Mental	Agar masyarakat mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental dengan berkonsultasi ke psikolog atau dokter spesialis kesehatan jiwa.	RSUD Sultan Imanuddin 23 Oktober 2022
10	Pasar Murah	Dalam rangka pengendalian dampak inflasi dan membantu masyarakat yang terdampak maka	Disperindag UKM 24-26 Oktober 2022

BAB II CAPAIAN KINERJA

		dilaksanakan Pasar Murah di 6 kecamatan. Menjual 1.100 paket sembako beras, gula pasir, minyak goreng dan telur ayam.	
11	Bantuan Sayur hidroponik (sawi, selada dan selederi) Produk OPAL yang disalurkan ke Posko Bencana Banjir (Dapur Umum) di Lima Lokasi	Membantu kegiatan dapur umum posko bencana banjir dalam penyiapan bahan pangan yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak banjir.	Dinas Ketahanan Pangan 24-27 Oktober 2022
12	Gawi Bahaum	Membantu pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan potensi dan komitmen yang dimiliki desa. Pemberdayaan yang dilakukan diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan dan berkelanjutan.	Penyusunan SK Komite Pengarah Bappeda 25 Oktober 2022
13	Trauma Healing	Trauma healing dilakukan kepada anak-anak pengungsi korban banjir Desa Kumpai Bawah sehingga diharapkan mampu mengalihkan pikiran buruk terhadap bencana agar tidak berlarut-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB II CAPAIAN KINERJA

		larut dalam kesedihan serta bisa mengambil hikmahnya.	25 Oktober 2022
14	Batas Waktu Penyampaian SPM dan Penerbitan SP2D Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022	Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran menghadapi akhir tahun 2022 dikeluarkan Surat Edaran Batas Waktu Penyampaian SPM dan Penerbitan SP2D Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022	BPKAD 31 Oktober 2022
15	Bantuan Bahan Baku Produksi Untuk IKM Pangan Olahan	Dalam upaya membantu Industri Kecil dan Menengah yang terdampak inflasi dalam penyediaan bahan baku produksi	Disperindagkop UKM 2 November 2022
16	MoU dengan Lembaga ENTER	Tindak lanjut MoU tersebut berupa audensi ke Menaker RI dan IM Japan	Kemnaker RI dan IM Japan siap memfasilitasi kegiatan pemagangan tenaga kerja Kotawaringin Barat ke Jepang. (Bappeda) 4 November 2022
17	Budidaya Hidroponik dan Bertanam Cabai dalam Polibag bagi Kelompok	Mendorong kelompok masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit di areal	Sebagai respon ajakan Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Harganas ke-29

BAB II CAPAIAN KINERJA

	Masyarakat Sekolah dan Instansi Pemerintah	perkotaan (Urban Farming) serta untuk merangsang konsumsi sayuran aman bebas pestisida.	pada 7 Juli 2022, untuk memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk menanam dan berproduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Dinas Ketahanan Pangan Juni-November 2022
--	--	---	---

• Akuntabilitas Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
(SEMENTARA)

Kode	URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN	1.408.348.783.600,00	1.412.988.744.132,12	100,33	1.631.972.466.127,94
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	283.646.085.100,00	231.199.840.082,25	82,22	392.164.379.084,55
4.1.01	Pajak Daerah	97.150.000.000,00	81.325.367.307,79	83,73	70.389.757.736,05
4.1.02	Retribusi Daerah	20.048.063.900,00	15.128.115.054,00	53,94	12.611.932.516,36
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.970.000.000,00	12.940.075.581,00	99,77	12.470.117.812,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	145.478.021.200,00	121.808.282.139,55	83,80	296.092.570.079,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.074.715.408.500,00	1.107.583.679.376,87	103,15	1.203.798.747.726,33
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH	980.791.986.500,00	995.446.393.184,08	101,49	1.123.614.847.716,08
4.2.01.01	Dana Perimbangan	896.946.456.500,00	912.417.960.098,09	101,72	1.038.858.842.934,08
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	112.042.541.000,00	138.520.194.566,00	123,70	135.229.810.254,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	593.355.915.000,00	591.000.303.000,00	99,74	593.260.006.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	112.235.300.000,00	110.302.462.916,00	98,33	230.385.941.118,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	70.462.700.500,00	71.736.920.076,00	101,83	79.984.677.562,00
4.2.01.02	Dana Investasi Daerah	13.214.332.000,00	13.214.332.000,00	100,00	-
4.2.01.05	Dana Dana	70.011.138.000,00	69.814.053.088,00	99,84	84.755.004.782,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	92.923.422.000,00	112.137.285.192,87	120,68	88.093.900.010,33
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.923.422.000,00	111.987.285.192,87	120,52	88.093.900.010,33
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	150.000.000,00	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50.987.210.000,00	72.205.225.671,08	141,63	38.099.139.397,06
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.103.000.000,00	21.124.410.000,00	2.100,31	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.824.210.000,00	47.080.806.673,08	94,49	38.099.139.397,06
5	BELANJA	1.537.949.049.525,00	1.383.385.862.698,05	89,95	1.461.583.883.894,41
5.1	BELANJA OPERASI	1.495.398.892.544,00	861.334.795.405,85	57,76	886.899.664.687,83
5.1.01	Belanja Pegawai	640.615.341.452,00	571.225.650.076,05	89,34	533.526.470.475,48
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.091.954.120,00	362.298.900.460,00	89,26	331.364.771.908,23
5.1.03	Belanja Bunga	563.500.000,00	563.499.999,00	100,00	847.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	39.483.096.972,00	25.308.738.070,00	64,09	19.364.429.304,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.027.000.000,00	2.027.000.000,00	100,00	1.766.928.000,00
5.2	BELANJA MODAL	278.168.124.381,00	265.205.498.972,00	95,34	413.698.499.168,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	55.399.200,00	1.061.200,00	1,92	100.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Meris	79.195.810.568,00	71.126.402.215,00	89,81	69.534.111.813,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.099.303.077,00	89.692.807.064,00	98,46	171.955.314.980,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.847.590.907,00	102.987.368.793,00	98,23	167.205.556.475,58
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.962.011.529,00	1.397.710.700,00	47,19	4.922.616.100,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.360.000.000,00	2.849.303.535,00	84,80	1.547.930.856,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.360.000.000,00	2.849.303.535,00	84,80	1.547.930.856,00
5.4	BELANJA TRANSFER	161.038.032.600,00	153.995.484.786,00	95,63	159.527.761.182,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.675.814.000,00	10.267.531.000,00	75,08	7.632.200.400,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	147.362.218.600,00	143.727.953.786,00	97,53	151.895.400.782,00
	SURPLUS/DEFISIT	(129.600.345.925,00)	29.603.881.434,07	(22,84)	172.388.662.233,53
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	261.920.012.679,00	261.920.012.679,90	100,00	138.531.350.426,37
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	261.920.012.679,00	261.920.012.679,90	100,00	97.531.350.426,37
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	31.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100,00	41.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jarak Tempo	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	100,00	36.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	208.920.012.679,00	208.920.012.679,90	100,00	97.531.350.426,37
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	79.318.646.734,00	238.523.674.093,97		261.920.012.679,90

Page Anggaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pangkalian Baru, 03 Januari 2023
KEPALA BPKAD

FTD

Des. HOCHIM HIDAYAT
NIP. 19640817 199403 1 000

**BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak ada tugas pembantuan dari pusat.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak ada tugas pembantuan dari provinsi.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendikbud No.32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Maksimal, target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100% (seratus persen). Berikut rincian target indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Tahun 2022
1	2	3	4
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %

4.1.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	95,25%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,14%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	99,09%

Berikut ini gambaran realisasi dari pelayanan pendidikan berdasarkan jejang pada aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Capaian SPM Pendidikan Dasar Usia Dini

1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini				95,25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	9,021	9,021	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
	1 . Buku gambar	9,021	9,021	0	100.00 %
	2 . Alat mewarnai	9,021	9,021	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	9,021	9,021	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	176	92	84	52.27 %
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	570	165	405	28.95 %

**Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Kotawaringin Barat**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK	TK		JUMLAH RA	RA		JUMLAH TK + RA
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	56	1	55	4	0	4	60
2	Arut Utara	11	1	10	0	0	0	11
3	Kotawaringin Lama	10	1	9	2	0	2	12
4	Pangkalan Banteng	25	1	24	4	0	4	29
5	Pangkalan Lada	15	1	14	0	0	0	15
6	Kumai	27	1	26	3	0	3	30
JUMLAH		144	6	138	13	0	13	157

Jumlah Peserta Didik TK dan RA

NO	KECAMATAN	JUMLAH PD TK	PESERTA DIDIK TK		JUMLAH PD RA	PESERTA DIDIK RA		JUMLAH PD TK + RA
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	3.267	149	3.118	305	0	305	3.572
2	Arut Utara	448	75	373	0	0	0	448
3	Kotawaringin Lama	696	61	635	93	0	93	789
4	Pangkalan Banteng	1.205	32	1.173	345	0	345	1.550
5	Pangkalan Lada	1.164	66	1.098	0	0	0	1.164
6	Kumai	1.286	77	1.209	212	0	212	1.498
JUMLAH		8.066	460	7.606	955	0	955	9.021

Jumlah Satuan Pendidikan TK dan RA Terakreditasi

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK + RA	AKREDITASI			
			A	B	C	BELUM
1	Arut Selatan	60	0	33	11	16
2	Arut Utara	11	0	6	0	5
3	Kotawaringin Lama	12	0	6	2	4
4	Pangkalan Banteng	29	0	13	9	7
5	Pangkalan Lada	15	0	8	7	0
6	Kumai	30	0	12	11	7
JUMLAH		157	0	78	40	39

Capaian SPM Pendidikan Dasar

2 .	Pendidikan Dasar				96.14 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	48,627	48,627	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.14 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	80.71 %
	1 . Buku teks pelajaran	48,627	48,627	0	100.00 %
	2 . Perlengkapan belajar	48,627	48,627	0	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	260	252	8	96.92 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	84	36	48	42.86 %
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	435	428	7	98.39 %
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	48,627	48,627	0	100.00 %
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2,381	2,177	204	91.43 %
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	261	42	219	16.09 %

**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SD	SD		JUMLAH MI	MI		JUMLAH SD + MI
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	72	60	12	9	2	7	81
2	Arut Utara	17	12	5	0	0	0	17
3	Kotawaringin Lama	24	23	1	0	0	0	24
4	Pangkalan Banteng	26	20	6	3	0	3	29
5	Pangkalan Lada	21	20	1	0	0	0	21
6	Kumai	36	31	5	5	2	3	41
JUMLAH		196	166	30	17	4	13	213

**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SMP	SMP		JUMLAH MTs	MTs		JUMLAH SMP + MTs
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
1	Arut Selatan	25	13	12	5	1	4	30
2	Arut Utara	5	4	1	0	0	0	5
3	Kotawaringin Lama	8	6	2	2	0	2	10
4	Pangkalan Banteng	11	6	5	2	0	2	13
5	Pangkalan Lada	6	5	1	1	0	1	7
6	Kumai	13	11	2	1	1	0	14
JUMLAH		68	45	23	11	2	9	79

**Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar/Sederajat
Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PD SD	PESERTA DIDIK SD		JUMLAH PD MI	PESERTA DIDIK MI	
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta
1	Arut Selatan	12.332	9.743	2.589	1.770	715	1.055
2	Arut Utara	1.611	703	908	0	0	0
3	Kotawaringin Lama	2.820	2.538	282	0	0	0
4	Pangkalan Banteng	4.163	2.721	1.442	723	0	723
5	Pangkalan Lada	4.014	3.670	344	0	0	0
6	Kumai	5.588	4.857	731	1.074	617	457
JUMLAH		30.528	24.232	6.296	3.567	1.332	2.235

**Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama/Sederajat
Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PD SMP	PESERTA DIDIK SMP		JUMLAH PD MTs	PESERTA DIDIK MTs	
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta
1	Arut Selatan	6.018	3.861	2.157	1.231	657	574
2	Arut Utara	454	288	166	0	0	0
3	Kotawaringin Lama	850	640	210	103	0	103
4	Pangkalan Banteng	1.575	997	578	317	0	317
5	Pangkalan Lada	1.007	903	104	99	0	99
6	Kumai	1.568	1.555	13	1.310	562	748
JUMLAH		11.472	8.244	3.228	3.060	1.219	1.841

**Jumlah Satuan Pendidikan dan Peserta Didik
Pendidikan Dasar Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN SD + MI + SMP + MTs	JUMLAH PESERTA DIDIK SD + MI + SMP + MTs
1	Arut Selatan	111	21.351
2	Arut Utara	22	2.065
3	Kotawaringin Lama	34	3.773
4	Pangkalan Banteng	42	6.778

5	Pangkalan Lada	28	5.120
6	Kumai	55	9.540
JUMLAH		292	48.627

**Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi
Pendidikan Dasar Per Kecamatan**

No	KECAMATAN	JUMLAH SD + MI	AKREDITASI			
			A	B	C	BELUM
1	Arut Selatan	81	10	50	17	4
2	Arut Utara	17	4	8	5	0
3	Kotawaringin Lama	24	1	8	15	0
4	Pangkalan Banteng	29	7	19	3	0
5	Pangkalan Lada	21	3	17	1	0
6	Kumai	41	8	20	11	2
JUMLAH		213	33	122	52	6

No	KECAMATAN	JUMLAH SMP + MTs	AKREDITASI			
			A	B	C	BELUM
1	Arut Selatan	30	4	16	5	5
2	Arut Utara	5	0	3	2	0
3	Kotawaringin Lama	10	0	7	3	0
4	Pangkalan Banteng	13	1	8	3	0
5	Pangkalan Lada	7	2	4	1	0
6	Kumai	19	2	8	7	1
JUMLAH		84	9	46	21	8

Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan

3.	Pendidikan Kesetaraan				99.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	760	760	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.09 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	95.45 %
	1 . Modul belajar	760	760	0	100.00 %

2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	46	46	0	100.00 %
3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	760	760	0	100.00 %
4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	39	39	0	100.00 %
5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	11	11	0	100.00 %
6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2	2	0	100.00 %
7 . Perlengkapan belajar	760	760	0	100.00 %
8 . PKBM Terakreditasi minimal C	11	7	4	63.64 %

**Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal
Per Kecamatan**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PKBM	PKBM		JUMLAH PD PKBM	PESERTA DIDIK PKBM	
			Negeri	Swasta		Negeri	Swasta
1	Arut Selatan	7	1	6	378	32	346
2	Arut Utara	0	0	0	0	0	0
3	Kotawaringin Lama	0	0	0	0	0	0
4	Pangkalan Banteng	1	0	1	0	0	0
5	Pangkalan Lada	1	0	1	263	0	263
6	Kumai	3	0	3	119	0	119
JUMLAH		12	1	11	760	32	728

**Jumlah warga belajar pada satuan Pendidikan Non Formal di
Kab. Kotawaringin Barat**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH
1	PKBM AR RAUDHAH	P2963023	PKBM	Swasta	Arut Selatan	38
2	PKBM BERLIAN MANDIRI 1	P9997678	PKBM	Swasta	Arut Selatan	136
3	PKBM BINA WARGA	P2962028	PKBM	Swasta	Arut Selatan	99
4	PKBM ENTER	P2963024	PKBM	Swasta	Arut Selatan	31
5	PKBM PUTERA BUNGSU MANDIRI	P9997808	PKBM	Swasta	Arut Selatan	16
6	PKBM SABILUR ROSYAD	P9968100	PKBM	Swasta	Arut Selatan	26
7	SKB. KOTAWARINGIN BARAT	P9970158	SKB	Negeri	Arut Selatan	32
8	PKBM MERDEKA	P9998405	PKBM	Swasta	Kumai	32
9	PKBM PERMATA	P2963552	PKBM	Swasta	Kumai	17
10	PKBM PUTERA PERANTAU	P2963550	PKBM	Swasta	Kumai	51
11	PKBM WICAKSANA	P9968047	PKBM	Swasta	Kumai	19
12	PKBM NIDAUL FITRAH	P9960044	PKBM	Swasta	Pangkalan Lada	263
JUMLAH						760

*Sumber : Dapodik kesetraraan

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Pengelolaan Pendidikan	111.123.828.387	107.168.936.468
2	Pengembangan Kurikulum	40.030.230	36.923.350
3	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	5.242.428.400	5.130.338.527
Jumlah		116.406.287.017	112.336.198.345

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, Jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 63 orang yang terdiri dari eselon II, III, III dan staf di bidang masing - masing, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan. Berikut adalah kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 63 orang dengan rincian:

- 1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Kepangkatan/Golongan Ruang:
 - a) Golongan I = 0 orang
 - b) Golongan II = 5 orang
 - c) Golongan III = 48 orang
 - d) Golongan IV = 10 orang
- 2) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan Formal:
 - a) S3 = 0 orang
 - b) S2 = 7 orang
 - c) S1 = 21 orang
 - d) D4 = 0 orang
 - e) D3 = 20 orang
 - f) D1 = 0 orang
 - g) SLTA = 15 orang

- h) SLTP = 0 orang
- i) SD = 0 orang
- 3) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat Pim:
 - a) Diklat Pim II = 1 orang
 - b) Diklat Pim III = 3 orang
 - c) Diklat Pim IV = 13 orang
- 4) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Jabatan Struktural/ Eselon:
 - a) Eselon II = 1 orang
 - b) Eselon III = 6 orang
 - c) Eselon IV = 18 orang
 - d) Pengawas, Guru dan Tenaga Kependidikan = 1.854 orang
- 5) Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh Pegawai non PNS dengan jumlah 17 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:
 - a) S - 1 : 8 Orang
 - b) D - 2 : 1 Orang
 - c) S L T A : 8 Orang

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Belum Maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebarannya.
2. Belum maksimalnya pemberian tunjangan profesi dan aneka tunjangan kesejahteraan pemberian maslahat tunjangan-tunjangan guru di daerah 3 T.
3. Luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mengakibatkan belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
4. Belum efektifnya dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya.
5. Rendahnya Penguasaan teknologi informasi oleh guru untuk mendukung profesionalisme guru.
6. Koordinasi, Komunikasi, Sosialisasi, Penyampaian Informasi belum/tidak berjalan baik.
7. Penempatan SDM spesikasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian.
8. Masih adanya kecemburuan sosial, perbedaan status, persaingan di lingkungan guru dan sekolah.
9. Pengawasan di sekolah PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di Kabupaten

belum berjalan maksimal.

10. Masalah disiplin guru berpengaruh terhadap pelaksanaan Pendidikan.
11. Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/ pengembangan diri/penguasaan IT.
12. Minimnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.
13. Kurangnya Dukungan Akomodasi/Insentif Terhadap Tenaga Pengajar.
14. Kurangnya Minat Baca Masyarakat.
15. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan.
16. Tingginya mobilitas penduduk di daerah pedalaman (kebun).
17. Belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa.
18. Belum meratanya fasilitas layanan Pendidikan.

Solusi

1. Menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong pemerintah kabupaten untuk menetapkan daerah khusus.
2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
4. Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten dalam kaitannya peningkatan SPM Pendidikan.
5. Strategi rencana program prioritas, sangat proritas dan program lanjutan.
6. Pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran.
7. Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN , BPKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, dll).
8. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.
9. Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
10. Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan USB, RKB, dll, dalam meningkatkan APK dan meningkatkan APM.
11. Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan

sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah tanpa mempertimbangkan jumlah siswa.

12. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, diharapkan agar pemerintah Pusat mengalokasikan dana sharing pada APBD Kabupaten mengingat kemampuan APBD Kabupaten tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan Pendidikan.
13. Bekerjasama dengan stakeholders lain untuk membantu mensosialisasikan program kesetaraan.
14. Membuka kelas program kesetaraan jarak jauh.
15. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan program dari instansi lain.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Tahun 2022
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
6	Pelayanan	Jumlah Warga Negara usia produktif	100 %

	kesehatan pada usia produktif,	yang mendapatkan layanan kesehatan	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan	100 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan.	100 %

4.2.3 Realisasi

Hasil capaian adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut adalah capaian SPM tahun 2022.

Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	RUMUS		CAPAIAN TAHUN 2022		
			PEMBILANG	PENYEBUT	PEMBILANG	PENYEBUT	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4750	4750	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4534	4376	96,52%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	4318	4318	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	18.939	17.487	92.33 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 s.d kelas 9	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1	46.948	46.948	100%

	Dasar	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	s.d kelas 9 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran			
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	180.358	173.344	96.11 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	18.468	18.468	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang datang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Estimasi jumlah penderita hipertensi yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	53.566	39.104	73.00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama	5.591	5.591	100%
10	Pelayanan	Persentase	Jumlah ODGJ	Jumlah ODGJ	409	393	96.09 %

	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama			
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	5.470	4.917	89,89%
12	Pelayanan Kesehatan Orang	Persentase orang berisiko	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV	6.255	6.255	100%

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2022 adalah sebesar 100%, capaian ini meningkat bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil tetap ditingkatkan. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.1 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu hamil di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat, 2022

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2022 adalah sebesar 96,52%, tercatat sebanyak 4.376 ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar dari sasaran 4.376 ibu bersalin di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah ibu yang melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan namun tidak dilakukan di fasilitas kesehatan tidak termasuk kedalam persalinan sesuai standar. Sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Gambar 2.2 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat, 2022

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Tahun 2020 merupakan titik terendah pencapaian pelayanan bayi baru lahir, hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga terjadi pembatasan pelayanan kesehatan bagi penduduk rentan. Namun di tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan pencapaian, hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta jejaring. Berikut tren cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3 Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Kesehatan
Kab. Kotawaringin Barat, 2022

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian pelayanan kesehatan balita tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya keterbatasan kegiatan di posyandu dan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, telah melahirkan inovasi - inovasi dalam pelaksanaan dan pencapaian SPM Kesehatan sehingga capaian pelayanan kesehatan balita tahun 2022 mengalami peningkatan. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan balita lima tahun terakhir.

Gambar 2.4 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat, 2022

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2022 sebesar 100%. Dari sasaran usia pendidikan dasar sebanyak 46.948 siswa telah mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar.

Gambar 2.5 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat, 2022

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya, walaupun tidak terlalu signifikan. Tingginya sasaran, sosial budaya, dan pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai skrining sangat mempengaruhi pencapaian. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 adalah sebesar 96,11%. Tercatat 173.344 orang mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar dari target/sasaran sebanyak 180.358 orang pada usia produktif. Untuk capaian 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.6 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat, 2022

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2022 tercapai 100%. Inovasi – inovasi yang telah dilakukan dalam peningkatan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut diantaranya adalah : kunjungan rumah pada lansia resiko tinggi dan kerjasama dengan kader Kesehatan yang ada di desa dan Kerjasama dengan lintas sektor terkait. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Gambar 2.7 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat, 2022

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Dari estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebesar 53.566 jiwa, ditemukan 39.104 jiwa penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar atau sebesar 73 %. Hipertensi masih dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin. Sistem pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang belum terkoordinir dengan baik mengakibatkan data yang dihimpun masih minim. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Gambar 2.8 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi P2PTM Dinas Kesehatan
Kab. Kotawaringin Barat

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
Jumlah penyandang DM di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan perhitungan angka prevalensi DM Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar 5.591 jiwa, ditemukan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 5.591 jiwa (100%). Gejala penyakit diabetes mellitus yang mudah diketahui membuat penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Gambar 2. 9 *Capaian Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022*



Sumber: Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
 Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik) di Kabupaten Kotawaringin Barat dihitung menggunakan proyeksi sehingga didapatkan OGDJ berat tahun 2022 sebesar sebesar 409 jiwa. Sedangkan OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebesar 393 jiwa (96,09%). Yang termasuk kedalam OGDJ berat adalah penderita Schizofrenia dan Psikotik akut. Untuk capaian 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2. 10 *Capaian Pelayanan Kesehatan pada ODGJ Berat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022*



Sumber: Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

11. Pelayan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
 Jumlah orang terduga TBC yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebesar 5.470 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar sebesar 4.917 orang. Sehingga persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar yaitu sebesar 89,89%. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Gambar 2. 11 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberkulosis di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

12. Pelayan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 Orang berisiko terinfeksi HIV yang terhimpun di Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari wanita pekerja seksual (WPS), pria pekerja seksual (PPS), pelanggan, waria, pengguna jarum suntik, pasien TB, ibu hamil dan pasangan berisiko. Dari 6.255 orang yang berisiko terinfeksi HIV di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022, terdapat 6.255 orang yang sudah mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau sebesar 100%. Inovasi yang telah dilakukan diantaranya : konseling dan tes HIV Bergerak (Mobile) serta pelayanan wajib dilaksanakan didalam gedung. Berikut gambaran capaian pelayanan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Gambar 2. 12 Capaian Pelayanan Kesehatan Pada Orang dengan Risiko Tertular HIV di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022



Sumber: Seksi P2PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Sebesar Rp 147.726.212.000 yang terdiri dari APBD dan DAK Pusat. Untuk anggaran 12 indikator SPM sebesar Rp 2,911,069,980. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Rp 1,017,472,310
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	100%	Rp 312,285,000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Rp 66,399,770
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	Rp 285,870,000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	Rp 550,310,000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	Rp 22,780,000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	Rp 45,599,700
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100%	Rp 76,401,100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	Rp 10,000,000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	100%	Rp 151,180,000
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	Rp 38,641,900
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV-AIDS	100%	Rp 334,130,200
Jumlah			Rp 2,911,069,980

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sebanyak 1.061 personil pegawai yang terdiri dari:

- a) 552 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana 82 ASN di Dinas Kesehatan dan 466 ASN di puskesmas.
- b) 509 orang Non ASN, dimana 56 orang Non ASN di Dinas Kesehatan dan 374 orang Non ASN di puskesmas.

Berikut gambaran kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan dasar di Puskesmas dan Jejaring:

Tabel 2.4
Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA
----	---------------------	---------------------	------------------	-----------------

1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
4	Pelayanan kesehatan balita	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
		5. SKM	37	37
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
		5. SKM	37	37
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
		5. SKM	37	37
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	1. Dokter	50	44

		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. SKM	37	37
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	1. Dokter	50	44
		2. Bidan	215	252
		3. Perawat	238	266
		4. Gizi	34	34
		5. SKM	37	37
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	1. Dokter	50	44
		2. Perawat	238	226
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	1. Dokter	50	44
		2. Perawat	238	226
		3. SKM	24	37
		4. Analis Kesehatan	33	34
		5. Penata Rontgen		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV-AIDS	1. Dokter	50	44
		2. Perawat	238	226
		3. SKM	24	37
		4. Analis Kesehatan	33	34
		5. Penata Rontgen		

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa jenis layanan dasar yang belum mencapai target 100%, kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a) Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2022 sebesar 96,52%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik
- Perpindahan penduduk dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor
- Masih terdapat Ibu hamil yang merencanakan/melakukan persalinannya di luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga mempengaruhi capaian persalinan ditolong kesehatan.
- Jarak tempuh dari Rumah Masyarakat di Pedesaan ke Faskes dan Tidak semua masyarakat pedesaan mempunyai alat Transportasi Dan sarana dan prasarana di tempat Persalinan Yang belum terstandar
- Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia

b) Solusi

- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Aplikasi e- kohort)
- Mengoptimalkan pelayanan melalui Telemedicine
- Koordinasi dengan faskes disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu bersalin
- Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group
- Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri/faskes lainnya dalam pelayanan KIA
- Kader melakukan pendataan ibu bersalin di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
 - Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia
2. Pelayanan Kesehatan Balita
- a) Permasalahan
- Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2022 sebesar 92,33%. Hal ini disebabkan karena:
- Masih terbatasnya Penanggungjawab Program Balita yang memiliki kemampuan melakukan MTBS/SDIDTK
 - Rendahnya kunjungan Ke Jaringan dan jejaring pada saat setelah usia 12 Bulan ke atas
- b) Solusi
- Pelatihan dan pembinaan penanggung jawab program balita (MTBS/SDIDTK)
 - Kader melakukan sweeping langsung kerumah warga dan melalui kelompok penimbangan (tingkat RT)
3. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- a) Permasalahan
- Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2022 sebesar 96,11%. Capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:
- Puskesmas lebih fokus pada pelaksanaan vaksin covid
 - Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) masih terbatas
 - Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia
- b) Solusi
- Kolaborasi program dengan melakukan skrining bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi
 - Melakukan skrining mobile di setiap kelurahan, instansi pemerintah, tempat ibadah dan tempat umum
 - Penambahan BHP dari berbagai sumber dana, misal DAK, dll
 - Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia
4. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a) Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2022 adalah sebesar 73%. Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi
- Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin
- kurangnya koordinasi dengan Perusahaan, lembaga dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM dan kurangnya inovasi Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan

b) Solusi

- Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, pabrik untuk melakukan skrining di tempat usahanya
- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
- Peningkatan pelayanan menggunakan Telemedicine
- Mempererat kerjasama dengan Perusahaan, lembaga dan sekolah

5. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**a) Permasalahan**

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tahun 2022 sebesar 96,09%. Capaian tersebut sudah bagus tapi belum mencapai dari target karena:

- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik
- Pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas, Sehingga tidak tercatat di puskesmas
- Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ, keluarga menganggap jika ada anggota keluarga dengan ODGJ sebagai sebuah aib dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat sekitar

b) Solusi

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit
- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis
-
- Melakukan pendekatan kepada keluarga dan lingkungan sekitar untuk mendukung keberhasilan pengobatan pasien ODGJ

6. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)**a) Permasalahan**

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) tahun 2022 sebesar 88,89%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Kondisi Pandemi Covid-19 gelombang kedua dan PPKM level 4, menyebabkan terbatasnya kegiatan tracing orang terduga Tuberkulosis sehingga jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pemeriksaan menurun
- Dari 24 Rumah Sakit di Kota Depok, baru 22 Rumah Sakit yang rutin melaporkan pelayanan TB
- Dari semua Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan Klinik yang berada di Kota Depok, hanya 3 unit kerja yang melaporkan pelayanan TB
- Belum semua puskesmas mampu melakukan pemeriksaan lab bakteriologis TB.

b) Solusi

Tindak lanjut kondisi tersebut antara lain dengan:

- Advokasi PKM membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan DPM, klinik.
- Pelatihan/Peningkatan Kapasitas SDM untuk semua fasyankes
- Melakukan pendampingan kepada petugas di faskes
- Melibatkan lintas sektor/pemberdayaan masyarakat

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk Daerah Kabupaten/Kota, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %

4.3.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,08 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,88 %

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah. Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 bersumber dari:

- 1) APBD
 - a. Pelayanan Air Minum
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Rp. 7.735.513.000,-

b. Pelayanan Sanitasi

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.632.766.600,-

Total APBD yang telah dialokasikan pada DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Rp. 15.368.279.600,-**

4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 yang menangani pemenuhan SPM sebanyak 31 orang yang terdiri dari PNS 12 orang dan Tenaga Kontrak Daerah 19 orang

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian dari cakupan layanan yang ada memang sudah mencapai target namun permasalahan pasti selalu ada, adapun permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut:

- 1) Akses air minum tersebut sebagian merupakan bukan jaringan perpipaan seperti sumur gali, sumur bor dll, dimana akses tersebut masih memiliki permasalahan yaitu rawan kekeringan pada saat musim kemarau panjang, jarak sumur yang agak dekat dengan tanki septik yang belum sepenuhnya aman sehingga rawan tercemar karna permukiman yang cukup padat dan lain sebagainya. Adapun solusi yang dapat mengurangi resiko tersebut yaitu perluasan jaringan perpipaan air minum sampai pada sambungan rumah yang melayani masyarakat terus meningkat hingga mencapai seluruh masyarakat kabupaten terutama daerah - daerah yang rawan air maupun kekeringan. Selain permasalahan tersebut, pada Tahun 2022 dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yakni harga satuan tidak sesuai kondisi rill di lapangan karena jarak seberang wilayah permukiman yang luas membutuhkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan yang disetujui oleh Kementerian. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu menyesuaikan jumlah SR per satuan sambungan rumah.
- 2) Akses sanitasi dengan capaian tersebut yang merupakan akses air

limbah domestik juga masih ada yang berupa akses dasar yang dianggap layak, misal cubluk untuk perdesaan dan tanki septik yang masih belum aman / tidak kedap sehingga sangat mungkin menjadi pencemaran air tanah. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut mau tidak mau peran serta pemerintah daerah harus membantu melakukan peningkatan dari akses dasar menjadi akses layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu juga permasalahan BABS tentunya harus menjadi target utama yang harus dituntaskan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai karna kebiasaan mereka melakukan pembuangan langsung ke sungai yang tentunya menjadi sumber pencemaran dimana sungai adalah sumber air baku di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain permasalahan tersebut, pada Tahun 2022 dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yakni belum adanya inovasi atau teknologi sarana air limbah yang tepat pada daerah bantaran sungai terhadap isu ketahanan iklim, misalnya pada saat terjadi banjir. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu perlu melakukan kajian untuk penerapan teknologi yang tepat terhadap ketahanan iklim.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yang ditetapkan adalah Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %

4.4.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A Tidak ada Rumah yang Rusak Akibat Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A Tidak ada relokasi akibat terkena program pemerintah.

Pada tahun 2022 Bidang Perumahan Rakyat untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya melakukan Kegiatan Pendataan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Lokasi Program Kabupaten/Kota di 2 Lokasi yaitu Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama dengan Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,-

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 belanja pada Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp. 209.337.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan Perumahan:

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp. 209.337.000,-

4.4.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat yang membantu pencapaian SPM sebanyak 22 orang personil.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi**1. Permasalahan:**

- a. Pada dasarnya program pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diperlukan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana dalam hal penentuan jumlah kerusakan rumah melalui perhitungan JITUPASNA (Kajian Perhitungan Pasca Bencana)
- b. Kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia dan anggaran, sehingga penanganan SPM tidak dapat di lakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi perlu kerjasama dengan pihak lain di luar pemerintahan.

2. Solusi:

- a. Perlunya Penetapan Bencana yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah
- b. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, baik pihak swasta, instansi vertikal, instansi dan SKPD lain, maupun stake holder yang lain dalam rangka pemenuhan dan penuntasan SPM yang menjadi kewajiban daerah.

4.5 Urusan Ketenteraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari 2 (dua) sub urusan yang diampu oleh Satuan Pol PP dan Damkar yaitu:

1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Jenis pelayanan SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan jenis pelayanan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Sedangkan mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota meliputi:

a) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi dengan jenis pelayanan dasar meliputi:

(1) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil; dan

(2) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan.

b) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu dengan jenis pelayanan dasar meliputi:

(1) Penegakan perda sesuai SOP;

(2) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar; dan

(3) Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar.

2. Sub Urusan Kebakaran.

SPM sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sedangkan mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan jenis pelayanan meliputi:

a) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan

verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak; dan

- b) Layanan Pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %

4.5.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4
1.	Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	100 %
		Jumlah warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100 %
		Jumlah Dokumen Standar	100 %

		operasional prosedur Satpol PP	
		Jumlah sarana prasarana Satpol PP sesuai standar	100 %
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan Masyarakat	100 %
		Dokumen Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi	100 %
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100 %
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100 %
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	100 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, adapun anggaran program dan kegiatan pendukung SPM sebagai berikut:

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
Program peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	1.813.360.000	1.791.149.020	98,78	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.797.160.000	1.775.069.020	98,77	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.684.680.000	1.662.589.020	98,69	

BAB IV PENERAPAN SPM

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	108.580.000	108.580.000	100	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.900.000	3.900.000	100	
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.000.000	0	0	Tidak dilaksanakan karena tidak ada warga Indonesia yang terkena dampak
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16.200.000	16.080.000	99,26	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9.480.000	9.346.600	98,21	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6.720.000	6.600.000	100	
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.055.189.756	344.924.585	16,78	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.314.770.000	2.818.241.752	85,02	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	53.250.000	53.120.000	99,76	

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.450.000.000	2.020.200.000	82,46	DBH DR khusus karhutla
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	811.520.000	744.921.752	91,79	Gaji TKD

4.5.5 Dukungan Personil

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan StatusKepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	57	5	62
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	0	0	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	52	6	58
	Total	109	11	120

Sumber: Bezetting Kepegawaian Sat Pol PP dan Damkar, 2022

Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/ Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Golongan IV			
	▪ IV/d	0	0	0
	▪ IV/c	1	0	1
	▪ IV/b	0	0	0
	▪ IV/a	5	0	5
2.	Golongan III			
	▪ III/d	7	1	8
	▪ III/c	9	1	10
	▪ III/b	2	0	2
	▪ III/a	7	3	10
3.	Golongan II			

	▪ II/d	26	0	26
	▪ II/c	0	0	0
	▪ II/b	0	0	0
	▪ II/a	0	0	0
	TOTAL	57	5	62

Sumber: Bezetting Kepegawaian Sat Pol PP dan Damkar, 2022

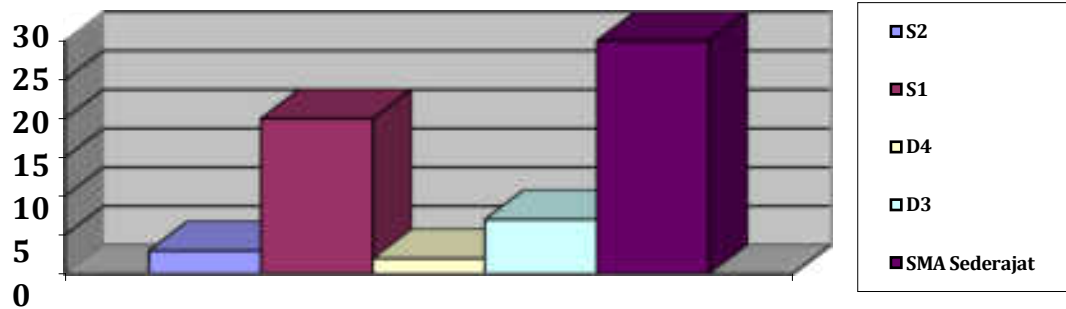
Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1	Doktor (S-3)	0	0	0
2	Master (S-2)	3	0	3
3	Sarjana (S-1 / D-IV)	20	2	22
4	Diploma (D-III)	4	3	7
5	SMA/ Sederajat	30	0	30
6	SMP/ Sederajat	0	0	0
7	SD	0	0	0
	Total	57	5	62

Sumber: Bezetting Kepegawaian Sat Pol PP dan Damkar, 2022

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam hitunganpersen dapat dilihat dalam Grafik 2.1 berikut ini :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 3 orang atau proporsinya sebesar 4,83 % dari jumlah pegawai. Strata 1 (S1) berjumlah 22 orang atau sebesar 35,48 % dari seluruh jumlah pegawai. Diploma 4 (D4) berjumlah 2 orang atau sebesar 2,75 persen dan diploma 3 (D3) berjumlah 7 orang atau sebesar 11,29 % untuk kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 30 orang 48,38 persen dari jumlah PNS.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yaitu:

- a) Jumlah personel dalam melakukan pelayanan masih dinilai kurang memadai;
- b) Indikator kinerja SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi belum terakomodir didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kab. Kotawaringin Barat dan IKU SKPD;
- c) Indikator kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran belum terakomodir didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kab. Kotawaringin Barat dan IKU SKPD;
- d) SPM yang telah ditetapkan masih belum menyentuh pelayanan publik yang bersifat non kebakaran, seperti evakuasi hewan liar, evakuasi sarang tawon, pohon tumbang, penyelamatan korban banjir dan orang hilang;
- e) Dalam pelaporan capaian SPM pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi pada semester tahun 2022 sebesar 0%, bagaimana penjelasan terkait hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

- f) Belum memiliki update data warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal yang berjarak 50 KM dari penegakan perda.

Solusi

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Diperlukan penambahan personel di Satuan Pol PP dan Damkar yang berkompeten;
- b) Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada frontliners/petugas layanan secara continue/berkelanjutan.
- c) Mengusulkan kepada pemerintah daerah agar SPM trantibumlinmas dan sub kebakaran agar dimasukkan kedalam IKU Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d) Membuat analisis kebutuhan SPM terhadap pelayanan non kebakaran dan mengusulkan agar dapat dimasukkan kedalam peraturan mendagri atau satu tingkat lebih tinggi sehingga pelayanan publik terhadap non kebakaran dapat dinilai dalam laporan capaian SPM;
- e) Penguatan pelaksanaan penindakan dalam bentuk SOP, sehingga kelalaian dalam penindakan penegakan perda dapat dicegah secara dini.
- f) Penguatan pelaksanaan penindakan sudah dianalisis melalui Manajemen Risiko.
- g) Berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melengkapi *data base* warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial memuat tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota pada Bab III Standar Pelayanan Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota tertera pada pasal 26.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	2	3	4
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi	100 %

	terlantar diluar panti	sosial diluar panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022
1	2	3	4
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah **Rp. 201.943.000,- (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).**

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan (Rp.)	%
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	152.990.750 ,-	150.375.006 ,-	100
	Kegiatan :	152.990.750,-	152.990.750,-	100
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial			
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	48.952.250,-	48.952.250,-	100
	KEGIATAN :			100
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	9.830.000	9.830.000,-	
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	39.122.250,-	39.122.250,-	100
Jumlah		201.943.000 ,-	201.943.000 ,-	100

4.6.5 Dukungan Personil

a. Potensi Sumber Kesejahteraan Perorangan

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 di tunjukkan pada tabel berikut:

**Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Tahun 2022**

No	Jumlah PSKS	Jumlah Populasi (Orang)

1.	Pekerja Sosial Profesional Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.	1 Orang
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	45 Orang
3.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	6 Orang
4.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	24 Orang
5.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	39 Orang
6.	Pendamping Penyandang Disabilitas Arut Selatan	2 orang
7.	Pendamping Home Care Lanjut Usia Terlantar	1 Orang
8.	Puskesmas	114 Orang
9.	Karang Taruna	101 Orang

b. Aparatur Sipil Negara

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dari kondisi jumlah pegawai berdasarkan data sampai dengan bulan desember 2022, jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Eselon			Staff	Jlh
		II	III	IV		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat		1	3	5	9
3	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		1	3	1	5
4	Bidang Rehabilitasi Sosial		1	3	1	5
5	Bidang Pemberdayaan Sosial		1	3	1	5
6	Bidang Penanganan Fakir Miskin		1	3	1	5
7	Bidang Rehabilitasi Sosial			1	2	
Jumlah		1	5	15	9	30

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. **Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sarana dan Prasarana dalam Penanganan PPKS belum memadai

3. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Penanganan Bencana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Solusi

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 antara lain:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat,
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan,
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Penanganan PPKS dan Penanggulangan Bencana,
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam penerapan pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
5. Melaksanakan pendataan, Monitoring, dan Evaluasi dalam rangka pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB V PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan kewajiban penyusunan LPPD tahun 2020.

LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat ini memuat data dan informasi hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dan capaian dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang disusun dengan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja ini berasal dari perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan dan dari Badan Pusat Statistik.

Laporan yang telah kami susun semoga menjadi gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022. Kami menyadari, selain capaian keberhasilan yang telah diraih, sejumlah pencapain kinerja belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perbaikan kinerja dan mengambil langkah-langkah mengatasi permasalahan dan tantangan yang menjadi penyebabnya.

Penyusun menyadari bahwa penyajian laporan ini masih belum sempurna. Sejumlah kendala dalam pengumpulan dan penyajian data menyebabkan tidak seluruh pengukuran kinerja urusan dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini menjadi pelecut kami untuk dapat menyajikan laporan dan data yang lebih baik ke depan.

Demikian, semoga LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil evaluasi selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa yang akan datang. Selanjutnya kritik yang sifatnya membangun kami harapkan dalam rangka mewujudkan **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat, menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”**.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada segenap pihak dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas kerja sama sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.